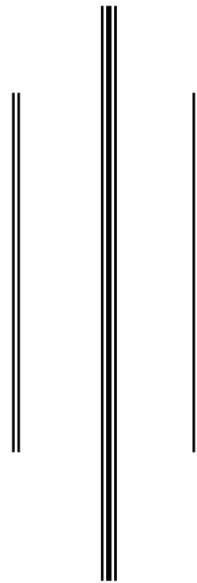




**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**



**KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Pasuruan Tahun 2021 telah dapat diselesaikan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan amanat yang harus dilaksanakan oleh Kepala Daerah sesuai Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

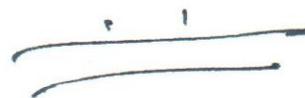
Bahwa penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Pasuruan Tahun 2021 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pearturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Penyelenggaraan tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sumber informasi utama untuk data yang dituangkan dalam LPPD harus bersumber dari masing-masing perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan, sedangkan data untuk capaian kinerja makro dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan instansi terkait lainnya.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini kami sampaikan terima kasih, semoga dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pasuruan.

Pasuruan, Maret 2022

WALIKOTA PASURUAN



H. SAIFULLAH YUSUF

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum.....	1
a. Undang-undang pembentukan daerah	1
b. Data geografis wilayah	3
c. Jumlah penduduk.....	5
d. Jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah, dan	7
e. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.....	14
1.1.2 Perencanaan pembangunan daerah	21
a. Permasalahan strategis pemerintah daerah	21
b. Visi misi kepala daerah	42
c. Program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah, dan	43
d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan	156
1.1.3 Penerapan standar pelayanan minimal	
BAB II. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	165
2.1 Capaian Kinerja Makro	165
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	171
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	171
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	223
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	234
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	237
BAB III. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN..	261
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi. 3.1.1 Target kinerja	
3.1.2 Realisasi.....	
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota	
3.2.1 Target kinerja	
3.2.2 Realisasi	
3.3 Permasalahan dan Kendala	
3.4 Saran dan Tindak Lanjut	
BAB IV. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ...	263
4.1 Urusan Pendidikan	263
4.1.1 Jenis pelayanan dasar.....	263
4.1.2 Target pencapaian standar pelayanan minimal daerah.....	265

4.1.3	Realisasi	265
4.1.4	Alokasi anggaran.....	267
4.1.5	Dukungan personil	267
4.1.6	Permasalahan dan solusi	268
4.2	Urusan Kesehatan.....	268
4.3	Urusan Pekerjaan Umum	287
4.4	Urusan Perumahan Rakyat	290
4.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .	
4.6	Urusan Sosial.....	293
4.7	Program dan Kegiatan.....	306
BAB V.	PENUTUP	309

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-undang Pembentukan Daerah

Secara administratif, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Buku Induk Kode Wilayah, Kota Pasuruan terdiri atas 4 kecamatan dan 34 kelurahan. Sebelumnya, wilayah Kota Pasuruan terdiri atas 3 Kecamatan dengan 34 kelurahan. Atas dasar pertimbangan dinamika kebutuhan pembangunan daerah dan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dengan prasyarat tertentu, wilayah kota terdiri atas minimal 4 kecamatan; maka Kota Pasuruan melakukan penyesuaian.

Tabel 1.1
Jumlah dan Luas Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Pasuruan

No.	Kecamatan/Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)
I.	Kecamatan Purworejo	
1	Kelurahan Purworejo	1,05
2	Kelurahan Purutrejo	1,15
3	Kelurahan Tembokrejo	1,03
4	Kelurahan Wirogunan	0,61
5	Kelurahan Kebonagung	0,86
6	Kelurahan Pohjentrek	1,90
7	Kelurahan Sekargadung	1,51
II.	Kecamatan Gadingrejo	
1	Kelurahan Petahunan	0,97
2	Kelurahan Randusari	0,34
3	Kelurahan Karangketug	1,88
4	Kelurahan Bukir	0,66
5	Kelurahan Gadingrejo	1,33

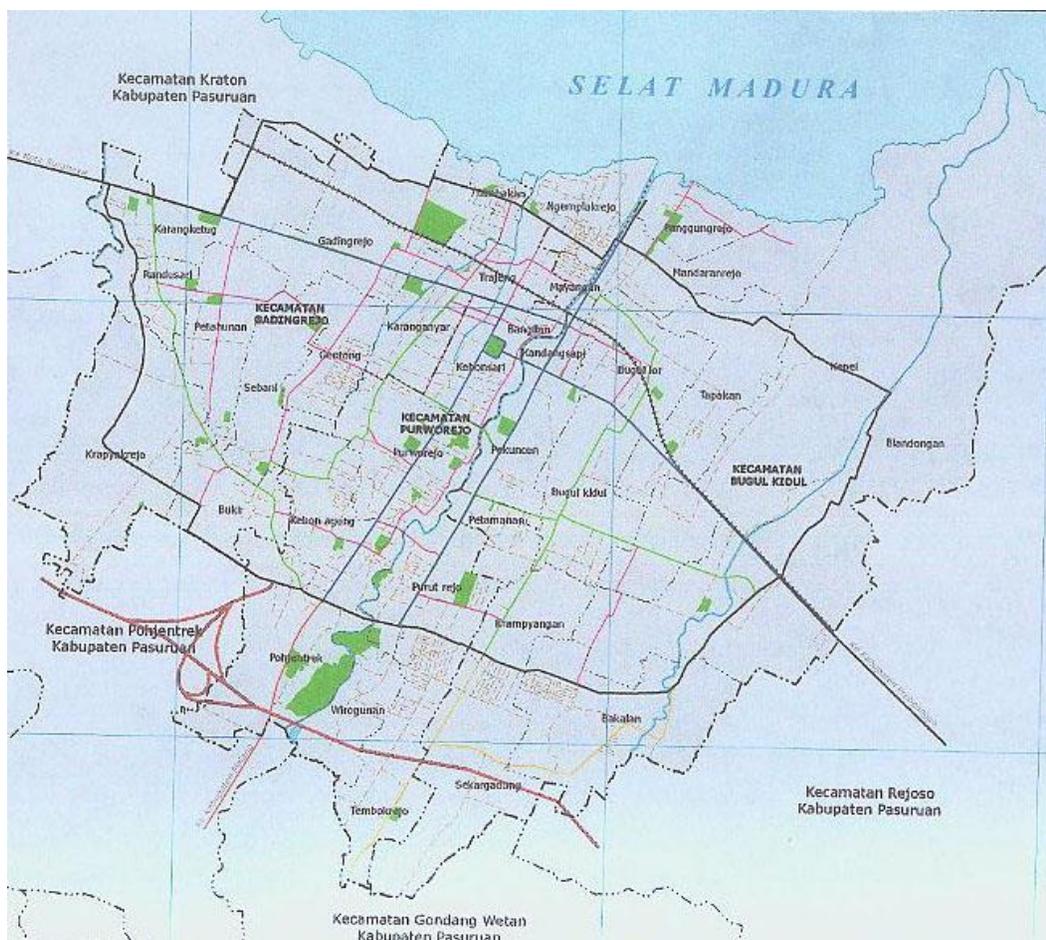
No.	Kecamatan/Kelurahan	Luas Wilayah (km2)
6	Kelurahan Sebari	0,87
7	Kelurahan Krapyakrejo	1,74
8	Kelurahan Gentong	0,69
III.	Kecamatan Bugul Kidul	
1	Kelurahan Kepel	2,54
2	Kelurahan Tapa'an	1,15
3	Kelurahan Bugul Kidul	0,95
4	Kelurahan Krampyangan	0,55
5	Kelurahan Bakalan	1,78
6	Kelurahan Blandongan	3,97
IV.	Kecamatan Panggungrejo	
1	Kelurahan Kandang sapi	0,46
2	Kelurahan Tamba'an	0,36
3	Kelurahan Mandaranrejo	0,58
4	Kelurahan Bugul Lor	0,96
5	Kelurahan Trajeng	1,13
6	Kelurahan Karanganyar	0,56
7	Kelurahan Bangilan	0,17
8	Kelurahan Panggungrejo	1,99
9	Kelurahan Pekuncen	0,80
10	Kelurahan Ngemplakrejo	1,05
11	Kelurahan Mayangan	0,28
12	Kelurahan Petamanan	0,42
13	Kelurahan Kebonsari	0,80

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Buku Induk Kode Wilayah

b. Data Geografis Wilayah

Kota Pasuruan dengan wilayah seluas 39 Km² atau 0,07 persen dari luas wilayah Jawa Timur, berlokasi di pesisir pantai utara pulau Jawa, tepatnya di sisi selat Madura. Secara astronomis terletak antara 112°45'-112°55' Bujur Timur dan 7°35'-7°45' Lintang Selatan. Wilayah Kota Pasuruan berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan, yakni Kecamatan Kraton di sebelah barat, Kecamatan Pohjentrek dan Kecamatan Gondangwetan di sebelah selatan dan Kecamatan Rejoso di sebelah timur; sementara sisi utara, berhadapan langsung dengan selat Madura.

Gambar 1.1.
PETA KOTA PASURUAN



Secara topografi, sebagaimana wilayah pesisir pada umumnya, Kota Pasuruan merupakan wilayah datar, dengan ketinggian daratan rata-rata ± 4 m di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kota Pasuruan memiliki tingkat kemiringan antara 0-1persen, yang melandai dari selatan ke utara; di sebelah utara terdapat bagian yang agak cekung sehingga pembuangan airnya lambat.

Proses pembentukan tanah di Kota Pasuruan didominasi oleh proses sedimentasi yang dihasilkan oleh tiga sungai yang melintas di Kota Pasuruan, yakni: sungai Gembong, sungai Petung dan sungai Welang. Tanah tersebut dikenal dengan tanah aluvial, yaitu tanah yang berasal dari pengendapan atau sedimentasi aliran air permukaan. Lokasi pembentukan tanah aluvial umumnya terjadi di daerah yang berbatasan dengan garis pantai dan lahan yang berada di sekitar muara sungai. Tanah hasil sedimentasi tersebut, sebagian besar dimanfaatkan sebagai areal tambak dan mangrove.

Secara hidrologi, wilayah Kota Pasuruan hanya terdiri atas air permukaan, yakni sungai. Sebagai wilayah pesisir, wilayah Kota Pasuruan menjadi lintasan ataupun muara sungai besar yang berhulu di kabupaten tetangga. Terdapat tiga sungai besar yang melintas di wilayah Kota Pasuruan, yakni: sungai Welang, sungai Petung dan sungai Gembong. Ketiga sungai tersebut berfungsi sebagai drainase alam yang bermuara di selat Madura, berkarakter melandai, sehingga seringkali mengalami sedimentasi, terutama di saat musim hujan.

Tabel 1.2
Sungai di Kota Pasuruan

No.	Nama Sungai	Panjang
1	Welang	1,00
2	Gembong	7,50
3	Petung	6,00
4	Sodo	3,00
5	Kepel	3,00
6	Calung	3,00

Sumber: Bappelitbangda Kota Pasuruan

Berhulu di Kabupaten Malang, sungai Welang melintas sepanjang 1 km di sisi barat Kota Pasuruan, tepatnya di wilayah Kelurahan Karangketug dan bermuara di Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Tabel 2.2 merincikan kondisi sungai yang ada di Kota Pasuruan. Sungai Gembong merupakan sungai terpanjang yang melintas di wilayah Kota

Pasuruan, tepatnya 7,5 km. Sungai ini berhulu di Kabupaten Pasuruan dan melintas dari selatan ke utara, seakan-akan membelah wilayah Kota Pasuruan.

Muara sungai Gembong berlokasi di perbatasan Kelurahan Mandaranrejo dengan Kelurahan Ngemplakrejo. Dengan ukuran yang cukup lebar, muara sungai Gembong dimanfaatkan sebagai pelabuhan tradisional sejak zaman dahulu hingga saat ini. Berhulu di Kabupaten Pasuruan, sungai Petung melintas sepanjang 6 km di sisi timur Kota Pasuruan, dengan lokasi muara di perbatasan Kelurahan Kepel dengan Kelurahan Blandongan.

c. Jumlah Penduduk

Pada akhir tahun 2021 jumlah penduduk Kota Pasuruan tercatat sebanyak 210.598 jiwa yang terdiri dari 105.303 jiwa penduduk laki-laki dan 105.295 jiwa penduduk perempuan (sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan Tahun 2021).

Sedangkan data jumlah penduduk Kota Pasuruan Per 31 Desember 2021 berdasarkan jenjang umur (Usia) adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Struktur Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2021

STRUKTUR USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
0-4	7.901	7.556	15.457
5-9	9.156	8.581	17.737
10-14	9.219	8.697	17.916
15-19	9.126	8.435	17.561
STRUKTUR USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
20-24	8.968	8.274	17.242
25-29	8.585	8.096	16.681
30-34	7.523	7.414	14.937
35-39	8.638	8.567	17.205
40-44	8.086	8.166	16.252
45-49	7.210	7.455	14.665
50-54	6.203	6.830	13.033
55-59	5.240	6.061	11.301
60-64	4.147	4.545	8.692

65-69	2.854	2.932	5.786
70-74	1.335	1.685	3.020
> 75	1.112	2.001	3.113
Total	105.303	105.295	210.598

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2021

Komposisi penduduk Kota Pasuruan mayoritas berimbang pada struktur usia 0 – 39 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Pasuruan memiliki sumber daya manusia yang cukup besar untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dan tingkat pertumbuhan masyarakat yang stabil utamanya pada usia dini.

Jumlah penduduk Kota Pasuruan berdasarkan Kecamatan Per 31 Desember 2021 adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Menurut Per Kecamatan
Per 31 Desember 2021

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	GADINGREJO	24.884	24.209	49.093
2	PURWOREJO	30.782	30.938	61.720
3	BUGUL KIDUL	15.798	16.064	31.862
4	PANGGUNGREJO	33.839	34.084	67.923
	TOTAL	105.303	105.295	210.598

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2021

Jumlah Penduduk Kota Pasuruan berdasarkan Kecamatan pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Kecamatan Panggungrejo mempunyai jumlah Penduduk yang terbesar yaitu sebesar 67.923 jiwa dibandingkan dengan 3 Kecamatan yang lainnya.

Jumlah Penduduk Kota Pasuruan berdasarkan Agama Per 31 Desember 2021 adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Kota Pasuruan berdasarkan Agama
Per 31 Desember 2021

NO	Kecamatan	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Kong huchu	Aliran Kepercayaan	Jumlah
1	GADINGREJO	48.252	467	202	50	119	2	1	49.093
2	PURWOREJO	59.910	1.000	560	60	183	7	0	61.720
3	BUGUL KIDUL	31.409	273	143	17	20	0	0	31.862
4	PANGGUNGREJO	65.170	1.107	879	11	742	14	0	67.923
	KOTA PASURUAN	204.741	2.847	1.784	138	1.064	23	1	210.598

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2021

Jumlah Penduduk Kota Pasuruan berdasarkan Pendidikan Per 31 Desember 2021 adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Kota Pasuruan berdasarkan Pendidikan
Per 31 Desember 2021

NO	Kecamatan	Tidak/ Belum Sekolah	Belum Tamat SD/ Seder ajat	Tamat SD/ Sede rajaat	SLTP/ Seder ajat	SLTA/ Sedera jat	DI/ II	Akade mi / DI / SI	DI V / Strata I	S II	S III	Jumlah
1	GADINGREJO	17.408	4.462	8.702	5.413	10.021	171	461	2.335	115	5	49.093
2	PURWOREJO	19.195	4.762	7.928	6.832	15.257	383	1.203	5.744	403	13	61.720
3	BUGUL KIDUL	9.753	2.799	5.359	3.720	6.843	163	495	2.516	210	4	31.862
4	PANGGUNGREJO	23.541	6.343	12.399	7.880	13.990	196	488	2.948	134	4	67.923
KOTA PASURUAN		69.897	18.366	34.388	23.845	46.111	913	2.647	13.543	862	26	210.598

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2021

d. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

1. Struktur Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan berpegang pada prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan dari suatu daerah.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan, potensi dan kemampuan daerah. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara arif, adil dan selaras serta perlu memperhatikan peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan peran tersebut daerah telah diberi kewenangan yang seluasluasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan wajib

dan urusan pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Adapun Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan di Kota Pasuruan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan asas :

1. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
3. Efisiensi;
4. Efektivitas;
5. Pembagian habis tugas;
6. Rentang kendali;
7. Tata kerja yang jelas; dan
8. Fleksibilitas.

Dari hasil pemetaan kelembagaan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Pasuruan, terdapat beberapa Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Kota Pasuruan, diantaranya :

- (1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas :
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanian;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

(3) Urusan pemerintahan pilihan, terdiri atas :

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. perdagangan;
- e. kehutanan;
- f. energi dan sumber daya mineral.
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Untuk melaksanakan otonomi daerah Pemerintah Kota Pasuruan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan disusunnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Kota Pasuruan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah seperti tersebut diatas, maka susunan organisasi Pemerintah Kota Pasuruan terdiri dari :

- (1) Sekretariat Daerah, Tipe B;
- (2) Sekretariat DPRD, Tipe C;
- (3) Inspektorat, Tipe B;
- (4) Dinas-Dinas Daerah, meliputi :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan, Tipe B, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;

- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe B, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta bidang pertanahan;
- d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tipe C, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Dinas Sosial, Tipe B, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- f. Dinas Tenaga Kerja, Tipe C, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Tipe A, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan, Tipe A, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe B, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. Dinas Perhubungan, Tipe B, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- k. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Tipe B, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, serta bidang statistik dan bidang persandian;
- l. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tipe B, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- m. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Tipe C, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

- n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe B, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- o. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Tipe B, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe B, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- q. Dinas Perikanan, Tipe C, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- r. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tipe B, merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan; dan
- s. Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe B, merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

(5) Badan-Badan Daerah, meliputi :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, Tipe A, merupakan Badan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- b. Badan Kepegawaian Daerah, Tipe C, merupakan Badan yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Tipe B, merupakan Badan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
- d. Badan Pendapatan Daerah, Tipe C, merupakan Badan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan

(6) Kecamatan, meliputi :

- a. Kecamatan Gadingrejo, Tipe A;
- b. Kecamatan Panggungrejo, Tipe A;
- c. Kecamatan Bugul Kidul, Tipe A; dan
- d. Kecamatan Purworejo, Tipe A.

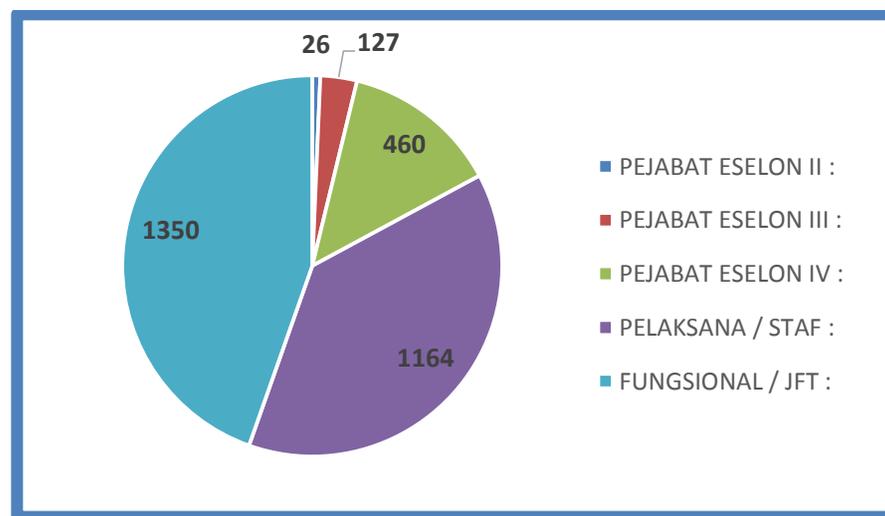
Adapun struktur organisasi secara keseluruhan Pemerintah Kota Pasuruan dapat dilihat pada bagan dibawah ini :



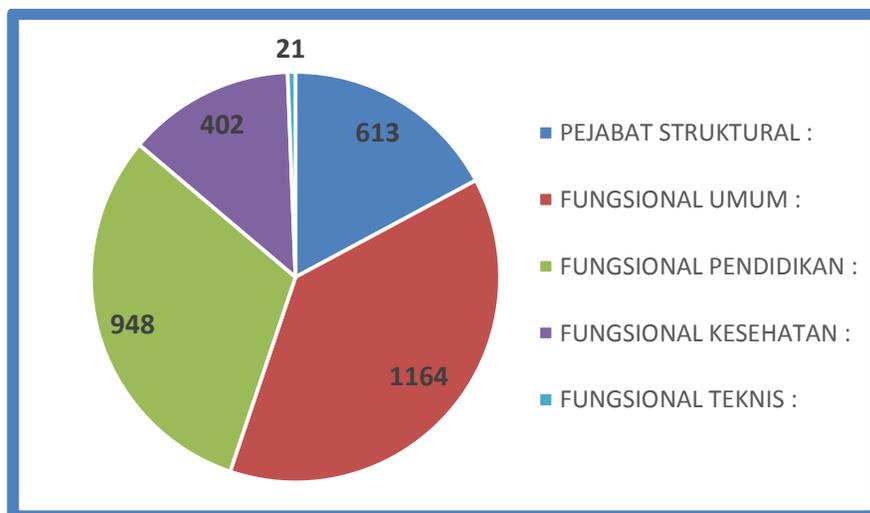
2. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu instrumen penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan kompetensi. Dalam pengelolaan data kepegawaian, Kota Pasuruan menggunakan Sistem Informasi Manajemen ASN Kota Pasuruan (Si Maskot) yang dilakukan secara online, sehingga mempermudah proses pengelolaan data kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. Adapun aplikasi Si Maskot ini bisa diakses pada halaman <http://202.148.24.10/simpeg/login>.

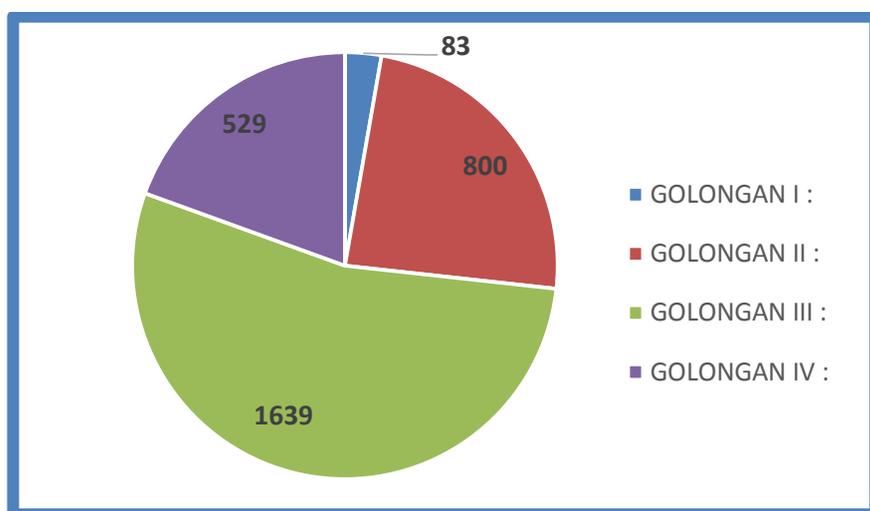
Untuk kondisi sumber daya manusia / kepegawaian Pemerintah Kota Pasuruan secara umum dapat digambarkan pada grafik dibawah ini :



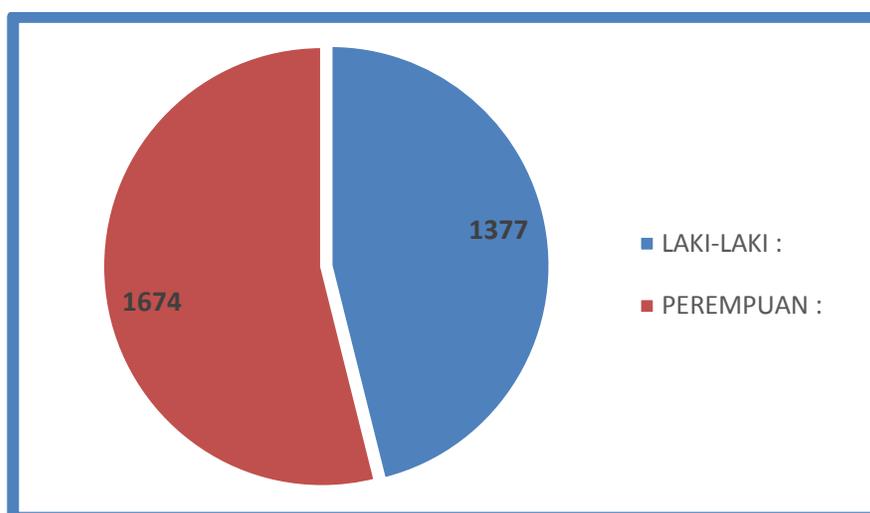
Jumlah ASN Kota Pasuruan berdasarkan Eselon



Jumlah ASN Kota Pasuruan berdasarkan Tipe Jabatan



Jumlah ASN Kota Pasuruan berdasarkan Golongan



Jumlah ASN Kota Pasuruan berdasarkan Jenis Kelamin

e. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan serta bermanfaat untuk masyarakat.

Pemerintah Kota Pasuruan dalam pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

APBD Tahun 2021 Pemerintah Kota Pasuruan disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan proses penganggaran daerah dimana secara konseptual terdiri dari formulasi kebijakan anggaran (*budget policy formulation*) dan perencanaan operasional anggaran (*budget operational planning*). Formulasi kebijakan anggaran yang menjadi dasar dalam perencanaan operasional anggaran adalah Kebijakan Umum Anggaran dan Pendapatan Daerah. Formulasi kebijakan anggaran berkaitan dengan analisis fiskal sedangkan perencanaan rasional anggaran lebih ditekankan

pada alokasi sumber daya keuangan. KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan tentang Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Latar belakang penyusunan KUA adalah dalam rangka menindaklanjuti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada tahun 2021 merupakan tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan tahun 2016-2021 dengan mengacu pada RKPD Kota Pasuruan tahun 2021.

Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan dan penganggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selanjutnya atas dasar ketentuan tersebut dan berdasarkan hasil kesepakatan Bersama antara pihak DPRD Kota Pasuruan dengan Pemerintah Kota Pasuruan, maka ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Data realisasi APBD tahun 2021 dituangkan dalam LKPJ Walikota Pasuruan Akhir Tahun Anggaran 2021 merupakan data *unaudited* atau belum diaudit oleh BPK. Data keuangan yang sudah diaudit akan disampaikan dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LPKD) Tahun Anggaran 2021. APBD tahun 2021 telah selesai dilaksanakan per 31 Desember 2021 dan saat ini masih dalam proses audit BPK RI Perwakilan Jawa Timur.

Berdasarkan realisasi dan struktur APBD Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021 terdiri atas :

- (a) Penerimaan Daerah yang didalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; serta
- (b) Pengeluaran Daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Secara umum Anggaran Pendapatan Daerah Kota Pasuruan tahun 2021, dapat dilihat pada rincian dibawah ini :

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 130.301.659.434,00
- b. Pendapatan Transfer sebesar Rp. 637.984.111.620,00
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 8.751.967.065,00 +
Rp. 777.037.378.110,00

Secara rinci uraian pendapatan daerah Kota Pasuruan bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Rincian Pendapatan Daerah Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 130.301.659.434,00
Pendapatan Pajak Daerah	Rp. 35.684.728.300,00
Pendapatan Retribusi Daerah	Rp. 7.785.361.410,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp. 5.942.447.467,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp. 80.889.122.257,00
PENDAPATAN TRANSFER	Rp. 637.984.111.620,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp. 588.837.142.700,00
Dana Perimbangan	Rp. 588.837.142.700,00
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp. 49.146.968,920,00
Pendapatan Bagi Hasil	Rp. 47.688.124.220,00
Bantuan Keuangan	Rp. 1.458.844.700,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	Rp. 8.751.967,056,00
Pendapatan Hibah	Rp. 1.500,000,000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 7.251.967.056,00
TOTAL PENDAPATAN	Rp. 777.037.738.110,00

2. Pengelolaan Belanja Daerah

Untuk penggunaan Anggaran Belanja Daerah Kota Pasuruan tahun 2021, dapat dilihat pada rincian dibawah ini :

- a. Belanja Operasi sebesar Rp. 863.055.571.996,00
- b. Belanja Modal sebesar Rp. 169.163.768.495,00
- c. Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 16.569.295.740,00 +
Rp. 1.048.788.636.231,00

Secara rinci uraian Belanja Daerah Kota Pasuruan bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Rincian Belanja Daerah Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN
BELANJA OPERASI	Rp. 863.055.571.996,00
Belanja Pegawai	Rp. 368.955.745.279,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 413.675.003.585,00
Belanja Hibah	Rp. 50.195.184.132,00
Belanja Bantuan Sosial	Rp. 30.229.639.000,00
BELANJA MODAL	Rp. 169.163.768.495,00
Belanja Tanah	Rp. 53.367.077.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 47.086.942.016,00
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	Rp. 37.956.592.494,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 29.652.423.785,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 1.100.733.200,00
BELANJA TAK TERDUGA	Rp. 16.569.295.740,00
Belanja Tak Terduga	Rp. 16.569.295.740,00
TOTAL BELANJA	Rp. 1.048788.636.231,00

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan terdiri dari penerimaan dan pengeluaran, untuk pembiayaan Kota Pasuruan tahun 2021 dapat dilihat pada rincian dibawah ini :

- a. Penerimaan Daerah sebesar Rp. 273.250.898.121,00
 - b. Pengeluaran Daerah sebesar Rp. 1.500.000.000,00 -
- Rp. 238.750.898.121,00**

Secara rinci uraian pembiayaan daerah Kota Pasuruan bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Rincian Pembiayaan Daerah Tahun 2020

	URAIAN	ANGGARAN
	PENERIMAAN DAERAH	Rp. 273.250.898.121,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp. 222.883.821.121.00
	Pencairan Dana Cadangan	Rp. 50.367.077.000,00
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
	PENGELUARAN DAERAH	Rp. 1.500.000.000,00
	Pembentukan Dana Cadangan	0,00
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp. 1.500.000.000,00
	TOTAL PEMBIAYAAN	Rp. 238.750.898.121,00

4. Target dan Realisasi

Capaian realisasi anggaran Kota Pasuruan tahun 2021 sebesar 78,85 % dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2021

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
4	PENDAPATAN	777.037.738.110,00	839.313.466.624,42	108,01
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	130.301.659.434,00	131.845.446.162,00	101,18
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	35.684.728.300,00	39.992.015.220,00	111,87
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah	7.785.361.410,00	7.591.157.397,00	97,51
4 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.942.447.467,00	5.849.860.799,95	98,44
4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	80.889.122.257,00	78. 482.412.745,47	97,02
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	637.984.111.620,00	700.206.060.982,00	109,75
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	588.837.142.700,00	602.690.607.348,00	102,35
4 . 2 . 1 . 01	Dana Perimbangan	588.837.142.700,00	602.690.607.348,00	102,35
4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	49.146.968.920,00	97.515.453.634,00	198,42
4 . 2 . 2 . 01	Pendapatan Bagi Hasil	47.688.124.220,00	94.930.558.934,00	199,07
4 . 2 . 2 . 02	Bantuan Keuangan	1.458.844.700,00	94.930.558.934,00	199,07
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	8.751.967.056,00	7.261.959.480,00	82,98
4.3.1	Pendapatan Hibah	1.500.000.000,00	0,00	0,00
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.500.000.000,00	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	1.048.788.636.231,00	858.584.017.159,52	81,86
5.1	BELANJA OPERASI	863.055.571.996,00	755.199.783.115,45	87,50
5.1 . 1	Belanja Pegawai	368.955.745.279,00	342.856.599.418,00	92,93
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	413.675.003.585,00	344.170.148.051,45	83,20
5.1.5	Belanja Hibah	50.195.184.132,00	43.671.306.937,00	87,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	30.299.639.000,00	24.501.728.709,00	81,05

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
5.2	BELANJA MODAL	69.163.768.495,00	93.025.829.540,07	54,99
5.2.1	Belanja Modal Tanah	53.367.077.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	47.086.942.016,00	38.521.859.899,00	81,81
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	16.569.295.740,00	10.358.404.504,00	62,52
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	16.569.295.740,00	10.358.404.504,00	62,52
5.3.1.01	Belanja Tidak Terduga	16.569.295.740,00	10.358.404.504,00	62,52
	SURPLUS /(DEFISIT)	(271.750.898.121,00)	(19.270.550.535,10)	7,09
6.1	PENERIMA PEMBIAYAAN	273.250.898.121,00	222.897.714.195,64	81,57
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	222.883.821.121,00	222,897,714,195,64	100,01
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	50.367.077.000,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000,00	2.651.096.415,76	176,74
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	2.651.096.415,76	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	271.750.898.121,00	220.246.617.779,88	81,05
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN(SILPA)	0,00	200.976.067.244,78	0,00

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan adalah perbedaan/kesenjangan (gap) pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai dimasa mendatang dengan kondisi saat ini. Dalam pembahasan ini, permasalahan pembangunan yang dijabarkan ialah indikator kinerja di setiap bidang/urusan yang belum mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan perbandingan dengan standar (SPM/SDGs/Standar Nasional/dengan target tahunan di dalam RPJMD/capaian tahun sebelumnya atau tren).

Permasalahan daerah Kota Pasuruan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, antara lain :

1. Dalam mengembangkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan dengan sasaran meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan.

Adapun permasalahan yang ada adalah :

- Peningkatan kesejahteraan pendidik belum diikuti dengan kualitas tenaga pendidik.
- Belum optimalnya kualitas lulusan anak didik.

2. Dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat.

Adapun permasalahan yang ada adalah :

- Balita gizi buruk.
- Tingginya penyakit tidak menular.
- Masih terdapat stunting.
- Tingginya angka kematian bayi.
- Tingginya angka kematian ibu melahirkan.
- Masih adanya kekerasan rumah tangga pada perempuan dan anak.
- Masih kurangnya sebagian masyarakat terhadap pola hidup sehat.

3. Dalam meningkatkan produktivitas masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan usaha dengan sasaran meningkat kesempatan kerja.

Adapun permasalahan yang ada adalah :

- Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka.
- Masih rendahnya kesempatan kerja.
- Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja.

- Masih rendahnya tata kelola lembaga koperasi.
 - Masih rendahnya produktivitas usaha mikro.
4. Dalam mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial, untuk mendukung pemerataan kesejahteraan sosial dengan sasaran meningkatnya daya saing sektor perindustrian, perdagangan dan jasa serta menurunnya kemiskinan.

Adapun permasalahan yang ada adalah :

- Rendahnya pertumbuhan industri.
 - Menurunnya laju pertumbuhan perdagangan.
 - Pendapatan per kapita lebih rendah dari Provinsi Jawa Timur.
 - Kenaikan pertumbuhan ekonomi yang tidak signifikan.
 - Tingginya angka kemiskinan.
5. Dalam meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang didukung dengan penataan ruang yang ramah lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan sasaran meningkatnya ketersediaan dan kelayakan infrastruktur serta prasarana dan sarana wilayah serta kualitas lingkungan hidup.

Adapun permasalahan yang ada adalah :

- Belum optimalnya konektivitas wilayah pertumbuhan baru.
 - Belum optimalnya kelayakan infrastruktur prasarana dan sarana wilayah.
 - Belum optimalnya kualitas air.
 - Belum optimalnya kualitas udara.
 - Belum optimalnya tutupan lahan.
6. Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk membangun pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung dengan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah serta menurunnya ketergantungan keuangan daerah.

Adapun permasalahan yang ada adalah :

- Belum maksimalnya indeks kepuasan masyarakat.
 - Belum optimalnya penerapan akuntabilitas kinerja.
 - Masih rendahnya pendapatan asli daerah.
 - Belum maksimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Mengembangkan aktualisasi nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal, untuk membangun

harmonis sosial dan kesalehan sosial dalam kehidupan

bermasyarakat dengan sasaran meningkatnya kerukunan masyarakat serta meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya.

Adapun permasalahan yang ada adalah :

- Belum optimalnya apresiasi dan partisipasi pengembangan dan pelestarian budaya.
- Masih adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah.
- Belum optimalnya masyarakat dalam tanggap bencana.

Isu strategis pembangunan Kota Pasuruan tahun 2016-2021 merupakan aspek global dalam penentuan kebijakan umum pembangunan jangka menengah berdasarkan permasalahan pembangunan. Isu-isu strategis Kota Pasuruan tahun 2016- 2021 disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal, yakni: permasalahan pembangunan, penelaahan RPJPD Kota Pasuruan 2005-2025, RPJMN 2014-2019, RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019, RPJMD Kabupaten Pasuruan 2013-2018 dan isu-isu global.

Adapun Visi, Misi serta Janji Kerja Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan juga menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kota Pasuruan 2016-2021. Isu-isu strategis pembangunan jangka menengah tahun 2016-2021, dikelompokkan ke dalam kelompok isu utama yaitu Isu Pembangunan Manusia, Isu Percepatan Ekonomi dan Infrastruktur, Isu Kota Hijau dan Isu Integritas Aparatur dan Birokrasi.

Isu Strategis Pembangunan
Internasional, Nasional, Propinsi dan
Kota Pasuruan Tahun 2016-2021

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Kota Pasuruan
1	Pembangunan manusia	Isu pendidikan dan kesehatan
		Isu narkoba
		Isu kesetaraan akses untuk disabilitas
		Isu Pemuliaan Perempuan
		Isu pemuda, seni, budaya dan olahraga
2	Percepatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur	Isu ketahanan pangan
		Isu industri kreatif
		Isu Ketimpangan Ekonomi dan Kesempatan Kerja
		Isu Banjir, Rob dan Genangan
		Isu Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota
3	Integritas aparatur	Isu Reformasi Birokrasi
		Isu Pembiayaan Pembangunan
4	Lingkungan lestari	Isu Perumahan dan Permukiman
		Isu Lingkungan Hidup
		Isu Strategis Internasional
		Masyarakat Ekonomi ASEAN
		Sustainable Development Goals (SDGs)
		Isu Strategis Nasional
		Isu Strategis dan Pilihan Kebijakan Pembangunan Kewilayahan
		Isu Strategis dan Pilihan Kebijakan Pembangunan Manusia
		Isu Strategis dan Pilihan Kebijakan Pembangunan Ekonomi
		Isu Strategis dan Pilihan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur
		Isu Strategis dan Pilihan Kebijakan Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
		Isu Strategis Provinsi
		Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
		Kemiskinan, Pengangguran dan Lapangan Kerja
		Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi
		Infrastruktur dan Perhubungan
		Perumahan, Pemukiman Kumuh, dan Persampahan
		Reformasi Birokrasi
		Isu Strategis Kabupaten Pasuruan

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Kota Pasuruan
		Pelestarian DAS Sungai Gembong, Sungai Petung dan Sungai Welang yang berhulu di Kabupaten Pasuruan
		Pembangunan prasarana dan saran wisata Gunung Bromo via Kabupaten Pasuruan, perlu didukung sarana akomodasi di Kota Pasuruan

Sumber: Tim Penyusun RPJMD Kota Pasuruan Perubahan 2016-2021, diolah

1. Isu Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi objek dan subjek pembangunan. Pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokusnya, akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi tenaga kerja. Untuk itu, akses layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi dalam rangka meningkatkan capaian target indeks pendidikan.

Kebijakan pemerintah untuk mengalihkan kewenangan pendidikan menengah atas dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi, menimbulkan pertanyaan sejumlah kelompok masyarakat mengenai keberlanjutan pendidikan gratis di Kota Pasuruan, khususnya untuk SMA/SMK. Kegundahan sebagian kelompok ini, dirasa cukup wajar mengingat pendidikan gratis di Kota Pasuruan sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir.

Permasalahan yang menyangkut aksesibilitas pendidikan bagi setiap lapisan masyarakat adalah mengurangi ketimpangan kualitas sekolah. Hal ini perlu dilakukan mengingat adanya kecenderungan penumpukan minat siswa di suatu sekolah padasaat penerimaan siswa baru, sementara di sekolah lain terjadi hal yang sebaliknya.

Upaya pengurangan ketimpangan ini antara lain dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan infrastruktur sekolah, meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, memberlakukan standar manajemen yang sama, serta menjalankan rotasi dan mutasi guru/kepala sekolah secara berkala, sehingga setiap sekolah dapat memberikan kualitas pelayanan secara merata bagi setiap lapisan masyarakat.

Di samping itu, dengan adanyarotasi dan mutasi secara berkala

diharapkan akan terjadi transfer informasi manajemen sekolah yang dibutuhkan dalam rangka mengurangi disparitas kualitas pendidikan sekolah di Kota Pasuruan. Diharapkan dengan berkurangnya ketimpangan kualitas pendidikan antar sekolah, maka para siswa dapat mengakses pendidikan yang berkualitas dalam setiap klasternya.

Selain akses layanan pendidikan yang belum merata, kurangnya mutu pelayanan pendidikan, belum optimalnya tata kelola lembaga pelayanan pendidikan juga rendahnya kualitas materi dan metode pembelajaran, masih menjadi persoalan penting untuk pencapaian target urusan pendidikan.

Faktor kesehatan masyarakat merupakan faktor penting dalam pelaksanaan program pembangunan. Kualitas kesehatan yang baik akan memberikan sumberdaya manusia yang siap untuk melaksanakan pembangunan daerah. Penanganan kesehatan yang sinergis dengan faktor lingkungan menjadi penting mengingat bahwa pada pelaksanaannya upaya penanganan kesehatan disamping upaya kuratif berupa pengobatan setelah masyarakat terkena penyakit, ada pula upaya promotif dan preventif sebagai upaya peningkatan kualitas dan menjaga kesehatan masyarakat agar tidak mudah terjangkiti penyakit.

Konsep penanganan kesehatan secara promotif dan preventif mendorong adanya pemahaman bahwa faktor kesehatan lingkungan merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan kualitas kesehatan lingkungan menjadi penting mengingat bahwa beberapa penyakit yang berjangkit luas pada warga masyarakat berawal dari rendahnya kualitas kesehatan lingkungan.

Untuk itu diperlukan peningkatan layanan kesehatan promotif dalam bentuk peningkatan higienitas dan sanitasi lingkungan yang ruang lingkupnya meliputi penyediaan air bersih rumah tangga, metode pengelolaan dan pembuangan sampah, penanganan kotoran dan air limbah rumah tangga sehingga dapat dipahami bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya promotif yang harus dijalankan secara lintas sektoral.

Upaya preventif juga promotif dalam konsep penanganan kesehatan adalah melalui kegiatan pos pelayanan terpadu (posyandu) yang menitikberatkan kepada penanganan kesehatan ibu dan bayi usia di bawah lima tahun (balita).

Disamping upaya promotif dan preventif tersebut di atas, upaya penting lain yang menjadi lini terdepan dalam isu kesehatan adalah upaya kuratif dan rehabilitatif, yaitu pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan. Bentuk pelayanan kuratif tersedia melalui pelayanan Balai Pengobatan, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), Klinik Kesehatan, dan Rumah Sakit.

2. Isu Narkoba

Isu strategis narkoba merupakan tindak lanjut dari kondisi darurat narkoba secara nasional. Status tersebut didasari realitas bahwa Indonesia telah menjadi pasar narkoba terbesar di Asia Tenggara serta bahwa kerugian yang ditimbulkan semakin meluas baik dari jumlah korban maupun manifestasi dampak negatifnya. Narkotika juga menjadi isu yang cukup relevan bagi daerah.

Penyalahgunaan narkoba tidak saja menjadi masalah keamanan dan penegakan hukum, namun juga terkait dengan isu kesehatan, sosial, ekonomi hingga politik. Oleh karena itu penanganan isu narkoba melibatkan lintas program, PD dan sektor. Pengarusutamaan pembangunan yang berwawasan anti-narkoba dapat ditempuh melalui dua arah, yakni: (a) Menurunkan demand side melalui intensifikasi upaya sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba; dan (b) Menekan supply side melalui peningkatan efektivitas pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain: Diseminasi informasi tentang bahaya narkoba melalui berbagai media; Pengadaan tes penggunaan narkoba secara berkala dilingkungan Pemerintahan Kota. (iii) information-sharing antar instansi dan oleh seluruh komponen masyarakat mengenai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; (iv) razia di kawasan potensial sentra produksi dan peredaran narkoba.

3. Isu Kesetaraan Akses Untuk Disabilitas

Pemerintah Kota Pasuruan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat masih memerlukan pembenahan dan penyempurnaan. Salah satunya adalah belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang, yang secara jelas menyebutkan bahwa kewajiban Pemerintah Daerah di antaranya adalah hak untuk pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi.

Upaya untuk mendorong partisipasi para disabilitas antara lain dengan mendirikan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan dan pemberian insentif kepada pemberi kerja yang mempekerjakan penyandang disabilitas minimal satu persen dari jumlah karyawan. Hak difabel lainnya yang perlu untuk difasilitasi secara optimal yaitu hak untuk hidup secara mandiri, termasuk penentuan tempat tinggal dengan menerima bantuan Pemerintah Daerah, serta menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Pasuruan akan mendorong perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Disamping itu hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah akan pentingnya peningkatan fasilitas publik dan pelayanan publik untuk disabilitas yang hingga saat ini belum maksimal.

4. Isu Pemuliaan Perempuan

Salah satu fakta terkait dengan kesetaraan gender adalah mengenai jumlah pelaku UKM di Kota Pasuruan, yang besarnya mencapai sekitar 90 persen, dimana mayoritas pekerjanya adalah perempuan yang bekerja adalah sebagai karyawan/buruh

Fakta lain yang cukup berkorelasi terhadap permuliaan perempuan adalah angka capaian ASI eksklusif di Kota Pasuruan, yang masih perlu ditingkatkan. Lebih lanjut dapat kita ketahui bersama bahwa belum semua rumah sakit dan puskesmas menerapkan 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM), serta belum semua tempat kerja menyediakan ruang ASI. Dalam rangka mendukung fasilitas publik ramah perempuan dan anak, perlu adanya kebijakan dan program Pemerintah Kota Pasuruan yang menyediakan daycare terjangkau bagi warga menengah ke bawah, terutama di wilayah pusat kegiatan ekonomi warga.

Guna menunjang pertumbuhan anak yang optimal, selain ASI eksklusif ditekankan pula akan pentingnya peran ayah pasca kelahiran anak. Alasan pentingnya paternity leave adalah bahwa secara alami, penting bagi seorang ayah untuk membentuk koneksi yang kuat dan ikatan dengan anaknya. Lebih lanjut juga bahwa kedekatan seorang ayah dan bayinya itu sama pentingnya dengan kedekatan dengan ibunya. Jadi akan sangat berarti buat seorang ayah untuk menghabiskan waktu

sebanyak mungkin dengan bayinya. Sebagai informasi praktik paternity leave telah diterapkan di berbagai negara, diantaranya Islandia selama 4 bulan, Finlandia selama 54 hari dan Portugal selama 20 hari.

Guna menunjang upaya permuliaan perempuan, Pemerintah Kota Pasuruan akan memberikan perhatian lebih terhadap fasilitas umum yang rawan tidak aman bagi kaum perempuan dan anak, diantaranya adalah penjaminan keamanan. Perlindungan perempuan juga erat kaitannya dengan masih terdapatnya kasus KDRT. Hal ini lah yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Pasuruan terhadap upaya permuliaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam upaya perlindungan anak, Pemerintah Kota Pasuruan telah melakukan upaya pelaksanaan Kota Layak Anak. Dalam mewujudkan Kota Pasuruan sebagai Kota Layak Anak dengan melakukan internalisasi Konsep KLA ke dalam kebijakan dan kelembagaan dalam rangka melaksanakan berbagai inisiatif untuk percepatan pencapaian KLA. Maka dari itu untuk mewujudkan Kota Pasuruan sebagai Kota Layak Anak perlunya meningkatkan upaya penguatan kelembagaan KLA melalui peraturan/kebijakan, pembentukan lembaga tugas dan pelibatan pemangku kepentingan terkait.

5. Isu Pemuda, Seni, Budaya dan Olahraga

Para pemuda di Kota Pasuruan sangat memerlukan wahana seni, budaya dan olahraga sebagai wadah aktualisasi diri. Tanpa adanya hal tersebut, akan membuat para pemuda cenderung menyalurkannya pada kegiatan yang sifatnya negatif. Terkait hal tersebut, diperlukan adanya sarana prasarana yang dapat menjadi media bagi para pemuda untuk mengaktualisasikan dirinya, sekaligus untuk memperkuat bentuk aktivitas komunitas.

Wahana seni, budaya dan olah raga yang berskala paling besar saat ini di Kota Pasuruan adalah Stadion Untung Suropati dan Gelanggang Olahraga. Selain itu di masing-masing wilayah, telah tersedia pula lapangan olahraga. Untuk ke depan, diperlukan banyak prasarana yang dapat mengakomodir penyelenggaraan berbagai kegiatan kepemudaan di bidang seni, budaya dan olah raga yang sesuai standar difasilitasi oleh Pemerintah. Diharapkan dengan peningkatan sarana prasarana tersebut dapat menjadi wahana interaksi sekaligus pengembangan bakat para pemuda dan masyarakat pada umumnya.

6. Isu Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling hakiki bagi manusia. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi agar kelangsungan hidup masyarakat terjaga dengan baik. Disisi lain tingkat ketergantungan pangan Kota Pasuruan pada daerah lain masih cukup tinggi. Dengan demikian keterjaminan kelangsungan pasokan pangan bagi seluruh warga Kota Pasuruan menjadi isu penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun diketahui bahwa tingginya inflasi volatile food menunjukkan harga bahan pangan sukar dikendalikan dan membuat warga kesulitan mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah gangguan kelancaran distribusi bahan pokok; rantai distribusi yang panjang dan pasokan yang tidak menentu, infrastruktur logistik yang kurang, kurangnya moda transportasi untuk mengangkut kebutuhan bahan pokok dari daerah penghasil, dan tidak adanya tempat-tempat untuk menyimpan bahan pangan yang dekat dengan warga. Kondisi ini diperburuk dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan dari sektor pertanian yang setiap tahun terus menurun dan belum digalakkannya pertanian kota.

Kendala lain yang dihadapi adalah masih terdapatnya indikasi bahan-bahan berbahaya dalam pangan yang tersedia di Kota Pasuruan. Oleh karena itu diperlukan pengawasan dan pengendalian kualitas kesehatan pangan serta pengawasan distribusi pangan. Pengawasan dan pengendalian tersebut juga diharapkan dapat mencegah spekulasi distribusi pangan.

7. Isu industri kreatif

Menurut definisi dari Kementerian Perdagangan RI, Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Lebih lanjut pengembangan industri kreatif di Kota Pasuruan masih berjalan lambat, sehingga perlu didorong lebih cepat.

Pertumbuhan industri di Kota Pasuruan mengalami tren penurunan. Sebagaimana diketahui, semakin tingginya tingkat persaingan di sektor industri dan makin terbukanya pasar secara global/regional

(hilangnya hambatan/proteksi perdagangan) mengakibatkan pertumbuhan industri Kota Pasuruan mengalami tren penurunan.

Walaupun jika dilihat dari pertumbuhannya, sektor industri pengolahan cenderung mengalami penurunan, namun sektor ini dimasa depan diharapkan dapat tetap memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan di Kota Pasuruan.

Salah satu prospek yang menjanjikan adalah menggeliatnya perkembangan industri kreatif yang ada. Dengan dukungan sumberdaya manusia dan potensi ekonomi lokal, ke depan industri ini diharapkan akan memberikan peluang pertumbuhan baru bagi industri di Kota Pasuruan.

Kota Pasuruan memiliki potensi yang menjanjikan untuk menjadi kota kreatif. Setidaknya, terdapat 2 sektor industri kreatif di Kota Pasuruan yakni: (i) desain; (ii) kerajinan tangan/kriya; dan (iii) cor logam. Harus diakui, eksistensi dan perkembangan industri kreatif di Kota Pasuruan relatif tertinggal bila dibandingkan dengan kota-kota lain, yang lebih mapan eksistensi industri kreatifnya, misal: Kota Yogyakarta, Kota/Kabupaten di Provinsi Bali maupun Kota Bandung.

Pun demikian, karakter dan kontribusi nyata industri Kota Pasuruan, dapat terlihat sebagai fakta umum yang belum secara optimal diberdayakan. Untuk itu, ke depan keterlibatan Pemerintah Kota Pasuruan, baik secara finansial melalui anggaran, maupun secara peran fasilitator dan kontributor pendukung harus lebih ditingkatkan.

Dukungan Pemerintah Kota Pasuruan dalam pengembangan ekonomi kreatif diantaranya dapat melalui: (i) pembangunan pusat kreatif (creative center); (ii) pengembangan kawasan kreatif; (iii) pemberian penghargaan di bidang kreatif; (iv) dukungan riset & pengembangan bagi produk lokal Kota Pasuruan yang memiliki kreasi unik; (v) kampanye pengembangan produk-produk kreatif; (vi) pengadaan seminar kreatif, dan lain sebagainya.

8. Isu Ketimpangan Ekonomi dan Kesempatan Kerja

Indeks Gini menunjukkan ketimpangan, yang juga menginformasikan semakin rendahnya peran kelompok penduduk dengan pendapatan rendah dalam pembentukan total pendapatan yang diterima penduduk suatu wilayah.

Lebih jauh lagi, kemiskinan hakikatnya tidak hanya mengenai kesenjangan pendapatan, melainkan bersifat multidimensi sehingga hal ini berkorelasi dengan aspek kesehatan, pendidikan dan kualitas hidup masyarakat. Kondisi saat ini di Kota Pasuruan masih terdapat warga miskin/rentan miskin yang tidak mendapatkan akses kebutuhan dasar dan kesempatan kehidupan yang layak. Adanya persoalan tersebut dapat menghambat pembangunan dan stabilitas perekonomian Kota Pasuruan, sehingga perlu upaya khusus dalam perbaikan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat, salah satunya melalui penggunaan Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM), yang mencakup akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup, serta perlu adanya perlindungan fiskal dan keadilan hukum bagi masyarakat.

Penyediaan lapangan kerja menjadi aspek krusial dalam menekan angka kemiskinan, namun penyediaan lapangan kerja masih menjadi masalah utama bagi mayoritas warga Kota Pasuruan. Selain penyediaan lapangan kerja, aspek penilaian kemudahan berbisnis juga cukup mendasar dalam upaya mendorong perekonomian Kota Pasuruan. Selain penyediaan lapangan pekerjaan dan mengupayakan terwujudnya kemudahan berbisnis, diupayakan pula pengembangan kewirausahaan bagi masyarakat Kota Pasuruan. Hal ini penting mengingat bahwa prospek kewirausahaan di Kota Pasuruan cukup baik dan pengembangannya akan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar.

9. Isu Banjir, Rob dan Genangan

Rentannya kondisi Kota Pasuruan terhadap banjir dan genangan tidak terlepas dari geografi Kota Pasuruan, yang memiliki tingkat kemiringan 0-3 persen dan aliran 3 sungai besar di dalam wilayahnya. Disamping itu adanya perkembangan dalam bentuk kegiatan konstruksi di wilayah Kota Pasuruan serta terjadinya alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman, menyebabkan berkurangnya luas daerah resapan. Selain itu juga ditambah dengan kondisi dimana sebagian besar tanah di Kota Pasuruan sudah menjadi hak milik perseorangan, kian mempersulit penataan kota dalam membangun infrastruktur pengendali banjir, drainase kota, maupun pembangunan sumur resapan. Hal ini perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan (stake holder) terkait pengelolaan skema pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam implementasi penanggulangan banjir dan genangan adalah diperlukannya penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana, dengan mengefektifkan berbagai upaya perbaikan sistem sungai dan saluran, pintu air, proteksi air laut, pengembangan sistem informasi untuk peringatan dini, dan kesiap-siagaan masyarakat.

Selain banjir, Pemerintah Kota Pasuruan juga perlu mengantisipasi fenomena banjir rob yang disebabkan oleh pasang surut air laut maupun penurunan muka tanah(land subsidence) pada beberapa kawasan. Dalam rangka menanggulangi hal tersebut diperlukan upaya pembangunan tanggul laut dan tanggul muara sungai.

10. Isu Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan untuk menjamin pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang guna terwujudnya visi, misi, dan tujuan penataan ruang. Adapun beberapa instrumen yang terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang antara lain terdiri atas: Peraturan Zonasi, arahan pemanfaatan ruang di atas dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana/sarana umum, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif,sertapenjatuhan sanksi.

Peraturan Zonasi merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang memuat uraian zonasi pada setiap zona peruntukan, meliputi: ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, antara lain Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Daerah Hijau (KDH), Ketinggian Bangunan, dan sebagainya, termasuk ketentuan mengenai prasarana dan sarana minimum, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang

Selanjutnya mengenai pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang diselenggarakan untuk: meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang; memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Dalam implementasi pemanfaatan ruang, seringkali ditemukan adanya pelanggaran. Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana. Salah satu bentuk pelanggaran adalah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang atau izin yang diberikan.

Dalam praktek pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang saat ini, masih ditemukan berbagai permasalahan, antara lain belum adanya peraturan dan instrumen yang mengatur tentang insentif dan disinsentif dari Pemerintah, keterbatasan data dan informasi, serta belum efektifnya kelembagaan dan peran serta masyarakat.

Keterbatasan data/ informasi, dokumen, dan peta terkait kondisi di lapangan seringkali menyulitkan upaya-upaya pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, untuk pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, selain diperlukan adanya peraturan dan panduan yang implementatif, juga diperlukan dukungan sistem informasi yang berkaitan dengan dinamika pemanfaatan ruang di lapangan.

Permasalahan dalam implementasi pengendalian pemanfaatan ruang sangat erat kaitannya dengan isu efektivitas kelembagaan dalam pengendalian penataan ruang. Agar dapat menciptakan tertib ruang sesuai dengan rencana tata ruang, maka pengendalian pemanfaatan ruang harus dilakukan secara terpadu, bukan hanya oleh perangkat daerah yang berwenang, tetapi juga harus didukung oleh lembaga lain, baik pemerintah dan non- pemerintah di level pusat sampai dengan daerah. Kurangnya koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang berakibat pada rendahnya keterpaduan pemanfaatan ruang, mengingat penataan ruang merupakan urusan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Keterbatasan perangkat daerah atau sumber daya manusia dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang juga menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan solusi. Selama ini pengendalian pemanfaatan ruang masih menjadi tanggung jawab Pemerintah, sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 telah mengatur bentuk dan tata cara masyarakat dalam berpartisipasi dalam penataan ruang. Namun dalam pelaksanaannya, partisipasi masyarakat dan/atau organisasi sosial kemasyarakatan maupun LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang ada masih belum optimal. Selama ini LSM dan

masyarakat baru dilibatkan dalam proses penyusunan rencana tata ruang, namun belum dilibatkan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

11. Isu Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi adalah jalan utama dalam rangka mewujudkan pelayanan pemerintah yang lebih optimal. Reformasi birokrasi secara berkesinambungan menjadi mutlak untuk dilakukan dimana itu dapat terwujud jika Pemerintah memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dengan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur serta tata laksana dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif.

Adapun permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain adalah masih perlunya penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas dan transparansi, membenahan birokrasi terkait perubahan budaya kerja yang mengutamakan profesionalisme dan akuntabilitas bagi seluruh aparat pemerintah secara terpadu dan berkesinambungan. Diperlukan pula upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyesuaian struktur organisasi, dan jumlah pegawai untuk mewujudkan organisasi tepat ukuran dan fungsi yang lebih optimal dalam peningkatan kualitas dan akselerasi pelayanan publik.

Aspek penting lainnya adalah perlunya kebijakan dan pelayanan pemerintah yang berbasis data yang terintegrasi serta dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Lebih lanjut, guna meminimalisir praktik KKN, konflik kepentingan, serta menghindari high cost economy diperlukan peraturan khusus yang mengatur hubungan antar lembaga.

12. Isu Pembiayaan Pembangunan

Mengingat tingginya kebutuhan anggaran dalam mewujudkan penyediaan infrastruktur dan layanan publik lainnya serta terbatasnya anggaran yang dapat dialokasikan untuk keperluan dimaksud, maka Pemerintah Kota Pasuruan dituntut untuk mampu mencari sumber-sumber alternatif pembiayaan lain untuk memenuhi kebutuhan Kota Pasuruan akan hal tersebut di atas.

Ada beberapa alternatif pembiayaan non-APBD yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Pasuruan dan dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, di antaranya skema

Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan skema penerbitan Obligasi Daerah. Namun demikian, Pemerintah Kota Pasuruan harus mempertimbangkan dan mampu menghitung kemampuan Pemerintah Kota Pasuruan dalam menjalankan kewajiban pengembalian pembiayaan yang diperoleh dari berbagai skema dimaksud. Skema KPBU dan Obligasi Daerah merupakan pendekatan/skema yang relatif baru dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik di Kota Pasuruan, sehingga Pemerintah Kota Pasuruan perlu melakukan berbagai langkah strategis dalam penyiapan pengimplementasian dari sisi regulasi, kelembagaan, kapasitas SDM, dan lain-lain.

Selain skema pembiayaan yang relatif baru tersebut di atas, adapula bentuk pelibatan lain dari pihak swasta yang telah dimanfaatkan, yaitu skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU) / Corporate Social Responsibility (CSR). Sejauh ini, sudah cukup banyak layanan publik dan fasilitas kepada masyarakat yang diperoleh dari skema TSLDU. Namun demikian, dirasakan masih ada peluang dan ruang untuk optimalisasi baik dari sisi swasta maupun Pemerintah Kota Pasuruan didalam pengelolaannya, diantaranya sinergi antara kegiatan TSLDU dengan program pembangunan dan kesesuaian dengan kebutuhan riil di masyarakat.

Selain pembiayaan yang berasal dari pemerintah dan pihak swasta, terdapat potensi pembiayaan yang cukup signifikan dan belum dioptimalkan oleh pemerintah, yaitu pendanaan yang bersifat swadaya dan berasal dari komunitas/masyarakat itu sendiri. Selama ini, pola pembiayaan yang bersumber dari dana masyarakat telah banyak digunakan untuk keperluan aktivitas yang berbasis komunitas seperti pembangunan rumah ibadah, aktifitas sosial kemasyarakatan, dan lain-lain. Untuk lebih menggerakkan potensi "swa-pendanaan" Pemerintah Kota Pasuruan perlu mendorong dan melakukan pembinaan melalui tokoh-tokoh masyarakat, memberikan stimulan dan apresiasi terhadap komunitas masyarakat yang mampu memberdayakan potensi yang ada di mereka untuk meningkatkan kualitas lingkungan serta kesejahteraan masyarakat setempat.

13. Isu Perumahan dan Permukiman

Seiring dengan pertumbuhan penduduk di Kota Pasuruan,

kebutuhan akan perumahan dan permukiman pun semakin meningkat. Hingga saat ini peruntukan lahan untuk perumahan dan permukiman sudah menduduki proporsi terbesar di Kota Pasuruan. Namun dalam kenyataannya tingginya permintaan terhadap perumahan dan permukiman, tidak disertai dengan penambahan jumlah perumahan dan permukiman, sehingga mengakibatkan adanya backlog.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Pasuruan adalah permukiman kumuh. Area permukiman di wilayah Kota Pasuruan belum tertata sepenuhnya, sehingga perlu ditekankan pentingnya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota melalui prinsip-prinsip revitalisasi dalam bentuk penataan kampung, perbaikan lingkungan maupun pembangunan kembali. Kota Pasuruan sebagai magnet bagi migrasi penduduk merupakan salah satu faktor yang mendorong munculnya kawasan-kawasan kumuh di Kota Pasuruan, sehingga optimalisasi pencegahan dan penanganan terhadap penertiban permukiman kumuh perlu terus ditingkatkan melalui penataan kawasan sungai, penertiban tanah negara, dan penertiban jalur hijau yang saat ini masih terdapat permukiman kumuh. Dengan melakukan perbaikan lingkungan tempat tinggal dan penyediaan hunian yang layak dapat membantu mewujudkan salah satu sasaran SDGs, yakni 'Membuat kota dan permukiman yang inklusif, aman, berdaya tahan, dan berkelanjutan'.

14. Isu Lingkungan Hidup

Isu lingkungan menempati posisi strategis dalam konteks pembangunan berkelanjutan, yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Faktor penting untuk mencapai berkelanjutan adalah pembangunan dengan tetap memperhitungkan faktor lingkungan. Penanganan yang tepat terhadap permasalahan lingkungan yang muncul sebagai dampak dari pembangunan menjadi tugas pemerintah.

Tingginya tingkat kegiatan di Kota Pasuruan mengakibatkan antara lain bertambahnya luas lahan terbangun dan produksi polusi. Kondisi saat ini menunjukkan kemampuan daya tampung kota semakin menurun sebagai dampak dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan dan penambahan daya dukung kota pada lokasi-lokasi yang masih memungkinkan.

Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan kota tidak terlepas dari penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) kota. Sekalipun luasan RTH di Kota Pasuruan selama periode 2010-2015 cenderung meningkat, tetapi masih jauh dari target nasional sebesar 30 persen dari luas kota secara keseluruhan. Upaya pemenuhan kebutuhan RTH sampai saat ini dilakukan dengan membangun taman Rukun Tetangga (RT), taman Rukun Warga (RW), taman kelurahan, taman kecamatan, taman kota, hutan kota, jalur hijau, permakaman, penghijauan sempadan sungai, dan penghijauan sempadan rel kereta api yang tersebar merata di berbagai lingkungan/permukiman.

Untuk pengelolaan sampah perkotaan relatif meningkat dari tahun ke tahun, dimana cakupan pelayanan pengangkutan sampah pada tahun 2014 berkisar 62,13 persen dan meningkat menjadi 63,01 persen pada tahun 2015. Permasalahan sampah perlu ditangani sesegera mungkin karena Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Blandongan memiliki batas masa pakai tertentu. Gerakan seperti pengembangan bank sampah di lingkungan masyarakat perlu lebih diintensifkan lagi. Optimasi 3-R (reuse, reduce, dan recycle) di lingkungan keluarga juga perlulah ditingkatkan, sehingga dapat dihasilkan sampah yang sangat sedikit (zero waste home). Penggunaan plastik harus diminimalisasi, selain itu dapat dikembangkan suatu produk hasil dari daur ulang sampah (recycle) skala lingkungan yang bernilai ekonomis. Pola waste to energy skala kota perlu segera diinisiasi, untuk kemudian juga dapat diterapkan dalam lingkup yang lebih kecil lagi, seperti di tingkat RW. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah B3 di tingkat kota juga menjadi aspek penting yang perlu ditingkatkan. Sarana truk sampah, motor sampah, dan sarana lainnya perlu disediakan secara layak dan cukup. Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang inovatif akan menjadi salah satu perhatian agar tidak mengganggu lingkungan di sekitarnya. Pengakuan melalui penghargaan dari individu yang berjasa dalam menggalakkan kebersihan akan menjadi salah satu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, disamping pelaksanaan kampanye di media cetak/digital.

Air menjadi masalah yang memerlukan perhatian serius. Untuk mendapatkan air dengan kualitas baik sesuai standar tertentu sudah cukup sulit untuk didapatkan. Hal ini dikarenakan air sudah banyak tercemar oleh

bermacam-macam limbah dari berbagai hasil kegiatan manusia. Sehingga menyebabkan kualitas air menurun, begitupun dengan kuantitasnya. Secara umum, sumber-sumber pencemaran air adalah limbah industri (bahan kimia baik cair maupun padatan, sisa-sisa bahan bakar, tumpahan minyak atau oli), limbah pertanian, limbah pengolahan kayu, serta limbah rumah tangga. Usaha-usaha yang dapat dilakukan menjaga air agar tetap bersih diantaranya adalah menempatkan daerah industri jauh dari daerah perumahan atau permukiman, pembuangan limbah industri diatur sehingga tidak mencemari lingkungan atau ekosistem, pengawasan terhadap penggunaan jenis-jenis pestisida dan zat-zat kimia lain yang dapat menimbulkan pencemaran, memperluas gerakan penghijauan, penindakan tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat teekait arti lingkungan hidup sehingga masyarakat lebih mencintai lingkungan hidupnya.

Fenomena pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim berdampak terjadinya perubahan sosial atau kependudukan dan budaya, berbagai kajian sosial menemukan bahwa pola hubungan sosial berkaitan sangat erat dengan pola iklim. Hasil kajian IPCC (2007) menunjukkan bahwa sejak tahun 1850 tercatat adanya 12 tahun terpanas berdasarkan data temperatur permukaan global. Sebelas dari duabelas tahun terpanas tersebut terjadi dalam waktu 12 tahun terakhir ini. Kenaikan temperatur total dari tahun 1850-1899 sampai dengan tahun 2001-2005 adalah 0,76ES. Permukaan air laut rata-rata global telah meningkat dengan laju rata-rata 1,8 mm per tahun dalam rentang waktu antara lain anatar tahun 1961-2003. kenaikan total permukaan air laut yang berhasil dicatat pada abad ke-20 diperkirakan 0,17 m. laporan IPCC juga menyatakan bahwa kegiatan manusia ikut berperan dalam pemanasan global sejak pertengahan abad ke-20. pemanasan global akan terus meningkat dengan percepatan yang lebih tinggi pada abad ke-21 apabila tidak ada upaya menanggulangnya. Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan frekuensi maupun intensitas kejadian cuaca ekstrim. IPCC menyatakan bahwa pemanasan global mengakibatkan terjadinya perubahan yang signifikan dalam sistem fisik dan biologis, seperti peningkatan intensitas badai tropis, perubahan pola presipitasi, salinitas air laut, perubahan pola presipitasi, salinitas air laut, perubahan pola angin, mempengaruhi masa reproduksi, frekuensi serangan hama dan wadah

penyakit, serta mempengaruhi berbagai ekosistem yang terdapat di daerah dengan garis lintang yang tinggi (termasuk di daerah arktika dan antartika), lokasi yang tinggi serta ekosistem-ekosistem pantai. Jika tidak ada upaya yang sistematis dan terintegrasi untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan perbaikan kondisi lingkungan lokal dan global mulai dari sekarang, maka dampak yang ditimbulkan akibat adanya perubahan iklim ke depan akan semakin besar dan lebih lanjut akan berdampak pada sulitnya mencapai sistem pembangunan yang berkelanjutan. Penanganan masa perubahan iklim dalam konteks pembangunan membutuhkan manajemen perubahan iklim secara efektif, dan pada saat bersamaan mengantisipasi dampak perubahan iklim global jangka panjang secara komprehensif. Juga membutuhkan pendekatan lintas sektor baik pada tingkat nasional, regional maupun lokal. Dalam menghadapi perubahan iklim, peningkatan ketahanan sistem dalam masyarakat untuk mengurangi resiko bahaya perubahan iklim dilakukan melalui upaya adaptasi dan mitigasi. Adaptasi merupakan tindakan penyesuaian sistem alam dan sosial untuk menghadapi dampak negatif dari perubahan iklim. Namun upaya tersebut akan sulit memberi manfaat secara efektif apabila laju perubahan iklim melebihi kemampuan beradaptasi. Oleh karena itu, adaptasi harus diimbangi dengan mitigasi, yaitu upaya mengurangi sumber maupun peningkatan emisi (penyerapan) gas rumah kaca, agar supaya proses pembangunan tidak terhambat dan tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai. Dengan demikian, generasi yang akan datang tidak terbebani oleh ancaman perubahan iklim secara lebih berat.

Alih fungsi lahan dalam arti perubahan penggunaan lahan, pada dasarnya tidak dapat dihindarkan dalam pelaksanaan pembangunan. Pertumbuhan penduduk yang pesat serta bertambahnya tuntutan kebutuhan masyarakat akan lahan, seringkali mengakibatkan benturan kepentingan atas penggunaan lahan serta terjadinya ketidaksesuaian antara penggunaan lahan dengan rencana peruntukannya. Sedangkan lahan itu sendiri bersifat terbatas dan tidak bisa ditambah kecuali dengan kegiatan reklamasi. Keterbatasan lahan di perkotaan menyebabkan kota berkembang secara fisik ke arah pinggiran kota. Terkait dengan penggunaan lahannya, daerah pinggiran merupakan wilayah yang banyak mengalami perubahan penggunaan lahan terutama perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian yang disebabkan

adanya pengaruh perkembangan kota di dekatnya. Penurunan luas lahan pertanian di wilayah ini perlu mendapat perhatian khusus mengingat hal ini akan membawa dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat perkotaan. Mengingat wilayah ini merupakan wilayah yang akan berubah menjadi kota sepenuhnya di masa mendatang maka perlu komitmen dari penentu kebijakan untuk mengelola dan menatanya agar menjadi kota yang ideal sesuai dengan konsep kota yang berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah serta Rencana Detail Tata Ruang Kota yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan di Kota.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

b.1. Visi Kota Pasuruan

Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam periode waktu tertentu. Visi pembangunan daerah Kota Pasuruan untuk periode 2021-2024 adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Kota Pasuruan sebagai kota yang maju ekonominya, indah kotanya dan harmoni warganya (MADINAH)”

Berdasarkan misi pembangunan yang hendak dicapai, maka dalam perumusan dan penjelasannya, menghasilkan pilar-pilar misi yang diterjemahkan sebagai berikut:

1. Kota Pasuruan maju ekonominya :

Mempercepat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi berbasis potensi local untuk membuka lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

2. Kota Pasuruan Indah Kotanya :

Membanguna kota yang indah dan nyaman melalui konektivitas infrastruktur ekonomi dan sosial berkelanjutan.

3. Kota Pasuruan Harmoni Warganya :

Memantabkan kehidupan masyarakat multicultural yang harmonis dengan modal sosial yang tangguh serta jaminan akses pendidikan dan kesehatan yang merata serta transformasi layanan publik yang mudah dan cepat melalui digitalisasi manajemen dan birokrasi yang adaptif.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Tabel 6.4

Program Pembangunan Daerah Jangka Menengah Yang Disertai Pagu Indikatif Kota Pasuruan Tahun 2016-2019

Rekening	Misi / Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Sasaran / Program)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah		
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
					Trgt	Rp juta	Trgt	Rp juta	Trgt	Rp juta	Trgt	Rp juta		Trgt	Rp juta
	Misi 1 : Meningkatkan partisipasi dan layanan kualitas pendidikan yang terjangkau														
	Tujuan : Mengembangkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan dalam upaya membentuk generasi yang tangguh dan berkarakter	Indeks pendidikan	85,0	Indeks	85,2		85,4		85,7		85,9		85,9	-	
	Sasaran 1 : Meningkatnya keterjangkauan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berkualitas	APK jenjang pendidikan PAUD	80,1	%	81,1		82,2		82,8		83,4		83,4	-	
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	80,0	%	90,0	3.004,0	90,0	940,2					-	-	Dinas Pendidikan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak	80,0	%	90,0	187,7	90,0	201,9					-	-	Dinas Pendidikan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1.01.1.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Proporsi personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	80,0	%	90,0	76,7	90,0	25,3					-	-	Dinas Pendidikan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu	100,0	%	100,0	82,5	100,0	82,5					-	-	Dinas Pendidikan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Peningkatan anak usia dini yang bersekolah	100,0	%	100,0	669,0	100,0	1.230,4					-	-	Dinas Pendidikan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Kelulusan PAUD	100,0	%	100,0		100,0						-	-	
		Jumlah peserta didik PAUD	7.048,0	Anak							10.427,0	3.947,5	10.427,0	3.947,5	
		Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	-	%							12,8		12,8	-	
		Jumlah masyarakat yang mengikuti Kejar Paket A, B dan C	353,0	Warga belajar							500,0		500,0	-	
		jumlah masyarakat yang mengikuti kursus	240,0	Orang							250,0		250,0	-	
		Jumlah siswa/siswi yang memiliki sertifikat baca Al Quran dengan nilai minimal 70	-	Siswafi							400,0		400,0	-	
1.01.1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Jumlah peserta didik PAUD	7.048,0	Anak					10.327,0	3.792,4			-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi	-	%					4,3					-	

		Jumlah masyarakat yang mengikuti Kejar Paket A, B dan C	353,0	Warga belajar					540,0				-	-	
		jumlah masyarakat yang mengikuti kursus	240,0	Orang					240,0				-	-	
		Jumlah siswa/siswi yang memiliki sertifikat baca Al Quran dengan nilai minimal 70	-	Siswa/i					400,0				-	-	
	Sasaran 2 : Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dan terjangkau	Angka Rata-rata Lama Sekolah	9,1	Tahun	9,3	9,9			10,6			11,3	11,3	-	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI + Paket A	110,0	%	100,0	100,0			100,0			100,0	100,0	100,0	-
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs + Paket B	77,9	%	79,7	81,6			83,4			85,4	85,4	85,4	-
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK + Paket C	71,1	%	73,0	74,1			75,2			76,3	76,3	76,3	-
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI + Paket A	122,2	%	100,0	100,0			100,0			100,0	100,0	100,0	-
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs + Paket B	99,1	%	99,3	99,4			99,5			99,6	99,6	99,6	-
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK + Paket C	99,0	%	99,1	99,2			99,3			99,4	99,4	99,4	-
		Angka kelulusan SD/MI	97,1	%	97,2	97,2			97,3			97,3	97,3	97,3	-
		Angka kelulusan SMP/MTs	99,0	%	99,1	99,1			99,2			99,2	99,2	99,2	-
		Angka kelulusan SMA/MA	99,1	%	99,1	99,2			99,2			99,3	99,3	99,3	-

		Persentase ruang kelas kondisi baik jenjang pendidikan SD/MI	79,3	%	79,4		79,5		79,6		79,7		79,7	-	
		Persentase ruang kelas kondisi baik jenjang pendidikan SMP/MTs	86,4	%	86,5		86,6		86,7		86,7		86,7	-	
		Persentase ruang kelas kondisi baik jenjang pendidikan SMA/MA	94,4	%	94,4		94,5		94,6		94,6		94,6	-	
		Jumlah penambahan sekolah yang menyediakan pendidikan inklusi											-	-	
		SD/MI	NA	Unit	1,0		1,0		1,0		1,0		1,0	-	
		SMP/MTs	NA	Unit	2,0		1,0		1,0		1,0		1,0	-	
		SMA/SMK/MA	NA	Unit	4,0		1,0		1,0		1,0		1,0	-	
1.01.1.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase peningkatan akses pendidikan Dasar yang berkualitas	100,0	%	100,0	4.710,8	100,0	10.171,4					-	-	Dinas Pendidikan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Kelulusan SD/MI	100,0	%	100,0		100,0						-	-	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	110,0	%							100,0	9.089,6	100,0	9.089,6	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	77,9	%							85,4		85,4	-	
		Angka kelulusan SD/MI	97,1	%							97,3		97,3	-	
		Angka kelulusan SMP/MTs	99,0	%							99,2		99,2	-	
1.01.1.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar	Jumlah peserta didik sekolah dasar berprestasi	57,0	Anak					60,0	8.732,5			-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka putus sekolah	0,1	%					0,7	-	-	-	-	-	

		SD/MI													
		Angka melanjutkan ke SMP/MTs	100,0	%				100,0	-	-	-	-	-		
		Rasio siswa / guru SD/MI	16,0	Rasio				17,0	-	-	-	-	-		
		Rasio siswa / kelas SD/MI	26,0	Rasio				32,0	-	-	-	-	-		
		Sekolah SD/MI ruang kelas baik (%)	77,3	%				75,6	-	-	-	-	-		
		Jumlah peserta didik SMP/MTs berprestasi	42,0	Anak				57,0	-	-	-	-	-		
		Angka putus sekolah SMP/MTs	0,2	%				0,2	-	-	-	-	-		
		Angka melanjutkan ke SMA/MA dan SMK	100,0	%				100,0	-	-	-	-	-		
		Rasio siswa / guru SMP/MTs	14,0	Rasio				13,0	-	-	-	-	-		
		Rasio siswa / kelas SMP/MTs	30,0	Rasio				36,0	-	-	-	-	-		
		Sekolah SMP/MTs ruang kelas baik (%)	83,9	%				86,7	-	-	-	-	-		
1.01.1.01.01.17	Program Pendidikan Menengah	Persentase peningkatan akses pendidikan menengah yang berkualitas	100,0	%	100,0	3.175,9	100,0	12.167,3	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Angka Kelulusan SMP/MTs	99,0	%	100,0		100,0		-	-	-	-	-		
		Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	99,1	%	100,0		100,0		-	-	-	-	-		
1.01.1.01.01.18	Program Pendidikan Non Formal	Jumlah lembaga penyelenggara Pendidikan Khusus (Inklusi)	3,0	sekolah	3,0	495,7	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan	
1.01.1.01.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)	100,0	% SD	100,0	86,7							-	Dinas Pendidikan	
			77,9	% SMP	77,9								-		
			71,9	% SMA	71,9								-		

1.01.1.01.01.23	Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan	Jumlah siswa yang mengikuti pondok romadhon	750,0	siswa	750,0	152,5	900,0	1.952,8					-	-	Dinas Pendidikan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.01.24	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Persentase siswa penerima BOS	100,0	%	-	-	-	-	100,0	20.254,1	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.01.32	Program Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Dasar	Angka kelulusan SD/MI	97,1	%	-	-	-	-	97,3	5.438,0	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka kelulusan SMP/MTs	99,0	%	-	-	-	-	99,2		-	-	-	-	
1.01.1.01.01.32	Program Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	101,0	%	-	-	100,0	615,4					-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka kelulusan SD/MI	97,1	%							97,3	5.660,5	97,3	5.660,5	
		Angka kelulusan SMP/MTs	99,0	%								99,2		99,2	
1.01.1.01.01.34	Program Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	101,0	%	100,0	805,3	-	-					-	-	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.34	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	101,0	%	-	-	100,0	806,0					-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.01.35	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	101,0	%	100,0	345,4	1,0	351,7					-	-	Dinas Pendidikan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.01.36	Program Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP & SMA	77,9	% SMP	77,9	3.196,6			-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			71,9	% SMA	71,9				-	-	-	-	-	-	
1.01.1.01.01.36	Program Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP & SMA	77,9	% SMP			78,0	2.493,9			-	-	-	-	Dinas Pendidikan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			71,9	% SMA			71,9				-	-	-	-	

1.01.1.01.01.38	Program Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP & SMA	77,9	% SMP	77,9	2.060,8			-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan
			71,9	% SMA	71,9			-	-	-	-	-	-	-	
1.01.1.01.01.38	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP & SMA	77,9	% SMP			78,0	2.197,7	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			71,9	% SMA			71,9		-	-	-	-	-	-	
1.01.1.01.01.39	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP & SMA	77,9	% SMP	77,9	1.506,3	78,0	1.399,7	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			71,9	% SMA	71,9		71,9		-	-	-	-	-	-	
1.01.1.01.01.40	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Sekolah Dasar	Terpenuhinya Sekolah Adiwiyata	100,0	%	100,0	990,0	100,0	1.089,0					-	-	Dinas Pendidikan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.01.40	Program Sekolah Berwawasan Lingkungan	Terpenuhinya Sekolah Adiwiyata	100,0	%	100,0	125,0	100,0	137,5					-	-	Dinas Pendidikan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah pendidikan dasar yang berprestasi dalam adiwiyata tingkat provinsi/nasional	69,0	sekolah						70,0	1.319,8	72,0	1.495,0	72,0	1.495,0
1.01.1.01.01.41	Program Manajemen Pelayanan Mutu Pendidikan dan Pengelolaan Data Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)	1,1	% SD	-	-	100,0	898,8	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			0,8	% SMP	-	-	78,0		-	-	-	-	-	-	
			0,7	%SMA	-	-	71,9		-	-	-	-	-	-	
		Jumlah jenis pelaporan data pokok pendidikan	4,0	jenis						4,0	618,5	4,0	643,8	4,0	643,8
1.01.1.01.01.42	Program Pendidikan Masyarakat	Jumlah lembaga penyelenggara Pendidikan Khusus (Inklusi)	3,0	lembaga			3,0	467,5					-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1.01.1.01.01.43	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	110,0	%	100,0	625,5	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase siswa penerima BOS	100,0	%							100,0	21.082,5	100,0	21.082,5
	Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Kualifikasi Guru SD/MI menurut Ijazah ≥ D4/S1	86,7	%	86,9		87,2		87,4		87,6		87,6	-
		Persentase Kualifikasi Guru SMP/MTs menurut Ijazah ≥ D4/S1	93,1	%	94,2		95,3		96,5		97,6		97,6	-
		Persentase Kualifikasi Guru SMA/MA menurut Ijazah ≥ D4/S1	94,1	%	96,8		97,4		98,1		98,7		98,7	-
		Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SD/MI bersertifikat pendidik	55,4	%	55,4		55,4		55,4		55,4		55,4	-
		Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMP/MTs bersertifikat pendidik	50,2	%	50,2		50,2		50,2		50,2		50,2	-
		Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMA/MA/SMK bersertifikat pendidik	45,6	%	45,6		45,6		45,6		45,6		45,6	-
1.01.1.01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik yang berkualitas (sertifikasi, S-1, meraih prestasi regional dan nasional)	80,0	%	80,0	877,5	80,0	1.571,3					-	Dinas Pendidikan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		Jumlah guru bersertifikat pendidik	2.259,0	Guru						5.651,6	1.092,0	5.882,7	1.092,0	5.882,7	
		Jumlah guru yang berprestasi	24,0	Guru					9,0		9,0		9,0	-	
1.01.1.01.01.30	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar	Terpenuhinya Administrasi Perkantoran SD	12,0	Bulan	12,0	427,7			-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.30	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekolah Dasar	Terpenuhinya Administrasi Perkantoran SD	12,0	Bulan			12,0	421,9	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.01.31	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah	Terpenuhinya Administrasi Perkantoran Sekolah Menengah	12,0	Bulan	12,0	1.662,0			-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.31	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekolah Menengah	Terpenuhinya Administrasi Perkantoran Sekolah Menengah	12,0	Bulan			12,0	1.402,9	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.01.33	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	Jumlah guru SD yang telah memiliki kualifikasi D4/S1	84,4	%	86,7	85,1			-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.33	Program Peningkatan Mutu Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	Jumlah guru SD yang telah memiliki kualifikasi D4/S1	84,4	%			86,8	81,4	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.01.37	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah	Jumlah guru SMP dan SMA yang telah memiliki kualifikasi D4/S1	93,1	% SMP	93,1	272,4			-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan
			94,1	% SMA	94,1					-	-	-	-	-	
1.01.1.01.01.37	Program Peningkatan Mutu Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah	Jumlah guru SMP dan SMA yang telah memiliki kualifikasi D4/S1	93,1	% SMP			93,1	245,1	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			94,1	% SMA			94,1			-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	

	Misi 2 : Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat												-	-	
	Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk membentuk kemandirian masyarakat dalam berperilaku dan hidup sehat	Indeks kesehatan	69,9	Indeks	70,0		70,1		70,3		70,4	70,4	-		
	Sasaran 1 : Meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak	Angka kematian ibu melahirkan	1,2	per 1.000 Kelahiran	1,2		1,2		1,1		1,1	1,1	-		
Angka kematian bayi		10,2	per 1.000 Kelahiran	9,3		8,5		7,7		7,0	7,0	-			
Angka balita gizi buruk per satuan balita		2,3	per 1.000 balita	2,1		2,0		1,8		1,7	1,7	-			
1.02.1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	80,0	%	90,0	851,6	90,0	2.726,0	100,0	2.367,6	100,0	2.604,4	100,0	2.604,4	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak	80,0	%	90,0	3.281,8	90,0	273,0	100,0	972,6	100,0	1.069,8	100,0	1.069,8	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Proporsi personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	80,0	%	90,0	85,2	90,0	80,0	90,0	57,8	90,0	63,6	90,0	63,6	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu	100,0	%	100,0	72,5	100,0	76,0	100,0	177,2	100,0	194,9	100,0	194,9	Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Tercapainya mutu pelayanan sesuai standart	80,0	%	80,0	16.289,2	80,0	1.116,5	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	
		Angka kematian ibu (AKI)	1,2	per 1.000 lahir hidup						-	-	2,4	10.227,2	2,4	10.227,2
		Angka kematian bayi (AKB)	10,2	per 1.000 lahir hidup						-	-	7,0		7,0	-
1.02.1.02.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan	78,0	%	78,0	857,1	78,0	1.346,3	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	
1.02.1.02.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Meningkatnya Perbaikan Gizi Masyarakat	78,0	%	78,0	317,5	78,0	570,0	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	
1.02.1.02.01.29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Meningkatnya pelayanan kesehatan anak balita	80,0	%	80,0	44,0	80,0	45,0	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	
1.02.1.02.01.30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Meningkatnya pelayanan kesehatan lansia	80,0	%	80,0	45,0	80,0	55,0	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	
1.02.1.02.01.33	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Meningkatnya pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	80,0	%	80,0	1.850,7	80,0	2.471,4	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	
1.02.1.02.01.35	Program Kesehatan Masyarakat	Angka kematian ibu (AKI)	1,2	per 1.000 lahir hidup					2,5	11.515,8	-	-	-	Dinas Kesehatan	
		Angka kematian bayi (AKB)	10,2	per 1.000 lahir hidup					7,7						
	Sasaran 2 : Meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	Angka Harapan Hidup (AHH)	66,6	Tahun	66,9		67,3		67,6		67,9		67,9		
Angka prevalensi penyakit TBC		341,9	per 100.000 penduduk	309,4		280,0		253,4		229,3		229,3			
Angka prevalensi penyakit DBD		116,5	per 100.000 penduduk	111,3		106,3		101,5		96,9		96,9			

		Rasio puskesmas, poliklinik, puskesmas dan rumah bersalin per satuan penduduk	25,7	per 100.000 penduduk	26,3		27,0		27,6		28,3	-	28,3	-	
		Rasio dokter umum per satuan penduduk	26,2	per 100.000 penduduk	27,1		28,0		28,9		29,9	-	29,9	-	
		Indeks kepuasan layanan masyarakat untuk layanan puskesmas	79,5	Indeks	79,7		80,0		80,3		80,6	-	80,6	-	
1.02.1.02.01.09	Program Peningkatan Pengelolaan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial	Meningkatnya pengelolaan penyaluran hibah dan bantuan Sosial	80,0	%	80,0	10,0	80,0	12,0				-	-	-	Dinas Kesehatan
		Jumlah kegiatan pengelolaan penyaluran bantuan hibah dan bantuan sosial	1,0	Kegiatan					1,0	6,4		-	-	-	
1.02.1.02.01.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	80,0	%	80,0	4.181,7			-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.15	Program Penyediaan dan Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman	Meningkatnya Penyediaan dan Pengawasan Obat, makanan dan minuman	80,0	%			80,0	6.749,6	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatnya Pengawasan Obat dan Makanan	80,0	%	80,0	97,5	80,0	99,0	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.18	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Tercapainya Pengembangan Obat Asli Indonesia	80,0	%	80,0	20,0	80,0	22,0	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Meningkatnya pelayanan pencegahan dan penanggulanga penyakit menular	70,0	%	70,0	952,6	70,0	942,8	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan

		Persentase penyakit menular potensial yang dapat dicegah dan dikendalikan	100,0	%	-	-	-	-			100,0	1.905,3	100,0	1.905,3	
		Persentase penyakit tidak menular yang dapat dicegah dan dikendalikan	100,0	%	-	-	-	-			100,0		100,0	-	
1.02.1.02.01.22	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase penyakit menular potensial yang dapat dicegah dan dikendalikan	100,0	%	-	-	-	100,0	1.750,3			-	-	-	Dinas Kesehatan
		Persentase penyakit tidak menular yang dapat dicegah dan dikendalikan	100,0	%	-	-	-	100,0				-	-	-	
1.02.1.02.01.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan	75,0	%	75,0	207,5	75,0	868,5	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	80,0	%	80,0	1.575,7	80,0	1.576,0	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	80,0	%	80,0	77,5	80,0	79,5	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.34	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Meningkatnya Pembinaan Lingkungan Sosial	80,0	%	569,0		80,0	1.207,0	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Persentase sarana prasarana puskesmas yang laik		%					80,0	2.805,9	90,0	2.920,7	90,0	2.920,7	
1.02.1.02.01.36	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		%	80,0	3.026,9	80,0	3.340,0					-	-	Dinas Kesehatan
		Persentase peningkatan kualitas mahasiswa		%					90,0	3.553,9	90,0	3.699,2	90,0	3.699,2	

1.02.1.02.01.37	Program Penyehatan Lingkungan	Meningkatnya Penyehatan Lingkungan	80,0	%			80,0	3.200,0					-	-	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.39	Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Pengadaan / Perbaikan sarana dan prasarana Kesehatan	Meningkatnya Kapasitas SDM dan Pengadaan / Perbaikan sarana dan prasarana Kesehatan	80,0	%	-	-	80,0	4.049,7	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.40	Program Pelayanan & Sumberdaya Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	5,0	%	-	-			20,0	19.780,8			-	-	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.40	Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Khusus	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar dan Khusus	80,0	%	-	-	80,0	12.687,8		-			-	-	Dinas Kesehatan
		Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	5,0	%	-	-				-	25,0	20.589,8	25,0	20.589,8	
													-	-	
1.02.1.02.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terbayarnya gaji tenaga kontrak / honorer di RSUD dr Soedarsono selama masa kontrak	85,3	%			100,0	606,1	100,0	606,1	100,0	606,1	100,0	606,1	RSUD dr Soedarsono
1.02.1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan ambulan gratis	-	%					100,0	4.999,2	100,0	5.499,2	100,0	5.499,2	RSUD dr Soedarsono
		persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi klasifikasi rumah sakit kelas C	100,0	%	100,0	485,4	100,0	8.085,0	100,0		100,0		100,0	-	
1.02.1.02.02.34	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase ketersediaan peralatan kedokteran rumah sakit kelas C yang sesuai dengan standar kesehatan	100,0	%	100,0	11.578,0	100,0	104.833,8	100,0	8.824,6	100,0	81.859,9	100,0	81.859,9	RSUD dr Soedarsono
1.02.1.02.02.36	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase ketercapaian indikator kepuasan pasien dalam menerima	-	%	75,0	89.830,0	87,5	104.833,4					-	-	RSUD dr Soedarsono

		pelayanan												
		Jumlah kejadian kecelakaan kerja bagi tenaga kerja rumah sakit	-	Kejadian	12,0	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		Persentas epasien yang dirujuk ke rumah sakit lain	-	%	2,0	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase peningkatan pasien rawat jalan	11,2	%	76,3	21,9	-	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase limbah padat yang diolah	100,0	%	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase hasil pemeriksaan limbah cair yang sesuai standart	100,0	%	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sales Growth Rate (SGR)	11,9	%	52,1	70,0							-	-
		Persentase penurunan kasus keperawatan	-	%	NA	20,0							-	-
		Persentase ketercapaian indikator mutu pelayanan keperawatan	-	%	69,2	76,9	84,6	88.806,6	84,8			84,8	-	-
		Persentase karyawan rumah sakit yang mengikuti pendidikan / pelatihan minimal 20 jam	14,4	%	24,3	50,3	68,8		23,1			23,1	-	-
		Persentase jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	100,0	%	100,0	100,0	100,0		100,0			100,0	-	-
		Nilai SAKIP RSUD	-	Skor	NA	B		B		BB		BB	-	-
		Persentase keterpenuhan kebutuhan	85,3	%	81,8	86,5	88,8		91,1			91,1	-	-

		administrasi perkantoran													
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak	99,8	%	87,8		89,8		91,8		93,9		93,9	-	
		Cost Recovery Rate (CRR)	125,2	%	-		-		145,3		93,9		93,9	-	
		Persentase indikator pelayanan rumah sakit yang tercapai (BOR, BTO, Av Los, TOI, GDR, NDR)	83,3	%	-		-		83,3		83,3		83,3	-	
													-	-	
	Sasaran 3 : Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan	Persentase penduduk yang memiliki BPJS kesehatan	79,3	%	80,1		80,9		81,7		100,0		100,0	-	
1.02.1.02.01.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	80,0	%	80,0	5.155,0	80,0	5.211,0					-	-	Dinas Kesehatan
													-	-	
	Misi 3 : Menciptakan kesempatan kerja dan kualitas iklim usaha yang kondusif												-	-	
	Tujuan : Meningkatkan produktivitas dan akses masyarakat terhadap penghidupan yang layak untuk membangun keberdayaan sosial dan ekonomi	Tingkat Kemiskinan	7,5	%	7,5		7,2		7,1		6,9		6,9	-	
		Tingkat pengangguran terbuka	6,1	%	6,06		6,0		5,9		5,8		5,8	-	

		Indeks Gini	0,3	Indeks	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3	-		
	Sasaran 1 : Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat kesempatan kerja	93,9	%	93,9		94,0		94,0		94,0		94,0	-		
2.01.2.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	80,0	%	-	-	90,0	307,4	95,0	262,9	95,0	249,9	95,0	249,9	Dinas Tenaga Kerja	
2.01.2.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak	80,0	%	-	-	80,0	45,0	90,0	217,6	90,0	317,5	90,0	317,5	Dinas Tenaga Kerja	
2.01.2.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Proporsi personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	80,0	%	-	-	80,0	23,8	90,0	15.414,0	90,0	16,2	90,0	16,2	Dinas Tenaga Kerja	
2.01.2.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu	100,0	%	-	-	90,0	75,0	95,0	26,6	95,0	68,2	95,0	68,2	Dinas Tenaga Kerja	
2.01.2.01.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah pertumbuhan dan penambahan wirausaha baru	-	WUB			55,0	231,0		746,3		2.682,8	-	2.682,8	Dinsosnaker trans / Dinas Tenaga kerja	
		Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	100,0	%	3,0	193,0				-		-	-	-		
		Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat ketrampilan	-	%	-	-	-	-	-	95,0	-	95,0	-	95,0	-	
		Persentase pencari kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan	-	%	-	-	-	-	-	-	-	70,0	-	70,0	-	

2.01.2.01.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya Kesempatan Kerja	100,0	%	100,0	486,8	20,0	870,8					-	-	Dinsosnaker trans / Dinas Tenaga kerja
		Persentase pencari kerja yang berhasil mendapatkan informasi tentang lapangan kerja melalui informasi pasar kerja dan bursa kerja	-	%	-	-	-	-	-	-	91,0	1.576,6	91,0	1.576,6	
2.01.2.01.01.16	Program Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja	Persentase pencari kerja yang berhasil mendapatkan informasi tentang lapangan kerja melalui informasi pasar kerja dan bursa kerja	-	%	-	-	-	-	89,0	648,9	-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja
2.01.2.01.01.18	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Meningkatnya pembinaan lingkungan sosial	-	%	85,0	596,7	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinsosnaker trans
2.01.2.01.01.19	Program Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan Tenaga Kerja	Meningkatnya Pendidikan dan Ketrampilan Tenaga Kerja	100,0	%	100,0	138,9	100,0	718,0	-	-	-	-	-	-	Dinsosnaker trans / Dinas Tenaga kerja
3.08.2.01.01.17	Program Transmigrasi regional	Meningkatnya Transmigrasi regional	10,0	KK	10,0	355,0							-	-	Dinsosnaker trans / Dinas Tenaga kerja
		Jumlah transmigran yang ditempatkan	-	KK				377,6	5,0	114,0	5,0	405,0	5,0	405,0	
													-	-	
	Sasaran 2 : Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis	Penurunan perkara perselisihan hubungan industrial	11,0	Kasus	10,0		10,0		9,0		8,0		8,0	-	
2.01.2.01.01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga	80,0	%	80,0	362,4	80,0	462,9	-	-	-	-	-	-	Dinsosnaker trans / Dinas Tenaga kerja

		Ketenagakerjaan													
		Persentase perselisihan hubungan industrial yang ditangani	-	%	-	-	-	-	80,0	381,0	80,0	909,3	80,0	909,3	
		Persentase perusahaan sesuai UMR	-	%	-	-	-	-	30,6	-	60,0	-	60,0	-	
		Persentase perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	-	%	-	-	-	-	35,0	-	70,0	-	70,0	-	
													-	-	
	Sasaran 3 : Menurunnya angka kemiskinan	Indeks kedalaman kemiskinan	1,2	Indeks	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	-	
		Indeks keparahan kemiskinan	0,3	Indeks	0,3	-									
1.06.1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	80,0	%	90,0	451,6	90,0	417,2	90,0	299,9	90,0	312,2	90,0	312,2	Dinsosnaker trans / Dinas Sosial
1.06.1.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak	80,0	%	90,0	203,5	90,0	107,0	90,0	1.065,5	90,0	425,0	90,0	425,0	Dinsosnaker trans / Dinas Sosial
1.06.1.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Proporsi personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	80,0	%	90,0	7,5	90,0	28,4	90,0	44,0	90,0	45,8	90,0	45,8	Dinsosnaker trans / Dinas Sosial
1.06.1.06.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu	100,0	%	100,0	78,6	100,0	75,0	100,0	33,7	100,0	35,1	100,0	35,1	Dinsosnaker trans / Dinas Sosial

1.06.1.06.01.23	Program Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial	Meningkatnya pembinaan penyandang penyakit sosial	100,0	%	100,0	79,8	100,0	110,0					-	-	Dinsosnaker trans / Dinas Sosial	
		Persentase kelompok PMKS yang mampu menjalankan usaha ekonomi		%							9,5	1.098,0	9,5	1.098,0		
		Persentase kelompok PMKS yang bisa menjalankan aktivitas sosialnya		%							46,0		46,0			
1.06.1.06.01.24	Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	100,0	%	100,0	470,5	100,0	1.208,0					-	-	Dinsosnaker trans / Dinas Sosial	
		Persentase penduduk miskin yang mendapat bantuan program PKH yang mampu menjalankan usaha ekonomi		%							1,7	895,8	1,7	895,8		
		Persentase korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan pangan		%							51,7					
1.06.1.06.01.25	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penduduk miskin yang mendapat bantuan PKH yang mampu menjalankan usaha ekonomi		%	-	-	-	-	1,2	899,8	66,9	936,6	66,9	936,6	Dinas Sosial	
		Persentase korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan pangan		%	-	-	-	-	39,6		39,4		39,4	-		
		Persentase korban bencana sosial yang tertangani		%	-	-	-	-	-		-		-	-		
1.06.1.06.01.26	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif		%	-	-	-	61,9	1.214,4	59,4	1.262,0	59,4	1.262,0	Dinas Sosial		

	dan Penanganan Fakir Miskin	Persentase fakir miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar		%	-	-	-	42,6				-	-	
1.06.1.06.01.26	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Sosial	Persentase penurunan PMKS		%						4,07	898,1	4,07	898,1	Dinas Sosial
1.11.1.11.01.20	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Sosial	Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) yang mendapatkan Raskin	9.437,0	RTSPM	9.437,0	494,8						-	-	BPPKB
												-	-	
	Sasaran 4 : Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan jumlah penduduk	5,0	%	4,9	4,9	4,9	4,9	4,8			4,8	-	
1.06.1.06.01.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	100,0	%	100,0	204,2	100,0	308,8				-	-	Dinsosnaker trans / Dinas Sosial
2.07.1.06.01.30	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga/kelompok yang memperoleh program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial		%						0,5	67,0	0,5	67,0	Dinsosnaker trans / Dinas Sosial
1.06.1.06.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase kelompok PMKS yang mampu menjalankan usaha ekonomi (anjak, WRSE, lanjut usia potensial, dan penyandang disabilitas)		%	-	-	-	9,0	850,3	0,5	885,1	0,5	885,1	Dinas Sosial

		Persentase kelompok PMKS yang menjalankan aktifitas sosialnya (anjak, WRSE, korban trackfiking, anak terlantar, anak yatim, dhuafa, ABH, lanjut usia potensial		%	-	-	-	-	45,6	-	2,1	-	2,1	-	
													-	-	
	Sasaran 5 : Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam pembangunan	Prosentase partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah	51,1	%	51,2		51,3		51,4		51,5		51,5	-	
		Indeks pembangunan gender	96,3	Indeks	96,4		96,5		96,6		96,7		96,7	-	
		Indeks pemberdayaan gender	53,5	Indeks	54,2		54,8		55,5		56,2		56,2	-	
		Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak per satuan rumah tangga	13,5	per 10.000 rumah tangga	12,8		12,1		11,4		10,8		10,8	-	
2.02.2.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	80,0	%	90,0	424,3	90,0	525,0	90,0	316,9	90,0	251,0	90,0	251,0	BPPKB / DP3AKB
2.02.2.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak	80,0	%	90,0	135,3	90,0	355,0	90,0	487,1	90,0	232,2	90,0	232,2	BPPKB / DP3AKB
2.02.2.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Proporsi personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	80,0	%	90,0	6,1	90,0	32,0	90,0	32,0	90,0	22,0	90,0	22,0	BPPKB / DP3AKB

2.02.2.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu	100,0	%	100,0	75,0	100,0	78,0	100,0	44,6	100,0	49,5	100,0	49,5	BPPKB / DP3AKB
2.02.2.02.01.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah jenis data dan informasi perempuan yang tersedia	5,0	Jenis data	5,0	7,5							-	-	BPPKB / DP3AKB
2.02.2.02.01.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase pengaduan korban KDRT dan kasus perdagangan perempuan dan anak (trafficking) yang tertangani	100,0	%	80,0	264,4	100,0	254,7					-	-	BPPKB / DP3AKB
		Jumlah prestasi lomba yang diikuti	2,0	Prestasi	2,0		2,0	-	-	-	-	-	-	-	
2.02.2.02.01.17	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan	51,1	%	-	-	-	-	51,4	749,4		-	-	-	DP3AKB
		Persentase partisipasi perempuan di dunia usaha	-	%	-	-	-	-	14,5	-	-	-	-	-	
		Persentase pengaduan korban kekerasan pada perempuan yang tertangani	100,0	%	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	
2.02.2.02.01.18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase perempuan yg bekerja	54,0	%	54,0	124,9		72,4				667,3	-	667,3	BPPKB / DP3AKB
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	51,1	%	51,2		51,3	-	-	-	51,5		51,5	-	
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	3,0	%	2,9			-	-	-				-	-

		Persentase partisipasi perempuan di dunia usaha	45,0	%	45,0		14,5	-	-	-	14,6		14,6	-		
		Persentase pengaduan korban kekerasan pada perempuan yang tertangani	100,0	%	-	-	-	-	-	-	100,0		100,0	-		
2.02.2.02.01.19	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani	-	%	-	-	-	-	-	-	100,0	649,0	100,0	649,0		
		Persentase lembaga/organisasi yang melibatkan Forum Anak	-	%	-	-	-	-	-	-	90,0		90,0	-		
		Persentase forum anak yang aktif	-	%	-	-	-	-	-	-	100,0		100,0	-		
		Persentase perangkat daerah yang melakukan pemenuhan hak anak	-	%	-	-	-	-	-	-	100,0		100,0	-		
2.02.2.02.01.22	Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Perlindungan Anak (KPA)	Kota Pasuruan masuk dalam kategori Kota Layak Anak	100,0	%	100,0	142,1	100,0	120,0					-	-	BPPKB / DP3AKB	
		Jumlah media penyebaran informasi program	4,0	Media	4,0		3,0							-	-	
2.02.2.02.01.23	Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (PUHA)	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani	-	%			100,0	176,0	100,0	889,2				-	-	DP3AKB
		Persentase lembaga/organisasi yang melibatkan Forum Anak dalam program/kegiatan	-	%			80,0		90,0					-	-	
		Persentase Forum Anak yang aktif	-	%			100,0		100,0					-	-	
		Persentase Perangkat Daerah yang melakukan pemenuhan hak anak	-	%			80,0		90,0					-	-	

													-	-	
	Sasaran 6 : Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana (KB)	Total fertility rate (TFR)	2,1	%	2,1		2,1		2,1		2,1		2,1	-	
2.08.2.02.01.15	Program Keluarga Berencana	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR/Contraceptive Prevalence Rate)	80,1	%	76,8	132,5	77,0	270,3				275,0	-	275,0	BPPKB / DP3AKB
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan	23,3	Tahun	21,0		21,0						-	-	
		Jumlah peserta KB baru	4.425,0	Peserta					4.434,0	1.710,6	4.480,0	1.421,2	4.480,0	1.421,2	
		Persentase kader yang mendapatkan sarana dan prasarana	-	%					20,1		20,1		20,1	-	
		Persentase fasilitas kesehatan (Faskes) KB yang mendapatkan sarana dan prasarana	-	%					18,6		20,9		20,9	-	
2.08.2.02.01.17	Program Pelayanan Kontrasepsi	Jumlah Peserta KB Baru	4.425,0	Peserta	4.014,0	37,5	4.100,0	25,0	-	-	-	-	-	-	BPPKB / DP3AKB
2.08.2.02.01.18	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	1. Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	-	%	33,0	350,0	6,0	275,0	-	-	-	-	-	-	BPPKB / DP3AKB
		2. Jumlah UPPKS yang aktif	-	Kelompok	81,0		83,0						-	-	
		Persentase kader PPKBK dan sub PPKBK yang aktif dalam pembinaan pelayanan KB/KR yang mandiri			-	-	-	-	100,0	571,7	100,0	631,2	100,0	631,2	

		Persentase Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif			-	-	-	-	73,2		75,3		75,3	-		
2.08.2.02.01.20	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konsultasi KRR	Frekuensi penyebaran informasi program dengan Mobil Penerangan KB	17,0	Kali	7,0	213,5	10,0	87,4	-	-	-	-	-	-	BPPKB / DP3AKB	
		Jumlah Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif	19,0	Kelompok	19,0		20,0			-	-	-	-	-		
2.08.2.02.01.23	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Jumlah kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang aktif	-	Kelompok	85,0	262,5	90,0	177,0	-	-	-	-	-	-	BPPKB / DP3AKB	
		Jumlah kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang aktif	-	Kelompok	20,0		20,0			-	-	-	-	-		
		Jumlah kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif	-	Kelompok	42,0		43,0			-	-	-	-	-		
		Jumlah kelompok tribina yang aktif	-	Kelompok			-	-			-	-	116,0	280,0	116,0	280,0
		Persentase mitra program yang aktif	-	%			-	-			-	-	69,0		69,0	-
		Jumlah kelompok UPPKS yang aktif	-	Kelompok			-	-			-	-	80,0		80,0	-
2.08.2.02.01.25	Program Peningkatan Mutu Pelayanan KB	1. Persentase kader yang mendapatkan sarana dan prasarana	-	%	53,0	725,3	19,8	884,9	-	-	-	-	-	-	BPPKB / DP3AKB	
		2. Persentase fasilitas kesehatan (faskes) KB yang mendapatkan sarana dan prasarana	-	%	-		18,6			-	-	-	-	-	-	
2.08.2.02.01.26	Program Peningkatan Ketahanan Keluarga	Jumlah kelompok tiribina yang aktif	-	Kelompok	-	-	-	-	99,0	1.025,9	-	-	-	-	DP3AKB	

		Persentase mitra program yang aktif	-	%	-	-	-	-	60,0		-	-	-	-	
		Jumlah kelompok UPPKS yang aktif	-	Kelompok	-	-	-	-	69,0		-	-	-	-	
2.08.2.02.01.27	Program Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kelurahan berprestasi tingkat provinsi /nasional	-	Kelurahan	-	-	-	-	1,0	410,6	-	-	-	-	DP3AKB
2.07.2.02.01.18	Program Peningkatan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan	Jumlah kelurahan berprestasi tingkat provinsi /nasional	-	Kelurahan	-	-	1,0	756,8	-	-	-	-	-	-	DP3AKB
		Persentase mitra program yang aktif	-	%	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	
2.07.2.02.01.27	Program Peningkatan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan	Jumlah kelurahan berprestasi tingkat provinsi /nasional	-	Kelurahan	-	-	-	-	-	-	1,0	1.070,2	1,0	1.070,2	DP3AKB
													-	-	
	Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas peran pemuda, dan prestasi olahraga	Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	8,0	Pemuda	11,0	12,0	15,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	-	
		Jumlah atlit yang berprestasi di tingkat provinsi	22,0	Atlit	23,0	25,0	27,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	-	
		Jumlah atlit yang berprestasi di tingkat nasional	4,0	Atlit	5,0	8,0	7,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	-	
2.13.2.13.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	80,0	%	90,0	639,1	90,0	545,8	90,0	262,1	90,0	272,8	90,0	272,8	Dinas Pemuda, Olah raga dan Kebudayaan / Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

2.13.2.13.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak	80,0	%	90,0	475,0	90,0	512,8	90,0	408,9	90,0	425,7	90,0	425,7	Dinas Pemuda, Olah raga dan Kebudayaan / Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
2.13.2.13.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Proporsi personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	80,0	%	90,0	14,4	90,0	30,0	90,0	16,2	90,0	16,9	90,0	16,9	Dinas Pemuda, Olah raga dan Kebudayaan / Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
2.13.2.13.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu	100,0	%	100,0	75,0	100,0	75,0	100,0	21,0	100,0	21,9	100,0	21,9	Dinas Pemuda, Olah raga dan Kebudayaan / Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
2.13.2.13.01.15	Program Peningkatan Pengelolaan Penyaluran Hibah dan Bantuan	Meningkatnya Pengelolaan Penyaluran Hibah dan Bantuan	100,0	%	100,0	16,5							-	-	Dinas Pemuda, Olah raga dan Kebudayaan	
2.13.2.13.01.16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan	100,0	%	100,0	219,0	100,0	1.325,0				100,0		100,0	-	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan / Dinas Pariwisata, pemuda dan Olah raga
		Persentase peningkatan keikutsertaan pemuda dalam kompetisi pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional	-	%					13,0	690,8		13,5	719,9	13,5	719,9	

		Persentase organisasi kepemudaan yang terdaftar	-	%					62,7		68,0		68,0	-	
2.13.2.13.01.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Meningkatnya Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	100,0	%	100,0	1.255,0	100,0	1.172,5			100,0		100,0	-	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan / Dinas Pariwisata, pemuda dan Olah raga
		Persentase cabang olah raga yang mengikutsertakan atlitnya dalam kompetisi tingkat provinsi dan nasional	-	%					53,3	1.472,4	56,7	1.532,6	56,7	1.532,6	
		Persentase kelurahan yang melakukan kegiatan olah raga aktif	-	%					32,0		41,0		41,0	-	
2.13.2.13.01.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olah Raga	100,0	%	100,0	374,3	100,0	1.338,5		100,0		100,0	-	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan / Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga	
		Jumlah sarpras olah raga dalam kondisi baik	-	Sarpras					5,0	1.530,3	6,0	1.592,9	6,0	1.592,9	
	Sasaran 8 : Meningkatnya nilai investasi dan jumlah izin yang diterbitkan	Pertumbuhan jumlah izin yang diterbitkan	10,1	%	10,1		10,4		10,7		11,0		11,0	-	
		Pertumbuhan nilai investasi	22,2	%	22,2		22,3		22,4		22,4		22,4	-	

2.122.12.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		%	100,0	490,0	90,0	476,3	90,0	253,0	90,0	330,5	90,0	330,5	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu/DPMP TSP
2.122.12.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak		%	80,0	260,0	90,0	252,0	90,0	380,0	90,0	605,0	90,0	605,0	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu/DPMP TSP
2.122.12.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan aparatur yang disiplin memakai atribut kedinasan		%	80,0	11,0	90,0	15,0	90,0	17,0	90,0	20,0	90,0	20,0	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu/DPMP TSP
2.122.12.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM		%	80,0	10,0	90,0	36,2	90,0	18,0	90,0	52,0	90,0	52,0	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu/DPMP TSP

2.122.12.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase tersusunnya laporan kinerja, keuangan, kepegawaian dan barang secara tepat waktu		%	90,0	75,0	90,0	75,0	90,0	33,0	90,0	52,0	90,0	52,0	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu/DPMP TSP
1.16.1.16.01.01.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Promosi dan Kerjasama Investasi	100,0	%	1,0	342,5	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu/DPMP TSP
1.16.1.16.01.01.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya citra daerah sebagai kota tujuan investasi	3,0	%	3,0	163,5	3,0	927,0	-	-	-	-	-	-	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu/DPMP TSP
2.12.2.12.01.16		Jumlah potensi daerah yang di promosikan		daerah	-	-	-	-	9,0	318,2	9,0	900,0	9,0	900,0	DPMP TSP
		Jumlah realisasi investasi (Rp milyar)		Milyar	-	-	-	-	403,2	-	-	-	-	-	DPMP TSP
1.16.1.16.01.01.17	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	Meningkatnya Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	1,0	%	1,0	59,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu/DPMP TSP

1.16.1.16.01.01.19	Program Pengembangan Informasi Pelayanan Perijinan	Meningkatnya Pengembangan Informasi Pelayanan Perijinan	1,0	%	1,0	87,5	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu/DPMP TSP
1.16.1.16.01.01.20	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	1,0	%	1,0	762,6	1,0	930,0	-	-	-	-	-	-	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu/DPMP TSP
2.12.2.12.01.25		Rata-rata -rata hari penyelesaian perijinan	5,0	Hari	-	-	-	-	-	-	5,0	790,0	5,0	790,0	DPMPTSP
		Persentase izin yang diselesaikan sesuai SOP	80,0	%	-	-	-	-	-	-	80,0	-	80,0	-	DPMPTSP
2.12.2.12.01.18	Program pengembangan data potensi investasi dan perijinan	Meningkatnya Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	100,0	%	-	-	100,0	439,5	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP
2.12.2.12.01.23		Prosentase peningkatan data yang dikelola		%	-	-	-	-	-	-	6,0	360,0	6,0	360,0	DPMPTSP
2.12.2.12.01.24	Program Pengembangan Informasi Pelayanan Perijinan dan pengaduan	Meningkatnya pengembangan informasi pelayanan perijinan	100,0	%	-	-	100,0	452,0	-	-	100,0	280,0	100,0	280,0	DPMPTSP
2.12.2.12.01.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah potensi daerah yang di promosikan		Potensi daerah	-	-	-	-	9,0	318,2	-	-	-	-	DPMPTSP
		Jumlah realisasi investasi (Rp milyar)		Milyar	-	-	-	-	403,2	-	-	-	-	-	DPMPTSP

2.12.2.12.01.23	Program Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	Persentase peningkatan data yang dikelola	-	%	-	-	-	-	64,2	243,5	-	-	-	-	DPMPTSP
		Jumlah pengguna data dan informasi perijinan dan penanaman modal	-	Orang	-	-	-	-	482,0	-	-	-	-	-	DPMPTSP
2.12.2.12.01.24	Program Penanganan Pengaduan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	-	%	-	-	-	-	100,0	121,8	-	-	-	-	DPMPTSP
2.12.2.12.01.25	Program Pelayanan Perijinan	Rata-rata lama hari penyelesaian perijinan	-	Hari	-	-	-	-	5,0	199,8	-	-	-	-	DPMPTSP
		Prosentase ijin yang diselesaikan	-	%	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	DPMPTSP
													-	-	
	Misi 4 : Meningkatkan pengembangan perdagangan jasa dan industri untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak												-	-	
	Tujuan : Mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial, yang didukung dengan pengembangan iklim usaha ekonomi kreatif	Pertumbuhan ekonomi	5,9	%	6,0		6,0		6,1		6,2		6,2	-	
	Sasaran 1 : Meningkatnya peran UMKM dan koperasi dalam perekonomian	Persentase pertumbuhan UKM	5,1	%	5,2		5,2		5,2		5,3		5,3	-	
		Persentase koperasi aktif	56,3	%	56,3		56,4		56,4		56,5		56,5	-	
													-	-	

2.11.2.11.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		%	-	-	90,0	369,9	90,0	370,0	90,0	305,0	90,0	305,0	DINKOP dan UM
2.11.2.11.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak		%	-	-	90,0	111,5	90,0	197,2	90,0	325,0	90,0	325,0	DINKOP dan UM
2.11.2.11.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM		%	-	-	90,0	23,8	90,0	24,0	90,0	15,0	90,0	15,0	DINKOP dan UM
2.11.2.11.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase tersusunnya laporan kinerja, keuangan, kepegawaian dan barang secara tepat waktu		%	-	-	90,0	75,0	90,0	37,3	90,0	51,0	90,0	51,0	DINKOP dan UM
2.11.2.11.01.20	Program Pengembangan Pemberdayaan UMKM	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha mikro		%	-	-	1,2	1.676,7	-	-	-	-	-	-	Dinkop dan UM
		Prosentase peningkatan omset usaha mikro ke usaha kecil		%	-	-	-	-	-	-	3,8	3.811,6	3,8	3.811,6	
2.11.2.11.01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi yang tepat fungsi		%	-	-	30,9	532,5	-	-	-	-	-	-	Dinkop dan UM
2.11.2.11.01.18	Program Pemberdayaan Koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi aktif		%	-	-	27,5	407,6	-	-	4,1	1.594,7	4,1	1.594,7	Dinkop dan UM
2.07.2.11.01.15	Program Peningkatan pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Persentase pemberdayaan ekonomi masyarakat		%	-	-	80,0	390,0	-	-	-	-	-	-	Dinkop dan UM
2.11.2.11.01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi	Prosentase pertumbuhan koperasi aktif		%	-	-	-	-	4,31	510,5	-	-	-	-	Dinkop dan UM
2.11.2.11.01.20	Program Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan usaha mikro baru		%	-	-	-	-	14,2	958,1	-	-	-	-	Dinkop dan UM

	Meningkatnya kinerja perdagangan	Pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB	5,5	%	-	-	5,7		5,8	-	6,0	-	6,0	-	
		Persentase pertumbuhan pedagang pasar tradisional	10,2	pedagan g	-	-	11,7		13,5	-	15,5	-	15,5	-	
		Penambahan lokasi PKL yang disediakan dan ditata	8,0	lokasi	-	-	1,0		1,0	-	1,0	-	1,0	-	
		Paritas daya beli (purchasing power parity)	664,3	Rp ribu	-	-	672,3		676,3	-	680,4	-	680,4	-	
3.06.3.06.1.01	Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		%	90,0	500,0	90,0	750,0	98,0	1.050,0	100,0	1.150,0	100,0	1.150,0	Disperindag
3.06.3.06.1.02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak		%	80,0	300,0	85,0	350,0	98,0	450,0	100,0	600,0	100,0	600,0	Disperindag
3.06.3.06.1.03	Peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan aparatur yang disiplin memakai atribut kedinasan		%	80,0	85,0	85,0	87,0	90,0	95,0	97,0	85,0	97,0	85,0	Disperindag
3.06.3.06.1.05	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM		%	70,0	10,0	70,0	10,0	85,0	40,0	90,0	50,0	90,0	50,0	Disperindag
3.06.3.06.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase tersusunnya laporan kinerja, keuangan, kepegawaian dan barang secara tepat waktu		%	90,0	75,0	90,0	85,0	98,0	35,0	100,0	70,0	100,0	70,0	Disperindag
1.15.1.15.01.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	80,0	%	80,0	600,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Disperindag

	Program Pengembangan Pemberdayaan UMKM	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha	21,0	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.15.1.15.01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi yang tepat fungsi	80,0	%	80,0	159,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskoperindag
1.15.1.15.01.19	Program Pemberdayaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	80,0	%	80,0	168,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskoperindag
2.06.1.15.01.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri	80,0	%	80,0	5.688,0	100,0	5.688,0	-	-	-	-	-	-	-	Diskoperindag/ Disperindag
		Persentase prasarana dan sarana pasar dalam kondisi baik	-	%	-	-	-	-	-	-	85,0	174631,99	85,0	174631,99	-	Disperindag
		Persentase PKL yang tertata	-	%	-	-	-	-	-	-	-	11,0	-	11,0	-	
3.06.3.06.01.22	Program Pengembangan Perdagangan Internasional	Persentase pertumbuhan nilai ekspor Kota Pasuruan	80,0	%	80,0	41,0	0,3	35,0	-	-	-	-	-	-	Diskoperindag/ Disperindag	
3.06.3.06.01.21	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri.	Persentase pertumbuhan peningkatan usaha perdagangan & jasa	100,0	%	80,0	1681,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskoperindag
		Prosentase peningkatan jumlah usaha perdagangan barang		%	-	-	0,1	2.500,0	-	-	-	-	-	-	-	Disperindag
		Jumlah omset IKM		Rp (Milyar)	-	-	-	-	-	-	157,6	4.000,0	157,6	4.000,0	-	Disperindag
2.07.3.06.01.25	Program Peningkatan pengelolaan SDA	Persentase pemanfaatan potensi SDA dalam pemberdayaan masyarakat		%	-	-	2,0	70,0	-	-	-	-	-	-	Disperindag	
2.07.3.06.01.26	Program pengembangan dan kajian TTG	Persentase diseminasi dengan pemanfaatan TTG dalam pemberdayaan potensi masyarakat		%	-	-	1,0	140,0	-	-	-	-	-	-	Disperindag	

3.06.3.06.01.18	Program Peningkatan Layanan Perdagangan Dalam Negeri	Persentase peningkatan omset usaha perdagangan dan jasa		%	-	-	0,11	650,0	-	-	-	-	-	-	Disperindag	
		Persentase PKL yang tertata		%	-	-	-	-	-	-	-	10,0	200.000,0	10,0	200.000,0	Disperindag
		Persentase pasar yang berstandar SNI		%	-	-	-	-	-	-	-	20,0		20,0	-	Disperindag
3.06.3.06.01.23	Program Pengembangan Perdagangan	Prosentase pertumbuhan IKM subsektor perdagangan besar dan eceran	-	%	-	-	-	-	0,4	4.200,0	-	-	-	-	Disperindag	
3.06.3.06.01.24	Program Pengelolaan Pasar dan Penataan Pedagangan Kaki Lima	Prosentase sarana dan prasarana pasar dalam kondisi baik	-	%	-	-	-	-	85,0	5.300,0	-	-	-	-	Disperindag	
		Persentase PKL yang tertata	-	%	-	-	-	-	10,0			-	-	-	-	
	Meningkatnya upaya perlindungan konsumen	Pertumbuhan alat ukur, takar dan timbangan yang ditera ulang	7,7		%			7,9		8,0		8,1		8,1	-	
		Pertumbuhan jenis barang dalam keadaan bungkus yang diawasi	26,0		Jenis			27,0		28,0		29,0		29,0	-	
		Persentase laporan keluhan konsumen yang ditindaklanjuti oleh BPSK	33,3		%			38,3		41,1		44,1		44,1	-	
3.06.3.06.01.15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah keluhan masyarakat di Bidang Perindustrian dan Perdagangan	35,0		kasus	80,0	274,0	43,0	630,0	-	-	-	-	-	-	Diskoperindag/ Disperindag
		Prosentase penurunan keluhan konsumen			%	-	-	-	-	58,3	1.520,0	-	-	-	-	Disperindag
		Prosentase UTTP yang ditera			%	-	-	-	-	75,6	-	-	-	-	-	Disperindag
		Prosentase jumlah barang beredar yang			%	-	-	-	-	78,0	-	-	-	-	-	Disperindag

		diawasi														
		Prosentase pengendalian tertib niaga	-	%	-	-	-	-	-	-	-	70,6	675,0	70,6	675,0	Disperindag
	Meningkatnya kinerja sektor industri, utamanya melalui pembinaan industri rumah tangga	Pertumbuhan sektor industri terhadap PDRB	4,9	%			5,5		5,6		5,7		5,7	-		
		Persentase pertumbuhan industri kecil menengah	2,1	%			2,1		2,2		2,2		2,2	-		
3.07.3.06.01.21	Program Peningkatan Kemampuan Sistem Produksi	Meningkatnya Kemampuan Sistem Produksi	80,0	%	80,0	134,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskoperindag
		Persentase peningkatan jumlah produksi IKM		%	-	-	1,0	277,5	-	-	-	-	-	-	-	Disperindag
3.07.3.06.01.16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Persentase peningkatan kemampuan SDM industri kecil dan menengah	80,0	%	6,5	1168,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskoperindag
		Prosentase IKM berkembang		%	-	-	1,5	350,0	30,0	850,0	30,0	1.497,0	30,0	1.497,0		Disperindag
		Persentase IKM yang terfasilitasi	-	%	-	-	-	-	15,0	-	-	-	-	-	-	Disperindag
3.07.3.06.01.17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Persentase penguasaan teknologi industri IKM	80,0	%	10,0	879,5	1,5	325,0	-	-	-	-	-	-	-	Diskoperindag/ Disperindag
3.07.3.06.01.18	Program penataan struktur industri	Meningkatnya penataan struktur industri	80,0	%	2,0	120,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskoperindag
		Persentase tumbuhnya keterkaitan industri hulu hilir			%	-	-	1,5	170,0	-	-	-	-	-	-	-
3.06.3.06.01.25	Program pembinaan industri	Prosentase IKM berkembang	-	%	-	-	-	-	30,0	85,0	30,0	85,0	30,0	85,0		Disperindag

		Persentase pertumbuhan IKM yang difasilitasi	-	%	-	-	-	-	15,0	85,0	15,0	85,0	15,0	85,0	Disperindag
	Meningkatnya kunjungan wisata yang disertai dengan perbaikan fasilitas pelayanan kepariwisataan	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan yang berkunjung	7,8	wisatawan			8,3		8,5		8,7		8,7	-	
		Jumlah destinasi wisata baru yang dikembangkan	9,0	unit			1,0		1,0		1,0		1,0	-	
3.02.2.13.01.15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Meningkatnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata	100,0	%	100,0	820,5	-	-	-	-	-	-	-	-	Disporabud/Disparpora
		Jumlah wisatawan yg berkunjung ke Kota Pasuruan		orang	-	-	300,00	1.400,0	-	-	-	-	-	-	Disparpora
		Jumlah promosi pemasaran pariwisata		promosi	-	-	-	-	6,0	1.400,0	-	-	-	-	
		Jumlah kerjasama dengan media		kerjasama	-	-	-	-	-	-	9,0	6.000,0	9,0	6.000,0	
3.02.2.13.01.16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Meningkatkan Pengembangan sektor Pariwisata	100,0	%	100,0	207,5	-	-	-	-	-	-	-	-	Disporabud/Disparpora
		Jumlah destinasi pariwisata di Kota Pasuruan		Destinasi/ event	-	-	14,0	800,0	-	-	-	-	-	-	Disparpora
		jumlah destinasi dan even wisata		Destinasi	-	-	-	-	15,0	1.560,0	17,0	4.500,0	17,0	4.500,0	
	Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan)	Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan terhadap PDRB	0,8	%			0,8		0,8		0,9		0,9	-	
		Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Perkebunan terhadap PDRB	0,0	%			0,0		0,0		0,0		0,0	-	

3.03.3.03.01.01	Program administrasi perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		%	100,0	600,0	100,0	770,0	100,0	500,0	100,0	700,0	100,0	700,0	DPKKP	
3.03.3.03.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak		%	80,0	450,0	85,0	300,0	85,0	500,0	90,0	1.600,0	90,0	1.600,0	DPKKP	
2.01.2.01.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan aparatur yang disiplin memakai atribut kedinasan		%	75,0	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKKP	
3.03.3.03.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM		%	70,0	20,0	75,0	35,0	80,0	100,9	85,0	45,0	85,0	45,0	DPKKP	
3.03.3.03.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase tersusunnya laporan kinerja, keuangan, kepegawaian dan barang secara tepat waktu		%	90,0	75,0	90,0	75,0	90,0	28,0	90,0	135,0	90,0	135,0	DPKKP	
3.03.3.03.01.17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	80,0	%	80,0	103,2	-	310,0	-	-	-	-	-	-	DPKKP/DPKP	
3.03.3.03.01.18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/perkebunan	80,0	%	80,0	180,6	80,0	332,4	-	-	-	-	-	-	DPKKP/DPKP	
3.03.3.03.01.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	produksi padi meningkat	15.607,0	ton/ tahun	15.607,0	383,3	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKKP	
		Produktifitas pertanian (Padi)	-	ton/ha	-	-	15.607,0	619,0	-	-	-	-	-	-	DPKP	
		Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan (ton/ hektar)	-	ton/ha	-	-	-	-	-	-	-	7,1	1.895,6	7,1	1.895,6	DPKP
		Jumlah kasus kejadian hama dan penyakit tanaman pangan dan	-	kasus	-	-	-	-	-	-	-	20,0	-	20,0	-	DPKP

		hortikultura													
3.03.3.03.01.20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Meningkatnya pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	80,0	%	80,0	55,5	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKKP
		meningkatnya kinerja penyuluh	30,0	orang	-	-	30,0	56.502,0	-	-	-	-	-	-	DPKP
3.03.03.01.26	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana pertanian	40,0	%	40,0	5.121,2	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKKP
		Jumlah sarana dan prasarana pertanian		%	-	-	40,0	1.281,0	-	-	-	-	-	-	DPKP
2.01.2.01.01.28	Program Pengendalian Hama Terpadu pada Tanaman	Meningkatnya Pengendalian Hama Terpadu pada Tanaman	80,0	%	80,0	26,0	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKKP
3.03.3.03.01.27	Peningkatan produksi benih padi bermutu	Jumlah ketersediaan benih tanaman pangan di Kota Pasuruan	45,5	ton/tahun	-	-	45,5	208,0	-	-	-	-	-	-	DPKP
2.02.2.01.01.16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan	80,0	%	80,0	62,9	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKKP
3.04.3.03.01.23	Program Pengembangan Rehabilitasi hutan dan lahan dengan Tanaman Kehutanan/MPTS/Perkebunan	Meningkatnya Rehabilitasi hutan dan lahan dengan Tanaman Kehutanan/MPTS/Perkebunan	80,0	%	-	-	80,0	238,0	-	-	-	-	-	-	DPKP
2.02.2.01.01.21	Program Pengembangan SDM Kehutanan	Meningkatnya SDM Kehutanan	100,0	%	100,0	70,0	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKKP
TdkadadiAPBD 2017	Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Kehutanan /Perkebunan	Meningkatnya Sumber Daya Manusia di Bidang Kehutanan /Perkebunan	80,0	%	-	-	80,0	97,0	-	-	-	-	-	-	

2.02.2.01.01.22	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Daya Hutan	Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Daya Hutan	80,0	%	80,0	33,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKKP
2.02.2.01.01.24	Program Peningkatan Sumber Daya hutan Mangrove	Meningkatnya Sumber Daya hutan Mangrove	80,0	%	80,0	26,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKKP
TdkadadiAPBD 2017	Pengembangan Sarana Prasarana Pelestarian dan Pengamanan Kehutanan/Perkebunan Dan Lahan	Meningkatnya Sarana Prasarana Pelestarian dan Pengamanan Kehutanan/Perkebunan Dan Lahan	80,0	%	-	-	80,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	
TdkadadiAPBD 2017	Pengembangan Usaha Industri Hasil Hutan Kayu / Hasil Hutan Bukan Kayu dan Perkebunan	Meningkatnya Usaha Industri Hasil Hutan Kayu / Hasil Hutan Bukan Kayu dan Perkebunan	80,0	%	-	-	80,0	149,0	-	-	-	-	-	-	-	
TdkadadiAPBD 2016	Pengamanan Dan Pelestarian Serta Konservasi Kehutanan/ Perkebunan Dan Lahan	Meningkatnya Pengamanan Dan Pelestarian Serta Konservasi Kehutanan/ Perkebunan Dan Lahan	80,0	%	80,0	78,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.03.3.03.01.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian	Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan (ton/ hektar)	-	(ton/ hektar)	-	-	-	-	6,5	1.023,5	-	-	-	-	-	DPKP
3.03.3.03.01.28	Program Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Kasus kejadian serangan hama dan penyakit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	-		-	-	-	-	20,0	119,0	-	-	-	-	-	DPKP
		Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB	0,1	%			0,1		0,1		0,1		0,1		-	
3.03.3.03.01.21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit temak	jumlah temak sehat, produk pangan/non pangan yang ASUH	20,0	%	20,0	166,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKKP

		Prosentase penyedia produk pangan/ non pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)	-	%	-	-	20,0	536,0	-	-	2,0	420,0	2,0	420,0	DPKP
		Jumlah kasus kejadian hewan sakit yang tertangani (ekor)									1.030,0		1.030,0	-	
2.01.2.01.01.24	Program peningkatan produksi hasil peternakan	populasi ternak, produksi daging, telur, susu dan hasil samping peternakan	20,0	%	20,0	152,0	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKPP
		Peningkatan populasi ternak ruminansia	-	ekor	-	-	20,0	2.261,5	-	-	-	-	-	-	DPKP
		Jumlah populasi hewan ternak ruminansia							4.200,0	401,6	4.200,0	1.239,5	4.200,0	1.239,5	DPKP
		Jumlah populasi hewan ternak non ruminansia							88.300,0		88.300,0		88.300,0	-	DPKP
		Jumlah produksi daging, susu dan telur		ton; liter ; ton					706; 24100; 129		706; 24100; 129		706; 24100; 129	-	
2.01.2.01.01.23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Meningkatnya pemasaran hasil produksi peternakan	80,0	%	80,0	70,5	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKPP
3.03.3.03.01.21	Program Pengendalian Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah kasus kejadian hewan sakit yang tertangani (ekor)	-	ekor	-	-	-	-	1.030,0	234,8	-	-	-	-	DPKP
		Persentase penyedia produk pangan/non pangan asal hewan yang ASUH	-	%	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-	-	
3.03.3.03.01.24	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah Populasi Ternak Ruminansia (ekor)	-	ekor	-	-	-	-	4.200,0	401,6	-	-	-	-	DPKP
		Jumlah Populasi Ternak Non Ruminansia (ekor)	-	ekor	-	-	-	-	88.300,0		-	-	-	-	
		Jumlah Produksi Daging (ton)		ton	-	-	-	-	706,0		-	-	-	-	

		Jumlah Produksi Susu (liter)	-	liter	-	-	-	-	24.100,0			-	-	-	-	
		Jumlah Produksi Telur (ton)	-	to n	-	-	-	-	129,0			-	-	-	-	
3.03.3.03.01.36	Program Peningkatan Pelayanan UPT RPH	Meningkatnya Pelayanan UPT RPH	80,0	%	80,0	59,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKKP
		Tersedianya daging ASUH	100,0	%	-	-	100,0	238,0	-	-	-	-	-	-	-	DPKP
		Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	3,0	%			3,1		3,1		3,1		3,1		-	
2.05.2.01.01.15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	80,0	%	80,0	73,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKKP
2.05.2.01.01.16	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	80,0	%	80,0	50,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKKP
2.05.2.01.01.17	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Tertib administrasi dan Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Laut	80,0	%	80,0	60,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKKP
2.05.2.01.01.20	Program pengembangan budidaya perikanan	Meningkatnya pengembangan budidaya perikanan	80,0	%	80,0	60,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKKP
2.05.2.01.01.21	Program pengembangan perikanan tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	80,0	%	80,0	22,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKKP
TdkadadiAPBD	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Meningkatnya Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	80,0	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.05.2.01.01.22	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Peningkatan SDM Kelautan dan Perikanan	80,0	%	80,0	152,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKKP
2.05.2.01.01.24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Meningkatnya pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air	80,0	%	80,0	358,4						-	-	-	-	DPKKP

		tawar													
2.05.2.01.01.26	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	80,0	%	80,0	1.231,2	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKKP
TdkadadiAPBD	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan pada Balai Benih Ikan (BBI)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan	80,0	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.01.3.01.01.01	Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	80,0	%	-	-	100,0	215,0	100,0	135,0	100,0	120,0	100,0	120,0	Dinas Perikanan
3.01.3.01.01.02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak	80,0	%	-	-	89,0	127,0	85,0	270,0	85,0	300,0	85,0	300,0	Dinas Perikanan
3.01.3.01.01.05	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Proporsi personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	80,0	%	-	-	75,0	35,0	80,0	15,0	80,0	15,0	80,0	15,0	Dinas Perikanan
3.01.3.01.01.06	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase tersusunnya laporan kinerja, keuangan, kepegawaian dan barang secara tepat waktu	100,0	%	-	-	100,0	75,0	80,0	18,0	100,0	50,0	100,0	50,0	Dinas Perikanan
3.01.3.01.01.15	Pemberdayaan ekonomi masyarakat perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan			-	-	80,0	82,0	-	-	-	-	-	-	
3.01.3.01.01.20	Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut	Tertib administrasi dan Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Laut		%	-	-	80,0	10,0	-	-	-	-	-	-	Dinas Perikanan
3.01.3.01.01.18	Pengembangan budidaya perikanan	Meningkatnya pengembangan budidaya perikanan		%	-	-	80,0	215,0	-	-	-	-	-	-	Dinas Perikanan
3.01.3.01.01.21	Peningkatan produksi perikanan tangkap	Meningkatnya Peningkatan Produksi		%	-	-	80,0	47,0						-	Dinas Perikanan

		Perikanan Tangkap													
		Jumlah produksi perikanan tangkap		ton					7.029,1	160,0	7.872,6	1.205,0	7.872,6	1.205,0	Dinas Perikanan
		Jumlah KUB yang naik kelas		Kel.					2,0		2,0		2,0	-	
3.01.3.01.01.22	Pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Peningkatan SDM Kelautan dan Perikanan		%	-	-	80,0	115,0					-	-	Dinas Perikanan
3.01.3.01.01.26	Peningkatan sarana dan prasarana perikanan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan			-	-	80,0	9.670,0					-	-	Dinas Perikanan
TidakadadiAPB D	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan pada Balai Benih Ikan (BBI)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan											-	-	
3.01.3.01.01.27	Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tangkap	Nilai tambah produk olahan perikanan tangkap		rupiah	-	-	-	-	6.401,5	14.900,0	-	-	-	-	Dinas Perikanan
		Jumlah Pokhlar yang naik kelas		Kel.	-	-	-	-	2,0		2,0		2,0	-	
3.01.3.01.01.27	Pengembangan perikanan tangkap	Nilai tambah produk olahan perikanan tangkap		Rp. (juta)	-	-	-	-	-	-	6.721,6	216,5	6.721,6	216,5	Dinas Perikanan
		Jumlah Pokhlar yang naik kelas			-	-	-	-	-	-	2,0		2,0	-	
3.01.3.01.01.28	Peningkatan produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya		ton	-	-	-	-	1.732,0	1.510,0	-	-	-	-	Dinas Perikanan
		Jumlah Pokdakan yang naik kelas		Kel.	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	
3.01.3.01.01.28	Pengembangan budidaya perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya		ton	-	-	-	-	-	-	1.870,6	3.625,8	1.870,6	3.625,8	Dinas Perikanan
		Jumlah Pokdakan yang naik kelas		Kel.	-	-	-	-	-	-	2,0		2,0	-	
3.01.3.01.01.29	Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil	Nilai tambah produk olahan perikanan budidaya		juta	-	-	-	-	19.710,2	30,0	-	-	-	-	Dinas Perikanan

	perikanan budidaya														
3.01.3.01.01.29	Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Nilai tambah produk olahan perikanan budidaya		juta			-	-	-	-	20.695,7	1.325,0	20.695,7	1.325,0	Dinas Perikanan
TdkadadiAPBD Tahun2018	Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Peningkatan Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan					80,0	385,0					-	-	
TdkadadiAPBD Tahun2018	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan				-	-	80,0	370,0				-	-	
	Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat	Ketersediaan Pangan:											-	-	
		- Beras	115.123,0	ton/ tahun			116.277,1		116.858,5		117.442,8		117.442,8	-	
		Ketersediaan protein perkapita (standar minimal 57 gr/hari)	56,7	gr/kap/hari			56,9		57,1		57,2		57,2	-	
		Ketersediaan energi per kapita (standar minimal 2.200 kkal/hari)	2.459,0	kkal/kap/hari			2.469,8		2.475,3		2.480,7		2.480,7	-	
	Meningkatnya penyerapan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	82,7	Indeks			83,1		83,2				-	-	
		Konsumsi protein perkapita (standar minimal 52 gr/hari)	62,3	gr/kap/hari			62,6		62,7				-	-	
		Konsumsi energi per kapita (standar minimal 2.000 kkal/hari)	2.459,0	kkal/kap/hari			2.466,2		2.471,6				-	-	
2.03.3.03.01.17	Program Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan	jumlah pasokan/ketersediaan bahan pangan di kota	-	ton	480.452,5	600,0	576.543,0	846.96	-	-			-	-	Kantor Ketahanan Pangan/DPKP

	berkelanjutan															
	Sasaran : Meningkatnya ketersediaan dan kelayakan prasarana dan sarana perekonomian dan sosial												-	-		
													-	-		
	Belanja Tidak Langsung					11.246,0		5.151,4		4.373,0		5.666,6		-	5.666,6	DPU-PR
1.03.1.03.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100,0	%	100,0	9.976,4	100,0	1.343,1	100,0	583,1	100,0	1.146,9	100,0	1.146,9	DPU-PR	
1.03.1.03.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak	100,0	%	100,0	1.994,6	100,0	264,3	100,0	425,0	100,0	932,0	100,0	932,0	DPU-PR	
1.03.1.03.1.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan aparatur yang disiplin memakai atribut kedinasan	100,0	%	100,0	178,7	100,0	77,7	100,0	43,5	100,0	50,0	100,0	50,0	DPU-PR	
1.03.1.03.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	79,0	%	79,0	31,3	79,0	68,8	79,0	50,8	80,0	50,8	80,0	50,8	DPU-PR	
1.03.1.03.1.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase tersusunnya laporan kinerja, keuangan, kepegawaian dan barang secara tepat waktu	100,0	%	100,0	88,0	100,0	75,0	100,0	25,4	100,0	65,0	100,0	65,0	DPU-PR	
1.03.1.03.1.15	Program pembangunan jalan dan jembatan	Persentase jalan dalam kondisi baik	80,0	%	80,0	43.865,5	80,0	35,0		-	-	-	-	-	DPU-PR	

		Persentase jembatan dalam kondisi baik	85,0	%	85,0		85,0		-	-	-	-	-	-	DPU-PR
1.03.1.03.1.16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi lancar	86,0	%	86,0	4.412,4			-	-	-	-	-	-	DPU-PR
1.03.1.03.1.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase jalan dalam kondisi baik	82,0	%	82,0	17.043,2	82,0	19.346,1	-	-	-	-	-	-	DPU-PR
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	83,0	%	83,0		83,0		-	-	-	-	-	-	DPU-PR
1.03.1.03.1.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik	84,0	%	84,0	843,5			-	-	-	-	-	-	DPU-PR
1.03.1.03.1.23	Program Peningkatan Prasarana Ke-PU-an	Prosentase Prasarana ke-PU-an yang layak digunakan	90,0	%			90,0	1.123,7	-	-	-	-	-	-	DPU-PR
1.03.1.03.1.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase Luas areal layanan irigasi	88,0	%	88,0	9.417,9	-	-	-	-	-	-	-	-	DPU-PR
1.03.1.03.1.28	Program Pengendalian Banjir	Persentase Luas genangan pada daerah rawan banjir	90,0	%	90,0	562,5	-	-	-	-	-	-	-	-	DPU-PR
1.03.1.03.1.31	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase Program Pembinaan Lingkungan Sosial	90,0	%	90,0	2.525,2	-	-	-	-	-	-	-	-	DPU-PR
1.03.1.03.1.32	Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Infrastruktur	Persentase Kinerja Pembangunan Bidang Infrastruktur	90,0	%	90,0	112,5	90,0	3.223,0	-	-	-	-	-	-	DPU-PR
1.03.1.03.1.33	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Tersedianya Rencana Detail Tata Ruang	60,0	%			60,0	805,0					-	-	DPU-PR
1.03.1.03.1.33	Program Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	97,6	%	-	-			98,7	1.141,9	99,8	2.025,4	99,8	2.025,4	DPU-PR

1.03.1.03.1.34	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase luasan pemanfaatan ruang yang ditingkatkan	30,0	%	-	-	30,0	625,0	-	-	-	-	-	-	DPU-PR
1.03.1.03.1.35	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap rencana Tata Ruang	82,0	%	-	-	82,0	145,0	-	-	-	-	-	-	DPU-PR
1.03.1.03.1.37	Program Pembangunan Median, Trotoar dan Drainase Jalan	Persentase Kondisi Bangunan Median, Trotoar dan Drainase Jalan yang Terbangun	70,0	%	-	-	70,0	1.952,7	-	-	-	-	-	-	DPU-PR
1.03.1.03.1.38	Program Peningkatan Median, Trotoar dan Drainase Jalan	Presentase tingkat kondisi bangunan Median, Trotoar dan Drainase Jalan baik dan sedang	40,0	%	-	-	40,0	5.088,5	-	-	-	-	-	-	DPU-PR
1.03.1.03.1.39	Program Pengawasan Kualitas Mutu Bahan Bangunan & Konstruksi	Prosentase Kualitas Mutu Bahan Bangunan & Konstruksi	90,0	%	-	-	90,0	218,0	-	-	-	-	-	-	DPU-PR
1.03.1.03.1.40	Program Peningkatan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Persentase Ketersediaan Informasi Layanan Jasa Konstruksi	65,0	%	-	-	65,0	110,0	70,0	67,3	70,0	132,0	70,0	132,0	DPU-PR
1.03.1.03.1.41	Program Peningkatan Tertib pembangunan Bangunan Gedung	Persentase Jumlah Ijin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan	80,0	%	-	-	80,0	351,0	-	-	-	-	-	-	DPU-PR
1.03.1.03.1.42	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pengendalian Air Irigasi	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik dan sedang	71,2	%	-	-	90,0	6.118,5	73,9	3.555,9	76,7	5.987,0	76,7	5.987,0	DPU-PR
1.03.1.03.1.43	Program Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Persentase jaringan Air Irigasi yang terpelihara	90,0	%	-	-	90,0	1.525,0	-	-	-	-	-	-	DPU-PR
1.03.1.03.1.44	Program Pembangunan Drainase Kota	Persentase Penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 Cm, selama 2 Jam) lebih	90,0	%	-	-	90,0	2.069,5	-	-	-	-	-	-	DPU-PR

		dari 2 kali setahun													
1.03.1.03.1.44	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Kota	Persentase Wilayah yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan	98,6	%	-	-	-	-	98,7	5.575,1		-	-	-	DPU-PR
1.03.1.03.1.44	Program Pemeliharaan Drainase Kota	Persentase Wilayah yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan	98,6	%	-	-	-	-	-	-	98,9	11.538,2	98,9	11.538,2	DPU-PR
1.03.1.03.1.45	Program Pemeliharaan Drainase Kota	Persentase Jaringan Drainase Kota yang terpelihara sesuai umur Teknis	90,0	%	-	-	90,0	730,0	-	-	-	-	-	-	DPU-PR
1.03.1.03.1.46	Program pengembangan dan pengelolaan IPLT	Presentase pengembangan dan pengelolaan IPLT	10,0	%	-	-	10,0	2.555,0	-	-	-	-	-	-	DPU-PR
1.03.1.03.1.47	Program Pembangunan / Peningkatan Gedung Negara	Persentase Peningkatan Gedung Negara yang berkualitas	70,0	%	-	-	70,0	71.380,4	-	-	-	-	-	-	DPU-PR
1.03.1.03.1.48	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkapannya	Presentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	65,4	%	-	-	-	-	67,2	72.639,9			-	-	DPU-PR
1.03.1.03.1.48	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Presentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	65,4	%	-	-	-	-			69,0	7.178.09 5.550,0	69,0	7.178.09 5.550,0	DPU-PR
1.03.1.03.1.49	Program Peningkatan Bangunan Gedung	Persentase Ketersediaan Bangunan Gedung Negara	70,0	%	-	-	-	-	81,5	16.853,3			-	-	DPU-PR

1.03.1.03.1.49	Program Peningkatan Tertib Pembangunan Bangunan Gedung	Persentase Ketersediaan Bangunan Gedung Negara	70,0	%	-	-	-	-	-	-	82,7	16.178,1	82,7	16.178,1	DPU-PR
1.03.1.03.1.50	Program Pembangunan Infrastruktur Jalan, Jembatan dan bangunan pelengkapya	Persentase Ketersediaan Jalan dan Bangunan Pelengkapya	40,9	%	-	-	-	-	42,6	7.701,8	-	-	-	-	DPU-PR
1.03.1.03.1.50	Program Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan	Persentase Ketersediaan Jalan dan Bangunan Pelengkapya	40,9	%	-	-	-	-	-	-	45,1	65.408,6	45,1	65.408,6	DPU-PR
1.04.1.03.1.15	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penurunan luasan kawasan kumuh	90,0	%	90,0	2.620,8	-	-	-	-	-	-	-	-	DPU-PR
1.04.1.03.1.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase penurunan luasan kawasan kumuh	90,0	%	90,0	3.937,7	-	-	-	-	-	-	-	-	DPU-PR
1.04.1.03.1.20	Program pengelolaan areal pemakaman	persentase pertumbuhan kapasitas makam	90,0	%	90,0	785,0	-	-	-	-	-	-	-	-	DPU-PR
1.04.1.03.1.22	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase Tingkat Pelayanan air minum	90,0	%	90,0	6.303,6	-	-	-	-	-	-	-	-	DPU-PR
		Persentase Tingkat Pelayanan air Limbah	90,0	%	90,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPU-PR
1.05.1.03.1.18	Program Penataan Tata Ruang	persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	90,0	%	90,0	1.304,8	-	-	-	-	-	-	-	-	DPU-PR
1.08.1.03.1.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah tereduksi	60,0	%	60,0	9.590,3	-	-	-	-	-	-	-	-	DPU-PR
1.08.1.03.1.24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	21,0	%	21,0	5.243,7	-	-	-	-	-	-	-	-	DPU-PR
1.08.1.03.1.27	Program Peningkatan sarana prasarana Penerangan Jalan	Persentase PJU dalam kondisi baik	78,0	%	78,0	3.619,5	-	-	-	-	-	-	-	-	DPU-PR

1.09.1.03.1.16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum	10,0	%	10,0	39.046,7	-	-	-	-	-	-	-	-	DPU-PR
2.04.1.03.1.16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum	10,0	%	-	-	11,3	32.715,9	12,6	21.956,5	29,8	31.676,0	29,8	31.676,0	DPU-PR
													-	-	
1.04.1.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100,0	%	-	-	100,0	798,2	90,0	385,4	100,0	374,7	100,0	374,7	DPR-KP
1.04.1.04.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak	80,0	%	-	-	80,0	256,3	90,0	840,8	100,0	855,3	100,0	855,3	DPR-KP
1.04.1.04.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan aparatur yang disiplin memakai atribut kedinasan	90,0	%	-	-			90,0	39,2	100,0	72,1	100,0	72,1	DPR-KP
1.04.1.04.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	85,0	%	-	-	85,0	35,0	90,0	25,0	67,5	20,4	67,5	20,4	DPR-KP
1.04.1.04.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase tersusunnya laporan kinerja, keuangan, kepegawaian dan barang secara tepat waktu	100,0	%	-	-	100,0	75,0	90,0	26,1	100,0	53,5	100,0	53,5	DPR-KP
1.04.1.03.01.01.15	Program Pengembangan Perumahan	Persentase ketersediaan perumahan	90,0	%		2.447,0	90,0	1.261,2	-	-	-	-	-	-	DPR-KP

1.04.1.03.01.01 .16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan yang layak	16,6	%	16,6	2.583,3			-	-	-	-	-	-	DPR-KP
		Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	2,0	%	2,0									-	-
1.04.1.03.01.01 .20	Program pengelolaan areal pemakaman	Persentase areal pemakaman yang memadai	80,0	%		739,8	80,0	1.105,9	-	-	-	-	-	-	DPR-KP
1.04.1.03.01.01 .22	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase Penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman dan terlayani sistem air limbah yang memadai	85,0	%		5.789,4			-	-	-	-	-	-	DPR-KP
1.04.1.03.01.01 .22	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Persentase Penduduk (rumah) yang mendapatkan akses air minum yang aman	85,0	%	-	-	85,0	2.201,2	-	-	-	-	-	-	DPR-KP
1.04.1.04.01.23	Program Pengembangan Penanganan Kawasan Kumuh perkotaan	Persentase Berkurangnya Luasan pemukiman Kumuh di kawasan perkotaan	19,67%	%	-	-	70,0	340,5	-	-	-	-	-	-	DPR-KP
1.04.1.04.01.24	Program Pengembangan Rumah Susun	Persentase kualitas rumah susun sesuai regulasi	100,0	%	-	-	100,0	2.749,9	-	-	-	-	-	-	DPR-KP
1.04.1.04.01.25	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah	Persentase Penduduk (rumah) yang terlayani sistem air Limbah yang memadai	87,4	%	-	-	87,4	2.889,4	-	-	-	-	-	-	DPR-KP
1.04.1.04.01.26	Program Pembangunan dan peningkatan sarpras Lingkungan Permukiman	Persentase Luas Lingkungan Permukiman yang sarprasnya memadai	80,0	%	-	-	80,0	7.656,0	-	-	-	-	-	-	DPR-KP
1.04.1.04.01.27	Program Pemeliharaan sarpras Lingkungan Permukiman	Persentase tingkat kondisi sarpras Lingkungan Permukiman yang	0,8	%	-	-	80,0	3.203,2	-	-	-	-	-	-	DPR-KP

		baik dan sedang													
1.04.1.04.01.15	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	Persentase prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan yang layak	16,6	%	-	-	-	-	16,6	5.018,1	22,3	4.762,5	22,3	4.762,5	DPR-KP
		Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	2,0	%					2,2		8,8		8,8	-	DPR-KP
1.04.1.04.01.29	Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak	84,5	%	-	-	-	-	84,5	22.168,2	86,1	23.228,5	86,1	23.228,5	DPR-KP
		Persentase areal pemakaman yang memadai	80,0	%					80,0		85,0		85,0	-	DPR-KP
1.04.1.04.01.30	Program Pengembangan Layanan Air Minum dan Air Limbah	Presentase Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman	85,0	%	-	-	-	-	86,9	7.359,2	88,5	40.511,1	88,5	40.511,1	DPR-KP
		Presentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang memadai	87,4	%					87,4		88,6		88,6	-	DPR-KP
1.04.1.04.01.31	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Presentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang memadai	87,4	%	-	-	-	-	87,4	2.244,3				-	DPR-KP
	Belanja Tidak Langsung					6.491,7		4.237,7		4.879,5		5.367,5		-	5.367,5
1.07.1.07.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100,0	%	100,0	916,9	100,0	12.224,3	100,0	597,6	100,0	661,8	100,0	661,8	Dishub

1.07.1.07.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak	80,0	%	100,0	366,0	100,0	348,0	100,0	875,1	100,0	625,0	100,0	625,0	Dishub
1.07.1.07.01.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan aparatur yang disiplin memakai atribut kedinasan	80,0	%	100,0	94,0	100,0	80,0	100,0	82,0	100,0	90,8	100,0	90,8	Dishub
1.07.1.07.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Proporsi personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	80,0	%	100,0	23,3	100,0	40,0	62,3	30,0	67,5	33,2	67,5	33,2	Dishub
1.07.1.07.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun	80,0	%	100,0	68,2	100,0	75,0	100,0	28,1	100,0	31,1	100,0	31,1	Dishub
1.07.1.07.01.01.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	80,0	%	80,0	20,5	80,0	23,0	-	-	-	-	-	-	Dishub
1.07.1.07.01.01.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	80,0	%	80,0	826,2	80,0	1.719,5	-	-	-	-	-	-	Dishub
1.07.1.07.01.01.17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Meningkatnya peningkatan pelayanan angkutan	80,0	%	80,0	256,7	80,0	137,5	-	-	-	-	-	-	Dishub
1.07.1.07.01.01.18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	80,0	%	80,0	267,2	80,0	57,5	-	-	-	-	-	-	Dishub
1.07.1.07.01.01.19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Prosentase kelayakan perlengkapan jalan	80,0	%	80,0	1.408,0	80,0	7.010,3	90,0	26.263,4	90,0	29.081,7	90,0	29.081,7	Dishub
1.07.1.07.01.01.21	Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran	Meningkatnya Pelayanan Perparkiran	80,0	%	80,0	1.153,1	80,0	1.326,0	-	-	-	-	-	-	Dishub

1.07.1.07.01.01 .22	Program Pengembangan Pelayanan Bidang Perhubungan Laut	Meningkatnya Pelayanan Bidang Perhubungan Laut	80,0	%	80,0	165,9	80,0	123,0	-	-	-	-	-	-	Dishub
1.25.1.07.01.01 .23	Program Pembangunan PJU	Meningkatnya Pembangunan PJU		%			80,0	1.719,9	-	-	-	-	-	-	Dishub
1.25.1.07.01.01 .24	Program Peningkatan PJU	Prosentase PJU dalam kondisi baik		%			80,0	2.774,8	-	-	-	-	-	-	Dishub
1.25.1.07.01.01 .25	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Prosentase angkutan umum yang memiliki ijin		%					90,0	1.752,7	90,0	1.940,7	90,0	1.940,7	Dishub
1.25.1.07.01.01 .15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	85,0	%	85,0	452,2	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishub
1.25.1.07.01.01 .17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Meningkatnya fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	85,0	%	85,0	109,4	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishub
1.25.1.07.01.01 .18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Meningkatnya kerjasama informasi dengan mas media	80,0	%	80,0	172,3	-	-	-	-	-	-	-	-	Dishub
	Tujuan : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang didukung dengan penataan ruang yang ramah lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup		Indeks	58,2		65,9		66,3		66,7		66,7	-	
	Sasaran : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup		Indeks	58,2		65,9		66,3		66,7		66,7	-	
	Belanja Tidak Langsung					2.799,9		6.289,8		9.166,3		10.082,9		10.082,9	

1.08.1.08.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	80,0	%	80,0	430,2							-	-	DLHKP
2.05.2.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	80,0	%			80,0	1.604,0	80,0	1.321,8	100,0	1.386,1	100,0	1.386,1	DLHKP
1.08.1.08.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak	80,0	%	80,0	152,9							-	-	DLHKP
2.05.2.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak	80,0	%			80,0	263,5	80,0	564,7	67,5	475,5	67,5	475,5	DLHKP
2.05.2.05.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan aparatur yang disiplin memakai atribut kedinasan	80,0	%			80,0	69,4					-	-	DLHKP
1.08.1.08.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	80,0	%	80,0	24,2							-	-	DLHKP
2.05.2.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	80,0	%			80,0	52,3	80,0	32,3	100,0	35,8	100,0	35,8	DLHKP
1.08.1.08.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase tersusunnya laporan kinerja, keuangan, kepegawaian dan barang secara tepat waktu	80,0	%	80,0	75,0							-	-	DLHKP
2.05.2.05.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase tersusunnya laporan kinerja, keuangan, kepegawaian dan barang secara tepat waktu	80,0	%			80,0	75,0	80,0	13,5	100,0	39,9	100,0	39,9	DLHKP

1.08.1.03.01.01 .15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah tereduksi	80,0	%	80,0	1.190,5							-	-	DLHKP	
2.05.2.05.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	- Prosentase sampah yang tertangani		%			86,0	2.296,0			86,5	23.537,7	86,5	23.537,7	DLHKP	
		- Prosentase sampah yang terolah di masyarakat		%			32,1				36,2		36,2	-		
		- Prosentase sampah yang terolah di TPA		%			100,0				100,0		100,0	-		
2.05.2.05.01.15	Program Pengelolaan sampah	Rasio Reduksi Sampah	40,0	%					40,0	10.232,1			-	-	DLHKP	
1.08.1.08.01.01 .16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	10,0	%	80,0	1.265,8							-	-	DLHKP	
2.05.2.05.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	80,0	%			80,0	228,0					-	-	DLHKP	
2.05.2.05.01.35	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks pencemaran air	45,0	indeks						66,0	497,8			-	-	DLHKP
		indeks pencemaran udara	74,6	Indeks						78,0				-	-	DLHKP
2.05.2.05.01.29	Program Pengembangan Kinerja Pengangkutan Sampah	Persentase sampah yang terangkut	90,0	%			90,0	4.672,3						-	-	DLHKP
2.05.2.05.01.31	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan TPA	Persentase sampah yang terolah di TPA	90,0	%			90,0	7.250,0						-	-	DLHKP
1.08.1.08.01.01 .17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase pengawasan terhadap industri yang memanfaatkan sumberdaya alam	80,0	%	80,0	80,0								-	-	DLHKP

2.05.2.05.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase luasan kawasan sumber daya alam yang terlindungi	47,0	%			48,0	274,1	49,0	399,4	57,09	700,0	57,09	700,0	DLHKP
		Persentase informasi SDA dan lingkungan hidup yang dapat diakses oleh masyarakat	62,0	%			65,0		67,0			70,0		70,0	
2.04.2.05.01.16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	80,0	%			80,0	3.429,4					-	-	DLHKP
1.08.1.08.01.01.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase indikator yang terealisasi u/ penyusunan SLHD yang akuntabel	80,0	%	80,0	154,8							-	-	DLHKP
2.05.2.05.01.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase informasi SDA dan lingkungan hidup yg dapat diakses oleh masyarakat dan stake holder terkait	62,0	%			80,0	130,0					-	-	DLHKP
1.08.1.08.01.01.20	Program peningkatan pengendalian polusi	Persentase peningkatan pengendalian polusi	80,0	%	80,0	32,8							-	-	DLHKP
2.05.2.05.01.20	Program peningkatan pengendalian polusi	Persentase peningkatan pengendalian polusi	80,0	%			80,0	63,7					-	-	DLHKP
1.08.1.03.01.01.24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	22,0	%	22,0	1.227,3							-	-	DLHKP
2.05.2.05.01.24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	45,0	%			23,0	898,6			24,5	33,6	24,5	33,6	DLHKP
2.05.2.05.01.24	Program Peningkatan ruang terbuka hijau (RTH)	Indeks kualitas tutupan lahan	12,0	indeks					49,0	20,7			-	-	DLHKP

1.08.1.08.01.01.30	Program Kemah Peduli Lingkungan	Prosentase Peran Serta Masyarakat Yang Peduli Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup	45,0	%	12,3	152,5							-	-	DLHKP
2.05.2.05.01.25	Program Peningkatan Partisipasi Penataan Lingkungan	Indeks kualitas tutupan lahan	12,0	indeks			48,5	1.514,6	49,0	1.440,6			-	-	DLHKP
2.05.2.05.01.25	Program Pengembangan Peduli Lingkungan	Prosentase Peran Serta Masyarakat Yang Peduli Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup	82,0	%							14,8	2.077,0	14,8	2.077,0	DLHKP
2.05.2.05.01.26	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan	Indeks kualitas air permukaan	82,0	indeks			84,0	32,0			86	974,5	86	974,5	DLHKP
		Indeks kualitas udara	86,0	indeks			84,0				86,0		86,0	-	DLHKP
2.05.2.05.01.28	Program Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	Persentase pengelolaan laboratorium lingkungan	80,0	%			80,0	400,5					-	-	DLHKP
2.05.2.05.01.32	Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Persentase luasan terbuka hijau	22,0	%			23,0	29.187,2					-	-	DLHKP
2.05.2.05.01.33	Program Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase luasan terbuka hijau	22,0	%			23,0	2.881,7					-	-	DLHKP
2.05.2.05.01.34	Program pembinaan lingkungan sosial	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	22,0	%			23,0		24,0	639,3		300,0	-	300,0	DLHKP
		Indeks kualitas air permukaan	82,0	indeks			84,0	32,0			86	974,5	86	974,5	DLHKP
		Indeks kualitas udara	82,0	indeks			84,0				86,0		86,0	-	
													-	-	
	Misi 6 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik												-	-	

	Tujuan : Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk membangun pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik	Indeks reformasi birokrasi	NA	Indeks	NA		4,0		4,5		5,0		5,0	-	
	Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah Kota Pasuruan	Indeks reformasi birokrasi	NA	Indeks	NA		4,0		4,5		5,0		5,0	-	
Opini BPK atas laporan keuangan daerah		WDP	Range	WDP		WDP		WDP		WTP		WTP	-		
Nilai akuntabilitas kinerja		CC	Range	CC		B		B		B		B	-		
4.02.4.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	90,0	%	90,0	659,2	90,0	685,4	90,0	237,9	90,0	291,2	90,0	291,2	Inspektorat
4.02.4.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak	90,0	%	90,0	1.129,6	90,0	249,2	90,0	571,1	90,0	716,1	90,0	716,1	Inspektorat
4.02.4.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Proporsi personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	90,0	%	90,0	90,8	90,0	122,0	90,0	266,5	90,0	177,5	90,0	177,5	Inspektorat
4.02.4.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu	100,0	%	100,0	140,2	100,0	142,0	100,0	148,3	100,0	75,3	100,0	75,3	Inspektorat
4.02.4.02.01.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Penurunan angka temuan		%		705,9	61,0	675,0				491,6	-	491,6	Inspektorat

		Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPIP dengan baik		%			60,0						-	-	
4.02.4.02.01.20	Program Peningkatan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah									33,5			-	-	Inspektorat
4.02.4.02.01.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase pegawai pejabat fungsional yang bersertifikat teknis substantif		%		285,6	80,0	160,0				112,2	-	112,2	Inspektorat
4.02.4.02.01.21	Program Peningkatan Kapabilitas APIP	Persentase OPD yang mengimplementasikan SPIP dengan baik		%						275,0			-	-	Inspektorat
4.02.4.02.01.61	Program Peningkatan Pelaksanaan Sistem pengendalian Pemerintah	Persentase OPD yang mengimplementasikan SPIP dengan baik		%						390,1			-	-	Inspektorat
4.02.4.02.01.62	Program Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan APIP	Persentase rekomendasi hasil temuan APIP dengan status tindak lanjut selesai		%						128,3			-	-	Inspektorat
4.02.4.02.01.66	Program Percepatan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan APIP	Persentase rekomendasi hasil temuan APIP dengan status tindak lanjut selesai		%			56,0	96,0					-	-	Inspektorat
4.02.4.02.01.67	Program Peningkatan Kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Prosentase Hasil nilai evaluasi dan reuiu LAKIP meningkat		%			71,0	57,0		81,7			-	-	Inspektorat
													-	-	
4.04.4.04.02.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran		%	80,0	360,0	80,0	470,0	80,0	413,0	80,0	563,5	80,0	563,5	DISPENDA/BA PENDA

4.04.4.04.02.02	Program peningkatan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak		%	85,0	530,0	85,0	410,0	85,0	550,0	85,0	1.109,4	85,0	1.109,4	DISPENDA/BA PENDA	
4.04.4.04.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan aparatur yang disiplin memakai atribut kedinasan		%	-	-	-	-	85,0	12,0	85,0	12,5	85,0	12,5	BAPENDA	
4.04.4.04.02.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM		%	80,0	20,0	80,0	37,0	80,0	17,0	80,0	36,9	80,0	36,9	DISPENDA/BA PENDA	
4.04.4.04.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase tersusunnya laporan kinerja, keuangan, kepegawaian dan barang secara tepat waktu		%	80,0	75,0	80,0	75,0	80,0	6,0	80,0	105,0	80,0	105,0	DISPENDA/BA PENDA	
1.20.1.20.06.17	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	100,0	%	100,0	2.897,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Dispenda	
4.04.4.04.02.23	Peningkatan Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	10,0	%	-	-	10,0	545,0	4,0	1322,67	4,0	2618,94	4,0	2618,94	BAPENDA	
4.04.4.04.02.24	Peningkatan Pelayanan dan Penagihan Pajak Daerah	Persentase tertagihnya pajak daerah	75,0	%	-	-	75,0	541,9	-	-	-	-	-	-	BAPENDA	
		Persentase Penanganan Pengaduan Keberatan	75,0	%	-	-	75,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Rasio Kepuasan Wajib Pajak Daerah	-	%	-	-	-	-	-	-	-	80,0	1307,5	80,0	1307,5	BAPENDA
		Rasio Kepatuhan Wajib Pajak	-	%	-	-	-	-	-	-	-	83,3	-	83,3	-	
4.04.4.04.02.24	Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah	Indeks kepuasan pelayanan Bapenda	-	Indeks	-	-	-	-	65,0	208,82	-	-	-	-	BAPENDA	
4.04.4.04.02.25	Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan	Persentase Penerimaan PBB	77,0	%	-	-	77,0	953,4	-	-	-	-	-	-	BAPENDA	

4.04.4.04.02.26	Peningkatan Administrasi Pendapatan Daerah	Persentase SKPD yg tepat waktu pencatatan penerimaan pendapatan daerah	70,0	%	-	-	70,0	918.99	-	-	-	-	-	-	BAPENDA
4.04.4.04.02.27	Penagihan dan Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah	Rasio kepatuhan pembayaran pajak daerah	-	%	-	-	-	-	83,1	119.93	-	-	-	-	BAPENDA
		Nilai akuntabilitas kinerja	CC	Range	B		B		B		B		B		
4.01.4.01.03.68	Program Peningkatan capaian Reformasi Birokrasi	Persentase capaian program-program pendukung reformasi birokrasi	NA	%	-	-	50,0	106,0	50,0	100,0	-	-	-	-	Bag Organisasi
4.01.4.01.03.51	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase OPD yang mendapat nilai SAKIP B	10,0	%			60,0	128,0	100,0	300,0	100,0	600,0	100,0	600,0	Bag Organisasi
4.01.4.01.03.81	Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Ketatalaksanaan	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Ketatalaksanaan		%	80,0	225,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Bag Organisasi
		Persentase SKPD/UPP yang sudah melaksanakan standar pelayanan, maklumat pelayanan, skm, pengelolaan pengaduan dan sistem informasi pelayanan publik		%	-	-	80,0	215,0	80,0	400,0	80,0	1.270,0	80,0	1.270,0	Bag Organisasi
1.20.1.20.03.83	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Pengembangan dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan, Pengembangan dan Akuntabilitas Kinerja		%	70,0	420,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Bag Organisasi
4.01.4.01.03.70	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Persentase OPD yang organisasinya tepat fungsi dan ukuran		%	-	-	80,0	46,0	80,0	25,0	-	-	-	-	Bag Organisasi
4.01.4.01.03.82	Program Penataan dan Pengembangan Jabatan	Meningkatnya Penataan dan Pengembangan Jabatan		%	80,0	145,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Bag Organisasi

		Persentase jabatan sesuai dengan analisa dan evaluasi jabatan OPD		%	-	-	85,0	321,0	85,0	200,0	85,0	800,0	85,0	800,0	Bag Organisasi
4.01.4.01.03.46	Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat	meningkatkan kinerja pembangunan bidang Kesra		%	80,0	95,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Kesra dan Masyarakatan
		Persentase keberhasilan pembinaan Kesra		%	-	-	75,0	65,0	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Kesra dan Masyarakatan
		Persentase rekomendasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah		%							75,0	1.800,0	75,0	1.800,0	Bagian Adm. Kesra dan Masyarakatan
		Persentase rekomendasi kebijakan bidang kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah									75,0		75,0	-	Bagian Adm. Kesra dan Masyarakatan
4.01.4.01.03.46	Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakatan	Persentase rekomendasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah		%	-	-	-	-	80,0	1.600,0	-	-	-	-	Bagian Adm. Kesra dan Masyarakatan
		Persentase rekomendasi kebijakan bidang kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah		%	-	-	-	-	80,0			-	-	-	-
4.01.4.01.03.80	Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Keagamaan	Persentase keberhasilan pembinaan keagamaan		%	80,0	943,0	80,0	2.095,0	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Kesra dan Masyarakatan

4.01.4.01.03.84	Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Kemasyarakatan	meningkatkan kinerja pembangunan bidang kemasyarakatan		%	80,0	105,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan
		Persentase keberhasilan pembinaan kemasyarakatan		%	-	-	75,0	103,0	-	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.03.45	Program Peningkatan Administrasi Pembangunan	Prosentase Tingkat Pelayanan Administrasi Pembangunan		%	0,8	803,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Pembangunan
4.01.4.01.03.45	Peningkatan administrasi pembangunan daerah	Tingkat Produktifitas penyusunan peraturan daerah dan sejenisnya		%	-	-	20,0	120,0	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Pembangunan
		Persentase rekomendasi kebijakan bidang pembangunan yg ditindaklanjuti Perangkat daerah		%	-	-	-	-	-	-	80,0	777,0	80,0	777,0	Bagian Adm. Pembangunan
		persentase realisasi perangkat daerah yang mencapai 80%		%	-	-	-	-	-	-	80,0	-	80,0	-	
4.01.4.01.03.45	Peningkatan Kinerja Bidang Pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pembangunan yg ditindaklanjuti Perangkat daerah		%	-	-	-	-	80,0	173,0	-	-	-	-	Bagian Adm. Pembangunan
		persentase realisasi perangkat daerah yang mencapai 80%		%	-	-	-	-	80,0	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Pembangunan
4.01.4.01.03.45	Pembinaan tata kelola administrasi pembangunan daerah	Tingkat efektivitas koordinasi, sosialisasi dan pembinaan tata kelola pelaksanaan administrasi pembangunan daerah		%	-	-	20,0	205,0	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Pembangunan

4.01.4.01.03.40	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	%	80,0	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Perekonomian dan SDA
		persentase penyaluran modal usaha bagi usaha mikro kecil	%	-	-	80,0	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.20.1.20.03.49	Program Peningkatan Kinerja Pembangunan bidang Ekonomi	Meningkatnya Kinerja Pembangunan bidang Ekonomi	%	80,0	190,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Perekonomian dan SDA
1.20.1.20.03.48	Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam	%	80,0	135,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Perekonomian dan SDA
4.01.4.01.03.19	Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam	Prosentase SKPD yang menindak lanjuti hasil kegiatan bidang ekonomi dan SDA	%	-	-	85,0	443,1	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Perekonomian dan SDA
		Persentase rekomendasi kebijakan bidang ekonomi dan SDA yang ditindaklanjuti perangkat daerah	%	-	-	-	-	85,0	298,3	85,0	1.170,0	85,0	1.170,0	-	Bagian Adm. Perekonomian dan SDA
4.01.4.01.03.23	Program Perumusan Kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen perumusan/Analisa Kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Dok	-	-	4,0	174,5	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Perekonomian dan SDA
4.01.4.01.03.41	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang cukai yang disampaikan kepada masy dan atau pemangku kepentingan	pasal	-	-	4,0	300,0	4,0	490,0	4,0	375,0	4,0	375,0	-	Bagian Adm. Perekonomian dan SDA

4.01.4.01.03.63	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	pengendalian peredaran barang kena cukai (rokok) ilegal		%	80,0	227,5	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Perekonomian dan SDA	
		Prosentase temuan barang kena cukai ilegal		%	-	-		20,0	50,0	20,0	50,0			-	-	Bagian Adm. Perekonomian dan SDA
		Prosentase temuan hasil industri tembakau kena cukai ilegal										10,0	60,0	10,0	60,0	
1.20.1.20.03.62	Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan SDA	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan SDA		%	80,0	107,5	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Perekonomian dan SDA	
1.20.1.20.03.10.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Tingkat efektivitas koordinasi, sosialisasi dan pembinaan tata kelola pelaksanaan administrasi pembangunan daerah		%	20,0	600,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Kerjasama	
4.01.4.01.03.64	Program Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Pemerintah Daerah	terwujudnya kerjasama daerah yang fungsional dan akuntabel		%	-	-	20,0	95,0	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm Pemerintahan	
4.01.4.01.03.44	Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindakan kriminal	Terkendalinya kantrantibmas dan tindak kriminal		%	100,0	621,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Pemerintahan Umum	
		Meningkatnya Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindakan kriminal		%	-	-		100,0	198,0	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Pemerintahan
1.20.1.20.03.52	Program Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Bidang Pengawasan dan Otonomi Daerah	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Bidang Pengawasan dan Otonomi Daerah	Peningkatan Kinerja pemerintah daerah	%	100,0	203,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Pemerintahan Umum	

4.01.4.01.03.17	Program Peningkatan dalam bidang pengawasan dan OTODA	Meningkatnya Peningkatan dalam bidang pengawasan dan OTODA		%	-	-	80,0	295,0	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Pemerintahan
4.01.4.01.03.18	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan		%	-	-	80,0	35,0	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Pemerintahan
4.01.4.01.03.87	Program Peningkatan Kinerja Bidang Pemerintahan	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti perangkat daerah		%	-	-	-	-	80,0	705,0	-	-	-	-	Bagian Adm. Pemerintahan
4.01.4.01.03.87	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti		%	-	-	-	-	-	-	100,0	1.165,0	100,0	1.165,0	Bagian Adm. Pemerintahan
4.10.4.01.03.54	Program Fasilitasi Penunjang Kedinasan KDH / WAKIL KDH	Meningkatnya Fasilitasi Penunjang Kedinasan KDH / WAKIL KDH		%	80,0	268,0	80,0	353,0	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Pemerintahan
1.20.1.20.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		%	80,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Pemerintahan Umum
1.20.1.20.03.53	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Bidang Trantib, Penanggulangan Bencana dan Linmas	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Bidang Trantib, Penanggulangan Bencana dan Linmas		%	100,0	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Pemerintahan Umum
2.04.4.01.03.16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Meningkatnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		%	100,0	245,0	100,0	755,0	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Pemerintahan Umum
1.20.1.20.03.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pimpinan eksekutif dan legeslatif		%	100,0	108,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Pemerintahan Umum

2.07.4.01.03.15	Program peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat	Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan		%	100,0	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Pemerintahan Umum
2.07.4.01.03.17	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	terwujudnya partisipasi masy dalam pembangunan kelurahan		%	-	-	100,0	75,0	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Pemerintahan
4.01.4.01.03.25	Program Peningkatan Kerjasama Daerah	Tercapainya kerjasama yang saling menguntungkan		%	-	-	100,0	309,0	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Pemerintahan
4.04.4.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	-	%	100,0	751,8	100,0	652,9	100,0	564,7	100,0	572,5	100,0	572,5	BPKA
4.04.4.04.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak	-	%	100,0	561,2	100,0	477,0	100,0	596,7	100,0	599,9	100,0	599,9	BPKA
4.04.4.04.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Proporsi personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	-	%	100,0	25,7	100,0	37,8	100,0	22,6	100,0	22,6	100,0	22,6	BPKA
4.04.4.04.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu	-	%	100,0	82,5	100,0	75,0	100,0	43,8	100,0	63,7	100,0	63,7	BPKA
1.20.1.20.01.16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah	Persentase aset tanah yang memiliki nilai	-	%	-	-	-	-	100,0	53,9	-	-	-	-	BPKA
1.20.1.20.01.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan keuangan daerah	-	%	100,0	4.353,5	-	-	-	-	-	-	-	-	BPKA

4.04.4.04.01.20	Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan	Persentase jumlah PD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	-	%	-	-	100,0	1.646,8	100,0	1.427,5	100,0	1.310,6	100,0	1.310,6	BPKA
4.04.4.04.01.21	Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran	Persentase jumlah PD yang menyelesaikan penyusunan dokumen anggaran dengan benar dan tepat waktu	-	%	-	-	100,0	1.623,6	100,0	726,3	100,0	524,4	100,0	524,4	BPKA
4.04.4.04.01.22	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase jumlah PD yang menyampaikan laporan barang milik daerah tepat waktu	-	%	-	-	100,0	1.576,4	100,0	1.246,8	100,0	987,7	100,0	987,7	BPKA
		Persentase aset tanah yang diajukan permohonan pensertifikatan	-	%	-	-	-	-	4,6	-	9,2	-	9,2	-	
		Persentase aset tanah dan atau bangunan yang dimanfaatkan	-	%	-	-	-	-	88,1	-	92,7	-	92,7	-	
4.05.4.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	90,0	%	90,0	312,2	90,0	518,0	90,0	278,8	90,0	376,6	90,0	376,6	BKD
4.05.4.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak	90,0	%	90,0	536,7	90,0	298,7	90,0	498,6	90,0	502,7	90,0	502,7	BKD
4.05.4.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Proporsi personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	90,0	%	90,0	1.926,2	90,0	34,8	90,0	32,8	90,0	33,0	90,0	33,0	BKD

4.05.4.05.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu	100,0	%	100,0	75,0	100,0	76,5	100,0	75,0	100,0	75,0	100,0	75,0	BKD
4.05.4.05.01.15	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur		%	-	-	100,0	1.104,2	-	-	100,0	3.587,8	100,0	3.587,8	BKD
		Persentase aparatur yang mengikuti diklat dengan predikat memuaskan		%							81,0	3.587,8	81,0	3.587,8	
		Persentase terupdate data aparatur		%							85,5		85,5	-	
		Persentase nilai SKP diatas 78		%							81,0		81,0	-	
4.05.4.05.01.16	Program Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur	Survey kepuasan aparatur terhadap pelayanan kepegawaian		%							81,0		81,0	-	BKD
4.05.4.05.01.17	Program Pelayanan Data Kepegawaian dan Pengadaan SDM Aparatur	Meningkatnya pelayanan data kepegawaian		%	-	-	100,0	783,8	-	-			-	-	BKD
4.05.4.05.01.18	Program Penyelenggaraan Pelayanan Manajemen Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat dengan predikat memuaskan		%	-	-	80,0	1.132,5	-	-	-	-	-	-	BKD
		Persentase terupdate data aparatur		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Persentase nilai SKP diatas 78		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Survey kepuasan aparatur terhadap pelayanan kepegawaian		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Persentase pejabat yang ditempatkan sesuai kompetensi		%							81,0	2.435,0	81,0	2.435,0	

		Persentase JFT yang ditempatkan sesuai kompetensi		%							81,0		81,0	-	
		Persentase formasi yang terisi		%							81,0		81,0	-	
1.20.1.20.01.45	Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur		%	100,0	3.532,8						-	-	-	BKD
4.05.4.05.01.46	Program Penataan Aparatur	Persentase pejabat yang ditempatkan sesuai kompetensi		%	-	-	-	-	80,0	2.636,0		-	-	-	BKD
		Persentase JFT yang ditempatkan sesuai kompetensi		%	-	-	-	-	80,0			-	-	-	
		Persentase formasi yang terisi		%	-	-	-	-	80,0			-	-	-	
4.05.4.05.01.47	Program Peningkatan kompetensi dan Kesejahteraan Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat dengan predikat memuaskan		%	-	-	-	-	80,0	3.243,9		-	-	-	BKD
		Persentase terupdate data aparatur		%	-	-	-	-	85,0			-	-	-	
		Persentase nilai SKP diatas 78		%	-	-	-	-	80,0			-	-	-	
		Survey kepuasan aparatur terhadap pelayanan kepegawaian		%	-	-	-	-	80,0			-	-	-	
4.03.4.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	90,0	%	90,0	797,4	90,0	796,9	90,0	497,7	90,0	527,9	90,0	527,9	Bappeda/ Bappelitbangd a
4.03.4.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak	90,0	%	90,0	584,3	90,0	321,9	90,0	484,8	90,0	486,7	90,0	486,7	Bappeda/ Bappelitbangd a

4.03.4.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Proposisi personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	90,0	%	90,0	14,7	90,0	32,2	90,0	18,1	90,0	17,0	90,0	17,0	Bappeda/ Bappelitbangd a
4.03.4.03.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu	100,0	%	100,0	75,0	100,0	75,0	100,0	27,5	100,0	59,0	100,0	59,0	Bappeda/ Bappelitbangd a
1.06.1.06.01.16	Program Penataan Tata Ruang	Meningkatnya penataan tata ruang	85,0	%	85,0	465,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
1.06.1.06.01.18	Program kerjasama Pembangunan	Meningkatnya kerjasama pembangunan	85,0	%	85,0	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
4.03.4.03.01.18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Meningkatnya perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	-	%	-	-	85,0	687,0	-	-	-	-	-	-	Bappelitbangd a
4.03.4.03.01.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah	85,0	%	85,0	898,8	85,0	917,0	-	-	-	-	-	-	Bappeda/ Bappelitbangd a
4.03.4.03.01.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya perencanaan pembangunan ekonomi	85,0	%	85,0	237,5	85,0	401,2	-	-	-	-	-	-	Bappeda/ Bappelitbangd a
		Persentase kegiatan PD bidang ekonomi yang diakomodir dalam RKPD	-	%	-	-	-	-	86,7	109,6	-	-	-	-	
		Persentase ketercapaian kinerja outcome PD bidang ekonomi	-	%	-	-	-	-	-	63,7	-	-	-	-	
		Persentase ketercapaian kinerja daerah bidang ekonomi	-	%	-	-	-	-	-	61,3	-	-	-	-	

		Persentase laporan monev PD bidang ekonomi yang tepat waktu	-	%	-	-	-	72,6				-	-		
		Persentase usulan musrenbang kota yang masuk dalam perencanaan bidang ekonomi	-	%	-	-	-	-	-	23,2	292,3	23,2	292,3		
		Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD bidang ekonomi	-	%	-	-	-	-	-	85,5		85,5	-		
		Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD bidang ekonomi	-	%	-	-	-	-	-	81,9		81,9	-		
		Persentase ketercapaian kinerja program PD bidang ekonomi	-	%	-	-	-	-	-	86,5		86,5	-		
1.06.1.06.01.23	Program Perencanaan Sosial Budaya	Meningkatnya perencanaan sosial budaya	85,0	%	85,0	316,0						-	-	Bappeda	
4.03.4.03.01.23	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	Meningkatnya perencanaan pembangunan sosial budaya		%			85,0	740,0	-	-	-	-	-	Bappeda/ Bappelitbangda	
4.03.4.03.01.23	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan	Persentase kegiatan PD bidang sosial budaya dan pemerintahan yang diakomodir dalam RKPD	-	%	-	-	-	-	85,0	605,7		-	-	Bappelitbangda	
		Persentase ketercapaian kinerja outcome PD bidang sosial budaya dan pemerintahan	-	%	-	-	-	-	74,0		-	-	-	-	
		Persentase ketercapaian kinerja daerah bidang sosial budaya dan	-	%	-	-	-	-	76,0		-	-	-	-	

		pemerintahan													
		Persentase laporan monev PD bidang sosial budaya dan pemerintahan yang tepat waktu	-	%	-	-	-	80,0	-	-	-	-	-	-	
		Persentase usulan musrenbang kota yang masuk dalam perencanaan bidang sosial budaya dan pemerintahan	-	%	-	-	-	-	-	22,0	630,4	22,0	630,4		
		Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD bidang sosial budaya dan pemerintahan	-	%	-	-	-	-	-	86,0		86,0	-		
		Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD bidang sosial budaya dan pemerintahan	-	%	-	-	-	-	-	84,0		84,0	-		
		Persentase ketercapaian kinerja program PD bidang sosial budaya dan pemerintahan	-	%	-	-	-	-	-	80,0		80,0	-		
4.03.4.03.01.24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Meningkatnya prasarana wilayah dan sumber daya alam	85,0	%	85,0	968,8	85,0	1.346,5					-	-	Bappeda/ Bappelitbangda
		Persentase kegiatan PD bidang pengembangan wilayah perkotaan yang diakomodir dalam RKPD	-	%	-	-	-	80,0	837,0				-	-	

		Persentase ketercapaian kinerja outcome PD bidang pengembangan wilayah perkotaan	-	%	-	-	-	85,0	-	-	-	-	-	
		Persentase ketercapaian kinerja daerah bidang pengembangan wilayah perkotaan	-	%	-	-	-	85,0	-	-	-	-	-	
		Persentase laporan monev PD bidang pengembangan wilayah perkotaan yang tepat waktu	-	%	-	-	-	85,0	-	-	-	-	-	
		Persentase usulan musrenbang kota yang masuk dalam perencanaan bidang pengembangan wilayah perkotaan	-	%	-	-	-	-	-	25,0	805,0	25,0	805,0	
		Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD bidang pengembangan wilayah perkotaan	-	%	-	-	-	-	-	82,0		82,0	-	
		Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD bidang pengembangan wilayah perkotaan	-	%	-	-	-	-	-	85,0		85,0	-	
		Persentase ketercapaian kinerja program PD bidang pengembangan wilayah perkotaan	-	%	-	-	-	-	-	86,0		86,0	-	
4.03.4.03.01.26	Program Perencanaan Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Meningkatnya perencanaan pembiayaan pembangunan	-	%			85,0	108,6	-	-	-	-	-	Bappelitbangda

		infrastruktur daerah													
4.03.4.03.01.30	Program Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya monitoring dan evakuasi kinerja perencanaan pembangunan daerah	80,0	%	85,0	363,5	85,0	478,5	-	-	-	-	-	-	Bappeda/ Bappelitbangda
4.03.4.03.01.32	Program Kajian Studi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Meningkatnya kajian studi perencanaan pembangunan sosial budaya	80,0	%	85,0	252,3	85,0	437,0	-	-	-	-	-	-	Bappeda/ Bappelitbangda
1.06.1.06.01.37	Program Kajian Studi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Meningkatnya kajian studi perencanaan pembangunan ekonomi	-	%	85,0	72,0			-	-	-	-	-	-	Bappelitbangda
4.03.4.03.01.40	Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang dianggarkan dalam kegiatan PD	-	%	-	-	-	-	33,4	710,9	40,0	678,0	40,0	678,0	Bappelitbangda
		Tingkat keselarasan RKPD dengan Renja PD	-	%	-	-	-	-	47,3		90,0		90,0	-	
4.07.4.03.01.16	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil litbang oleh stakes holder	-	%	-	-	-	-	80,3	370,0	88,1	522,0	88,1	522,0	Bappelitbangda
	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	NA	Indeks	NA		81,2		82,2		82,8		82,8		
4.01.4.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	80,0	%	85,0	16.886,0	80,0	8.238,0	80,0	8.054,0	100,0	7.166,0	100,0	7.166,0	SETDA; Bagian Umum & SKPD
4.01.4.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak	80,0	%	85,0	8.807,0	80,0	7.820,0	80,0	5.631,0	100,0	9.827,0	100,0	9.827,0	SETDA; Bagian Umum & SKPD

4.01.4.01.03.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan aparatur yang disiplin memakai atribut kedinasan		%	80,0	3.056,0	80,0	1.609,0	80,0	1.679,0	100,0	1.858,0	100,0	1.858,0	SETDA; Bagian Umum & SKPD	
4.01.4.01.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kualitas kerohanian PNS			80,0	13,0	80,0	46,0	80,0				-	-	SETDA	
		Persentase disiplin pegawai Setda			-	-	-							-	-	
		Persentase personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM		%						62,3	17.021,0	67,5	17.717,0	67,5	17.717,0	SETDA
4.01.4.01.03.06	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase tersusunnya laporan kinerja, keuangan, kepegawaian dan barang secara tepat waktu		%	90,0	50,0	80,0	49,0	80,0	20,0	100,0	22,0	100,0	22,0	SETDA; Bagian Umum	
4.01.4.01.03.16	Program Peningkatan Pelayanan Komunikasi Pimpinan dan Keprotokolan	SKM Layanan Komunikasi Pimpinan dan Keprotokolan		%	-	-	-	-	80,0	913,0	85,0	951,0	85,0	951,0	SETDA	
4.01.4.01.03.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	terumuskannya program pembentukan peraturan daerah		%	90,0	750,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Hukum	
		persentase rancangan kebijakan yang ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan		%	-	-	85,0	705,0	85,0	364,0	85,0	500,0	85,0	500,0	Bagian Hukum	
4.01.4.01.03.50	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Tersedianya bahan referensi bagi SKPD dalam melaksanakan tugas		%	90,0	231,5	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Hukum	
		persentase rancangan kebijakan yang ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan		%	-	-	85,0	282,0	-	-	-	-	-	-	Bagian Hukum	

		SKM pelayanan data produk hukum daerah		%	-	-	-	-	100,0	177,0	100,0	180,0	100,0	180,0	
4.01.4.01.03.55	Program Pembinaan dan Penyuluhan Hukum	persentase peningkatan pemahaman mengenai produk hukum		%	-	-	85,0	200,0	-	-	85,0	500,0	85,0	500,0	Bagian Hukum
4.01.4.01.03.55	Program Peningkatan Pemahaman Hukum, Bantuan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia	Persentase peningkatan pemahaman mengenai produk hukum			-	-	-	-	85,0	605,0	-	-	-	-	Bagian Hukum
4.01.4.01.03.57	Bantuan Hukum dan Perlindungan HAM	Persentase sengkata hukum yang ditindaklanjuti		%	-	-	85,0	237,0	-	-	-	-	-	-	Bagian Hukum
4.01.4.01.03.60	Peningkatan tertib administrasi pelaksanaan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah daerah	IKM pelayanan pengadaan barang dan jasa		%	-	-	90,0	365,0	-	-	-	-	-	-	Bagian Adm. Pembangunan/ BLP
		Persentase PD tertib administrasi pengadaan barang dan jasa		%	-	-	100,0		100,0	343,0	100,0	675,0	100,0	675,0	
		Persentase pejabat pengadaan barang dan jasa yang berkompeten		%	-	-	100,0		100,0		100,0		100,0	-	
		Tingkat efektifitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)			-	-								-	-
1.20.1.20.03.08	Program Fasilitas Penunjang Kedinasan Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Fasilitas Penunjang Kedinasan Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah	80,0	%	80,0	433,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Umum

1.20.1.20.03.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Meningkatnya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah		%	85,0	953,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
1.20.1.20.03.28	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Meningkatnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa		%	85,0	874,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
1.20.1.20.03.65	Program Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur Bidang Komunikasi Informasi dan Pemanfaatan TI	Meningkatnya Peningkatan Sumber Daya Aparatur Bidang Komunikasi Informasi dan Pemanfaatan TI		%	85,0	93,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
1.20.1.20.03.40	Program Kerjasama informasi dengan media masa	Meningkatnya Kerjasama informasi dengan media masa		%	85,0	926,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
1.20.1.20.03.64	Program Peningkatan Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya Informasi dan Komunikasi		%	85,0	200,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
4.01.4.01.03.16	Program Peningkatan Keprotokolan KDH/WKDH/Sekda	Meningkatnya pelayanan keprotokolan KDH / WKDH / Sekda		%	-	-	80,0	843,0	-	-	-	-	-	-	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Nilai survey kepuasan pelayanan kedinasan		angka							85,0	1.282,0	85,0	1.282,0	
4.01.4.01.03.65	Program Peningkatan Dokumentasi Pemerintah Daerah	Tersedianya Informasi dan dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah		%	-	-	80,0	345,0	-	-	-	-	-	-	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4.01.4.01.03.16	Program Peningkatan Pelayanan Komunikasi Pimpinan dan Keprotokolan	Nilai survey kepuasan pelayanan kedinasan		%	-	-	-	-	85,0	1.100,0	-	-	-	-	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

2.10.2.10.01.22	Program Peningkatan Kualitas Pemberitaan Daerah	Meningkatnya Informasi dan kerjasama dengan media massa		%	-	-	85,0	1.383,0	-	-	-	-	-	-	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
1.20.1.20.03.06.58	Program Fasilitasi Data dan Informasi	Meningkatnya Fasilitasi Data dan Informasi		%	71,0	121,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Pengelola Data Elektronik
1.20.1.20.03.06.59	Program Pembangunan Fasilitas E-Government	Meningkatnya Pembangunan Fasilitas E-Government		%	71,0	1.297,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Pengelola Data Elektronik
2.10.2.10.01.25	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Penunjang E-Government	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Penunjang E-Government		%	-	-	80,0	2.323,0	-	-	-	-	-	-	Bagian Pengelola Data Elektronik
2.10.2.10.01.26	Program Kebijakan pengembangan E-Government	Meningkatnya pengembangan E-Government		%	-	-	80,0	70,0	-	-	-	-	-	-	Bagian Pengelola Data Elektronik
1.20.1.20.03.06.65	Program Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur Bidang Komunikasi Informasi dan Pemanfaatan TI	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Bidang Komunikasi Informasi dan Pemanfaatan TI		%	-	-	80,0	42,0	-	-	-	-	-	-	Bagian Pengelola Data Elektronik
2.10.2.10.01.24	Program Pengembangan Data dan Aplikasi e-government	Meningkatnya Pengembangan Data dan Aplikasi e-government		data	-	-	390,0	161,0	-	-	-	-	-	-	Bagian Pengelola Data Elektronik
4.04.4.04.07.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		%	75,0	250,0	100,0	655,0	100,0	565,0	83,0	1.187,0	83,0	1.187,0	Kecamatan Bugul Kidul
4.04.4.04.07.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang layak			100,0	280,0	80,0	185,0	100,0	229,0	100,0	535,0	100,0	535,0	Kecamatan Bugul Kidul
4.04.4.04.07.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM			100,0	10,0	75,0	35,0	100,0	26,0	100,0	33,0	100,0	33,0	Kecamatan Bugul Kidul

4.04.4.04.07.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan yang tersusun		%	100,0	75,0	80,0	75,0	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Bugul Kidul
		Persentase dokumen kepegawaian dan barang yang tersusun			-	-	80,0	-	-	-	-	-	-	-	
		Persentase tersusunnya laporan kinerja, keuangan, kepegawaian dan barang secara tepat waktu			-	-	-	-	100,0	54,0	83,0	69,0	83,0	69,0	
4.01.4.01.07.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100,0	%	100,0	50,0	80,0	119,5	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Bugul Kidul
4.01.4.01.07.27	Program Peningkatan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan	persentase kelembagaan sosial yang diberdayakan	100,0	%	-	-	100,0	57,5	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Bugul Kidul
2.07.4.01.7.33	Program Peningkatan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan di Kecamatan Bugul Kidul	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	100,0	%	-	-	-	-	70,0	69,0	85,0	707,0	85,0	707,0	Kecamatan Bugul Kidul
4.01.4.01.07.29	Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kecamatan Bugul Kidul	Termotivasinya penyelenggaraan otonomi daerah secara maksimal	100,0	%	100,0	960,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Bugul Kidul
		Jumlah buku kecamatan dalam angka		buku	-	-	25,0	982,0	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah kelurahan yang beroperasi dan terkoordinir		Kelurahan	-	-	6,0	-	-	-	-	-	-	-	
		Persentase kelurahan berkembang di Kec.		%	-	-	-	-	-	70,0	44,0	-	-	-	-

		Bugul Kidul													
		Persentase layanan adm kependudukan dan capil yang diberikan sesuai standard		%	-	-	-	-	-	-	100,0	473,0	100,0	473,0	Kecamatan Bugul Kidul
		Persentase layanan adm umum yang diberikan sesuai standard		%	-	-	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-	
		Prosentase layanan adm perijinan yang diberikan sesuai standard		%	-	-	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-	
4.01.4.01.07.33	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase usulan musrenbangcam yang disepakati dalam RKPD	100,0	%	100,0	85,8	80,0	85,8	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Bugul Kidul
4.01.4.01.7.96	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Bugul Kidul	Jumlah usulan musrenbang kecamatan Bugul Kidul	100,0	%	-	-	-	-	70,5	279,0	-	-	-	-	Kecamatan Bugul Kidul
		Persentase usulan musrenbangcam yang disepakati dalam forum SKPD		%	-	-	-	-	-	-	70,5	312,0	70,5	312,0	Kecamatan Bugul Kidul
4.01.4.01.07.34	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	persentase kejadian bencana alam yang ditanggulangi	100,0	%	100,0	25,0	100,0	27,5	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Bugul Kidul
1.05.4.01.07.96	Program Penanggulangan Bencana Alam Kecamatan Bugul Kidul	persentase kejadian bencana alam yang ditanggulangi	100,0	%	-	-	-	-	100,0	40,0	-	-	-	-	Kecamatan Bugul Kidul

1.05.4.01.7.42	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam Kecamatan Bugul Kidul	Prosentase Kejadian Bencana yang ditanani sesuai waktu tanggap	100,0	%	-	-	-	-	-	-	100,0	53,0	100,0	53,0	Kecamatan Bugul Kidul
4.01.4.01.07.35	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase tindak lanjut atas laporan trantibmas di Kecamatan	100,0	%	95,0	132,8	80,0	132,8	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Bugul Kidul
4.01.4.01.07.97	Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan Bugul Kidul	Jumlah pengaduan publik bidang keamanan dan ketertiban yang dilayani	12,0	pengaduan	-	-	-	-	12,0	68,5	-	-	-	-	Kecamatan Bugul Kidul
1.05.4.01.7.46	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kecamatan Bugul Kidul	Persentase pengaduan trantib yang ditangani secara tepat waktu	100,0	%	-	-	-	-	-	-	83,0	338,0	83,0	338,0	Kecamatan Bugul Kidul
4.01.4.01.07.36	Program Model Kelembagaan Sosial Kecamatan Bugul Kidul	persentase kelembagaan sosial yang diberdayakan	100,0	%	100,0	411,0	100,0	420,0	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Bugul Kidul
													-	-	
4.04.4.04.08.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	80,0	%	75,0	275,0	100,0	684,0		588,0		1.300,0		1.300,0	Kecamatan Purworejo
4.04.4.04.08.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang layak	80,0	%	100,0	980,0	80,0	169,0		210,0		577,0		577,0	Kecamatan Purworejo
4.04.4.04.08.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	80,0	%	100,0	11,0	75,0	37,0		29,0		40,0		40,0	Kecamatan Purworejo
4.04.4.04.08.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan yang tersusun			100,0	75,0	80,0	75,0		-		-		-	Kecamatan Purworejo

		Persentase dokumen kepegawaian dan barang yang tersusun		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Persentase tersusunnya laporan kinerja, keuangan, kepegawaian dan barang secara tepat waktu		-	-	-	-	-	-	42,0		80,0	-	80,0		
4.01.4.01.08.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	80,0	%	100,0	25,0	100,0	95,0	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Purworejo	
4.01.4.01.08.27	Program Peningkatan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan	persentase kelembagaan sosial yang diberdayakan	80,0	%	-	-	100,0	68,0	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Purworejo	
2.07.4.01.08.32	Program Peningkatan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan di Kecamatan Purworejo	Persentase kelembagaan masyarakat yang aktif	100,0	%	-	-	-	-	v	763,0	v	1.200,0	v	1.200,0	Kecamatan Purworejo	
4.01.4.01.08.30	Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kecamatan Purworejo	Termotivasinya penyelenggaraan otonomi daerah secara maksimal	80,0	%	100,0	1.345,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Purworejo	
		Jumlah buku kecamatan dalam angka	25,0	buku			25,0	1.345,0						-	-	
		Jumlah kelurahan yang beroperasi dan terkoordinir	7,0	kelurahan				7,0			-	-	-	-	-	
		Persentase kelurahan berkembang di Kec. Bugul Kidul		%	-	-	-	-	-	-	1,3			-	-	

		Persentase layanan adm kependudukan dan capil yang diberikan sesuai standard	80,0	%	-	-	-	-	-	-	100,0	767,0	100,0	767,0	
		Persentase layanan adm umum yang diberikan sesuai standard	80,0	%	-	-	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-	
		Prosentase layanan adm perijinan yang diberikan sesuai standard	80,0	%	-	-	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-	
4.01.4.01.08.33	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatnya partisipasi dan usulan masyarakat dalam pembangunan	80,0	%	100,0	65,0	100,0	87,0	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Purworejo
4.01.4.01.08.74	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Purworejo	Meningkatnya partisipasi dan usulan masyarakat dalam pembangunan	80,0	%	-	-	-	-	v	569,0	-	-	-	-	Kecamatan Purworejo
		persentase usulan musrenbangcam yang disepakati dalam forum SKPD	80,0	%	-	-	-	-	-	-	-	70,0	350,0	70,0	350,0
4.01.4.01.08.34	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	persentase kejadian bencana alam yang ditanggulangi	100,0	%	100,0	33,0	100,0	50,0	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Purworejo
1.05.4.01.08.75	Program Penanggulangan Bencana Alam Kecamatan Purworejo	persentase kejadian bencana alam yang ditanggulangi	100,0	%	-	-	-	-	100,0	25,0	-	-	-	-	Kecamatan Purworejo
1.05.4.01.08.43	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam Kecamatan Purworejo	persentase kejadian bencana alam yang ditangani sesuai waktu tanggap	100,0	%	-	-	-	-	-	-	100,0	102.63	100,0	102.63	Kecamatan Purworejo
4.01.4.01.08.35	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan	persentase tindak lanjut atas laporan trantibmas di	100,0	%	100,0	65,0	100,0	116,0	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Purworejo

	Lingkungan	kecamatan													
4.01.4.01.08.76	Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan Purworejo	Jumlah pengaduan publik bidang keamanan dan ketertiban yang dilayani		pengaduan	-	-	-	-	v	486,0	-	-	-	-	Kecamatan Purworejo
1.05.4.01.08.47	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kecamatan Purworejo	Persentase pengaduan transtib yang ditangani secara tepat waktu	100,0	%	-	-	-	-	-	-	100,0	370,0	100,0	370,0	Kecamatan Purworejo
4.01.4.01.08.37	Program Model Kelembagaan Sosial Kecamatan Purworejo	persentase kelembagaan sosial yang diberdayakan	100,0	%	100,0	465,0	100,0	264,0	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Purworejo
4.01.4.01.05.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	80,0	%	90,0	490,0	100,0	614,0	100,0	524,0	100,0	1,2	100,0	1,2	Kecamatan Gadingrejo
4.01.4.01.05.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi layak	80,0	%	90,0	422,0	85,0	178,0	85,0	360,0	85,0	728,0	85,0	728,0	Kecamatan Gadingrejo
4.01.4.01.05.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase personil yang mengikuti peningkatan kapasitas sdm	80,0	%	90,0	19,0	75,0	41,0	75,0	31,0	75,0	34,0	75,0	34,0	Kecamatan Gadingrejo
4.01.4.01.05.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, lap capaian kinerja dan keuangan yg tersusun	80,0	%	90,0	75,0	89,0	75,0	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Gadingrejo
		Persentase dokumen kepegawaian dan barang yang tersusun		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Persentase tersusunnya laporan kinerja, keuangan, kepegawaian dan barang secara tepat waktu		%	-	-	-	-	90,0	45,0	90,0	76,0	90,0	76,0	

4.01.4.01.05.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100,0	%	90,0	116,0	100,0	96,0	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Gadingrejo	
4.01.4.01.05.27	Program Peningkatan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan	persentase kelembagaan sosial yang diberdayakan	100,0	%	-	-	85,0	63,0	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Gadingrejo	
2.07.4.01.5.34	Program Peningkatan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan di Kecamatan Gadingrejo	Persentase kelembagaan masyarakat yang aktif	100,0	%	-	-			100,0	574,0	75,0	900,0	75,0	900,0	Kecamatan Gadingrejo	
4.01.4.01.05.31	Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kecamatan Gadingrejo	Termotivasinya penyelenggaraan otonomi daerah secara maksimal	100,0	%	90,0	1,3			-	-	-	-	-	-	Kecamatan Gadingrejo	
		jumlah buku kecamatan dalam angka	25,0	buku			25,0	1.358,0	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Gadingrejo	
		jumlah kelurahan yang beroperasi dan terkoordinir	8,0	kelurahan			8,0		-	-	-	-	-	-		
		Persentase kelurahan berkembang di kecamatan gadingrejo		%	-	-	-	-	100,0	1.307,0				-	-	
		Persentase layanan adm kependudukan dan capil yang diberikan sesuai standard	80,0	%	-	-	-	-	-	-	100,0	679,0	100,0	679,0		
		Persentase layananadm umum yang diberikan sesuai standard	80,0	%	-	-	-	-	-	-	100,0		100,0	-		

		Prosentase layanan adm perijinan yang diberikan sesuai standard	80,0	%	-	-	-	-	-	-	100,0		100,0	-	
4.01.4.01.05.33	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	persentase usulan musrenbangcam yang disepakati dalam RKPD	70,0	%	90,0	98,0	70,0	101,0					-	-	Kecamatan Gadingrejo
4.01.4.01.05.72	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Gadingrejo	Jumlah usulan musrenbang kecamatan		usulan	-	-	-	-	125,0	561,0			-	-	Kecamatan Gadingrejo
		persentase usulan musrenbangcam yang disepakati dalam forum SKPD		%	-	-	-	-				71,0	388,0	71,0	388,0
4.01.4.01.05.34	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Persentase kejadian bencana alam yang ditanggulangi	100,0	%	90,0	119,0	100,0	191,0		-			-	-	Kecamatan Gadingrejo
4.01.4.01.05.71	Program Penanggulangan Bencana Alam Kecamatan Gadingrejo	Persentase kejadian bencana alam yang ditanggulangi	100,0	%	-	-	-	-	100,0	144,0			-	-	Kecamatan Gadingrejo
1.05.4.01.5.44	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam Kecamatan Gadingrejo	Persentase kejadian bencana alam yang ditangani sesuai waktu tanggap	100,0	%	-	-	-	-			100,0	103,0	100,0	103,0	Kecamatan Gadingrejo
4.01.4.01.05.35	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	persentase tindak lanjut atas laporan trantibmas di kecamatan	100,0	%	90,0	148,0	100,0	128,0		-	-	-	-	-	Kecamatan Gadingrejo
4.01.4.01.05.89	Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan Gadingrejo	Jumlah pengaduan publik bidang pelayanan keamanan dan ketertiban yg dilayani		pengaduan	-	-	-	-	20,0	270,0			-	-	Kecamatan Gadingrejo
1.05.4.01.5.45	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan kecamatan Gadingrejo	persentase pangaduan trantib yang ditangani secara tepat waktu	100,0	%	-	-	-	-			100,0	385,0	100,0	385,0	Kecamatan Gadingrejo

4.01.4.01.05.38	Program pengembangan Model Kelembagaan Sosial Kecamatan Gadingrejo	Persentase kelembagaan sosial yang diberdayakan	100,0	%	90,0	441,0	70,0	515,0	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Gadingrejo	
													-	-		
4.01.4.01.06.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	80,0	%	100,0	227,0	100,0	735,0	100,0	628,0	100,0	2.098,0	100,0	2.098,0	Kecamatan Panggungrejo	
4.01.4.01.06.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang layak	100,0		100,0	824,0	85,0	230,0	85,0	946,0	85,0	2.641,0	85,0	2.641,0	Kecamatan Panggungrejo	
4.01.4.01.06.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase personil yang mengikuti peningkatan kapasitas Sdm	80,0	%	100,0	13,0	75,0	42,0	75,0	42,0	85,0	45,0	85,0	45,0	Kecamatan Panggungrejo	
4.01.4.01.06.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan yang tersusun	80,0	%	100,0	75,0	89,0	75,0	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Panggungrejo	
		persentase dokumen kepegawaian dan barang yang tersusun	80,0	%	-	-	-	89,0	-	-	-	-	-	-	-	
		Persentase tersusunnya laporan kinerja, keuangan, kepegawaian dan barang secara tepat waktu	80,0	%	-	-	-	-	-	89,0	37,0	89,0	145,0	89,0	145,0	
2.04.4.01.06.16	Program penataan, penguasaan, pemilikan, pembinaan dan pemanfaatan tanah	Persentase penataan, penguasaan, pemilikan, pembinaan dan pemanfaatan tanah		%	100,0	5.303,0	80,0	12,8	80,0	15,0	-	-	-	-	Kecamatan Panggungrejo	
4.01.4.01.06.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100,0	%	100,0	172,0	100,0	145,0	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Panggungrejo	

4.01.4.01.06.27	Program Peningkatan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan	Persentase kelembagaan sosial yang diberdayakan	100,0	%	-	-	70,0	73,0	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Panggungrejo	
2.07.4.01.06.35	Program Peningkatan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan di Kecamatan Panggungrejo	Persentase kelembagaan masyarakat yang aktif	100,0	%	-	-			100,0	842,0	90,0	1,5	90,0	1,5	Kecamatan Panggungrejo	
4.01.4.01.06.32	Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kecamatan Panggungrejo	Terwujudnya peningkatan informasi/data Kecamatan dalam bentuk angka	80,0	%	100,0	2.105,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Panggungrejo	
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kecamatan Panggungrejo	Jumlah buku kecamatan dalam angka	25,0	buku	-	-	25,0	2.126,0	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Panggungrejo	
		kelurahan yang beroperasi dan terkoordinir	13,0	kelurahan			13,0							-		
		Persentase layanan adm kependudukan dan capil yang diberikan sesuai standard	80,0	%	-	-	-	-	100,0	2.176,0	100,0	2.900,0	100,0	2.900,0		Kecamatan Panggungrejo
		Persentase layanan administrasi umum yang diberikan sesuai standard	80,0	%	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-		
		Prosentase layanan administrasi perijinan yang diberikan sesuai standard	80,0	%	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-		
4.01.4.01.06.33	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase usulan musrenbangcam yang disepakati dalam RKPD	66,0	%	68,0	140,0	70,0	155,0		-		-	-	-	Kecamatan Panggungrejo	

4.01.4.01.06.73	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Panggungrejo	Persentase usulan musrenbangcam yang disepakati dalam forum SKPD	80,0	%					71,3	850,0	72,9	939,0	72,9	939,0	Kecamatan Panggungrejo
4.01.4.01.06.34	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Persentase kejadian bencana yang ditanggulangi	100,0	%	100,0	30,0	100,0	25,0	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Panggungrejo
4.01.4.01.06.92	Program Penanggulangan Bencana Alam Kecamatan Panggungrejo	Persentase kejadian bencana yang ditanggulangi	100,0	%	-	-	-	-	100,0	25,0			-	-	Kecamatan Panggungrejo
1.05.4.01.06.48	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam Kecamatan Panggungrejo	Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai waktu tanggap	100,0	%	-	-	-	-	-	-	100,0	29,0	100,0	29,0	Kecamatan Panggungrejo
4.01.4.01.06.35	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase tindak lanjut atas laporan trantibmas di kecamatan	100,0	%	100,0	213,0	100,0	202,0	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Panggungrejo
4.01.4.01.06.93	Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan Panggungrejo	Jumlah pengaduan publik bidang keamanan dan ketertiban yg dilayani	10,0	jumlah	-	-	-	-	100,0	335,0			-	-	Kecamatan Panggungrejo
1.05.4.01.06.49	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan kecamatan panggungrejo	Persentase pengaduan trantib yang ditangani secara tepat waktu	100,0	%	-	-	-	-	-	-	100,0	598,0	100,0	598,0	Kecamatan Panggungrejo
4.01.4.01.06.39	Program Pengembangan Model Kelembagaan Sosial Kecamatan Panggungrejo	Persentase kelembagaan sosial yang diberdayakan	100,0	%	100,0	630,0	70,0	804,0	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Panggungrejo
													-	-	

2.10.2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	-	%	-	-	85,0	199,5	85,0	291,8	85,0	285,0	85,0	285,0	Diskominfotik	
2.10.2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak	-	%	-	-	85,0	117,5	85,0	410,1	85,0	568,0	85,0	568,0	Diskominfotik	
2.10.2.10.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Proporsi personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	-	%	-	-	85,0	23,8	85,0	18,8	85,0	115,0	85,0	115,0	Diskominfotik	
2.10.2.10.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu	-	%	-	-	100,0	75,0	100,0	38,4	100,0	71,0	100,0	71,0	Diskominfotik	
2.10.2.10.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	85,0	%	85,0	484,3	85,0	322,5	-	-	-	-	-	-	Dishubkominfo / Diskominfotik	
		Persentase website OPD yang berisi informasi akuntabilitas kinerja	-	%	-	-	-	-	12,0	4.936,5	17,0	6.260,0	17,0	6.260,0		
		Persentase peningkatan jumlah informasi pembangunan yang dipublikasikan melalui media massa tepat waktu	-	%	-	-	-	-	-	40,0	-	60,0	-	60,0	-	
		Persentase KIM yang memiliki blog	-	%	-	-	-	-	-	32,4	-	47,1	-	47,1	-	
2.10.2.10.01.17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Meningkatnya fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	85,0	%	85,0	160,0	85,0	172,5	-	-	-	-	-	-	Dishubkominfo / Diskominfotik	

2.10.2.10.01.18	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Meningkatnya Kerjasama Informasi dengan Media Massa	85,0	%	85,0	180,0	85,0	180,5	-	-	-	-	-	-	Dishubkominfo / Diskominfo
2.10.2.10.01.21	Program Peningkatan Dokumentasi Pemerintah Daerah	Meningkatnya dokumentasi pemerintah daerah	75,0	%	-	-	75,0	2.259,0	-	-	-	-	-	-	Diskominfo
2.10.2.10.01.22	Program Peningkatan Kualitas Pemberitaan Daerah	Meningkatnya kualitas pemberitaan daerah	75,0	%	-	-	75,0	1.383,0	-	-	-	-	-	-	Diskominfo
2.10.2.10.01.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan teknologi TI	75,0	%	-	-	75,0	20,0	-	-	-	-	-	-	Diskominfo
2.10.2.10.01.24	Program Pengembangan Data dan Aplikasi E-Government	Meningkatnya pengembangan data dan aplikasi e gov	75,0	%	-	-	75,0	160,6	-	-	-	-	-	-	Diskominfo
		Persentase aplikasi yang dikelola oleh Dinas Kominfo	-	%	-	-	-	-	25,0	7.083,4	37,5	9.804,8	37,5	9.804,8	
		Persentase pengaduan masyarakat online yang ditindaklanjuti	-	%	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-	
		Persentase pengaduan kerusakan jaringan internet dan server yang ditindaklanjuti sesuai SOP	-	%	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-	
		Indeks tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	-	Point	-	-	-	-	1,7	-	1,8	-	1,8	-	
		Indeks layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	-	Point	-	-	-	-	2,9	-	3,2	-	3,2	-	
2.10.2.10.01.25	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Penunjang E Government	Meningkatnya prasarana dan sarana penunjang e gov	75,0	%	-	-	75,0	2.322,8	-	-	-	-	-	-	Diskominfo
2.10.2.10.01.26	Program Kebijakan Pengembangan E Government	Meningkatnya kebijakan pengembangan e gov	75,0	%	-	-	75,0	70,0	-	-	-	-	-	-	Diskominfo

2.10.2.10.01.27	Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang Komunikasi Informasi dan Pemanfaatan TI	Meningkatnya fasilitas peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	75,0	%			75,0	43,0	-	-	-	-	-	-	Diskominfo
2.14.2.10.01.17	Program Pengembangan Data dan Statistik	Meningkatnya pengembangan data dan statistik	80,0	%	80,0	700,3									Bappeda
		Persentase ketersediaan data urusan sektoral	-	%	-	-	80,0	729,0	61,1	758,6	75,0	789,7	75,0	789,7	Diskominfo
		Persentase data statistik yang diunggah di web site	-	%	-	-	-	-	87,5	-	88,9	-	88,9	-	
		Pertumbuhan jumlah pengunjung website	-	Pengunjung	-	-	-	-	256,0	-	356,0	-	356,0	-	
2.17.2.17.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	-	%	-	-	80,0	388,9	90,0	365,8	90,0	349,7	90,0	349,7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17.2.17.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak	-	%	-	-	80,0	205,4	90,0	2.083,0	90,0	1.156,3	90,0	1.156,3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17.2.17.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Proporsi personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	-	%	-	-	80,0	22,6	90,0	13,4	90,0	17,0	90,0	17,0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17.2.17.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu	-	%	-	-	100,0	75,0	100,0	14,4	100,0	50,9	100,0	50,9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2.17.2.17.01.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	-	%	80,0	5.766,5	100,0	1.209,3	-	-	-	-	-	-	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi / DPK
		Persentase masyarakat yang puas terhadap layanan perpustakaan	-	%	-	-	80,0	-	80,0	721,3	80,0	750,8	80,0	750,8	
		Persentase pertumbuhan koleksi bahan perpustakaan daerah	-	%	-	-	50,0	-	50,0	-	10,0	-	10,0	-	
		Jumlah pengunjung perpustakaan	-	Orang	-	-	4.000,0	-	4.000,0	-	4.500,0	-	4.500,0	-	
1.24.1.24.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	-	%	80,0	266,4	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
1.24.1.24.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak	-	%	80,0	229,2	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
1.24.1.24.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Proporsi personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	-	%	80,0	13,8	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
1.24.1.24.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu	-	%	100,0	75,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi

2.18.2.17.01.15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan peralatan jaringan info perpustakaan	-	%	100,0	50,8	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi / DPK
		Jumlah unit kerja yang tertib arsip	-	Unit							19,0	406,6	19,0	406,6	
2.18.2.17.01.16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	-	%	100,0	65,8	100,0	121,3	-	-	-	-	-	-	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi / DPK
2.18.2.17.01.17	Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	-	%	100,0	22,5	100,0	26,0	-	-	-	-	-	-	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi / DPK
2.18.2.17.01.18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Terlaksananya pengelolaan pelayanan sistem informasi	-	%	100,0	15,0	100,0	18,0	-	-	-	-	-	-	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi / DPK
2.18.2.17.01.19	Program Peningkatan Pengelolaan Arsip	Jumlah unit kerja yang tertib arsip	-	Unit	-	-	-	-	11,0	400,4			-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
													-	-	
4.01.4.01.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	80,0	%	90,0	2.416,0	90,0	3.379,0	90,0	3.500,0	90,0	3.750,0	90,0	3.750,0	Set. DPRD
4.01.4.01.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang	80,0	%	90,0	2.289,0	90,0	1.243,0	90,0	2.250,0	90,0	30.000,0	90,0	30.000,0	Set. DPRD

		berfungsi layak													
4.01.4.01.04.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase terpenuhinya kebutuhan seragam khusus dan perlengkapannya	80,0	%	90,0	216,0	90,0	203,0	90,0	275,0	90,0	300,0	90,0	300,0	Set. DPRD
4.01.4.01.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Proporsi personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	80,0	%	90,0	167,0	90,0	242,0	90,0	160,0	90,0	160,0	90,0	160,0	Set. DPRD
4.01.4.01.04.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu	80,0	%	100,0	75,0	90,0	75,0	100,0	75,0	100,0	75,0	100,0	75,0	Set. DPRD
4.01.4.01.04.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase pelayanan peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi	70,0	%	73,0	7.400,0	73,0	9.400,0	-	-	-	-	-	-	Set. DPRD
		Indeks kepuasan layanan persidangan									75,0	19.000,0			
		Indeks kepuasan layanan perjalanan dinas									75,0				
		Persentase Raperda yang disahkan									75,0				
		Persentase kegiatan DPRD yang diekspose media									75,0				
4.01.4.01.04.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penataan peraturan perundang-undangan yang tepat guna	70,0	%	70,0	340,0	73,0	340,0	-	-	-	-	-	-	Set. DPRD

4.01.4.01.04.28	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase kepuasan pelayanan pengembangan kominikasidan informasi terhadap kegiatan anggota DPRD	70,0	%	70,0	1.761,0	73,0	1.794,0	-	-	-	-	-	-	Set. DPRD
4.01.4.01.04.42	Program Fasilitas Rapat dan Persidangan	Persentase kepuasan terhadap fasilitas rapat dan persidangan sesuai dengan standart	70,0	%	70,0	820,0	73,0	825,0	-	-	-	-	-	-	Set. DPRD
4.01.4.01.04.88	Program Dukungan Layanan Tugas Pokok dan Fungsi DPRD	Jumlah penyelenggaraan bimtek, kunjungan kerja dan konsultasi	-	%	-	-	-	-	74,0	17.000,0	75,0	19.000,0	75,0	19.000,0	Set. DPRD
		Persentase hasil kunjungan kerja / studi banding dan konsultasi yang ditindaklanjuti	-	%	-	-	-	-	74,0		75,0		75,0	-	
		Persentase Raperda yang disahkan	-	%	-	-	-	-	74,0		75,0		75,0	-	
		Persentase kegiatan DPRD yang diekpose media	-	%	-	-	-	-	74,0		75,0		75,0	-	
	Sasaran 3 : Meningkatkan pengelolaan dan tertib kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk ber-KTP	87,2	%	85,0		81,7		88,0		87,2		87,2	-	
		Persentase bayi lahir ber-akta kelahiran	98,9	%	98,9		98,9		98,9		98,9		98,9	-	
2.06.2.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	90,0	%	90,0	555,1	90,0	442,4	90,0	219,9	90,0	228,9	90,0	228,9	Dispendukcapil

2.06.2.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak	90,0	%	90,0	235,6	90,0	351,5	90,0	668,7	90,0	696,0	90,0	696,0	Dispendukcapil
2.06.2.06.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin	-	%							90,0	11,4	90,0	11,4	Dispendukcapil
2.06.2.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Proporsi personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	75,0	%	90,0	9,7	90,0	106,2	90,0	17,2	90,0	17,9	90,0	17,9	Dispendukcapil
2.06.2.06.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu	100,0	%	100,0	75,0	100,0	122,5	100,0	105,3	100,0	99,2	100,0	99,2	Dispendukcapil
1.10.1.10.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya penataan administrasi kependudukan	83,6	%	89,0	1.057,5	-	-	-	-	-	-	-	-	Dispendukcapil
2.06.2.06.01.16	Program Peningkatan Administrasi Kependudukan	Persentase penerbitan KK	-	%	-	-	100,0	1.609,3	100,0	1.897,7	100,0	1.785,0	100,0	1.785,0	Dispendukcapil
		Persentase penerbitan KTP Elektronik	-	%	-	-	100,0		100,0		100,0		100,0	-	
		Persentase penerbitan KIA	-	%	-	-	100,0		100,0		100,0		100,0	100,0	-
1.10.1.10.01.17	Program Peningkatan Kemanfaatan Database Kependudukan	Persentase jenis data yang dimanfaatkan	-	%	-	-	100,0	106,2	100,0	100,9			-	-	Dispendukcapil
2.06.2.06.01.19	Program Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi	Persentase penduduk yang memiliki data tunggal	90,0	%	100,0	506,8	100,0	456,2	100,0	309,8	100,0	394,5	100,0	394,5	Dispendukcapil
2.06.2.06.01.20	Program Peningkatan Administrasi Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan akta kelahiran anak (usia 0 s.d 18 tahun)	90,6	%		417,5	100,0	987,8	100,0	740,7	100,0	871,0	100,0	871,0	Dispendukcapil
		Persentase penerbitan akta kematian	57,9	%	-	-	90,0	-	90,0	-	94,0	-	94,0	-	
		Persentase penerbitan akta	79,9	%	-	-	94,0	-	94,0	-	95,0	-	95,0	-	

		perkawinan														
		Persentase penerbitan akta perceraian	64,0	%	-	77,0	-	77,0	-	80,0	-	80,0	-			
2.06.2.06.01.21	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan	Nilai SKM	-	Point	-	-	-	82,0	107,3	-	-	-	-		Dispendukcapil	
	Belanja Tidak Langsung					2.416,9		2.426,7		3.697,9		4.067,7		-	4.067,7	BPBD
1.19.1.19.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100,0	%	100,0	217,8	100,0	355,6	100,0	326,7	100,0	361,8	100,0	361,8		BPBD
1.19.1.19.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak	80,0	%	100,0	181,8	100,0	104,5	100,0	149,2	80,0	209,5	80,0	209,5		BPBD
1.19.1.19.03.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan aparatur yang disiplin memakai atribut kedinasan	80,0	%	-	-	100,0	39,6	100,0	42,0	80,0	46,5	80,0	46,5		BPBD
1.19.1.19.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	80,0	%		3,3		16,9	62,3	17,0	80,0	18,8	80,0	18,8		BPBD
1.19.1.19.03.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase tersusunnya laporan kinerja, keuangan, kepegawaian dan barang secara tepat waktu	90,0	%	100,0	47,9	100,0	75,0	100,0	21,2	90,0	23,4	90,0	23,4		BPBD
1.19.1.19.03.01.23	Program Pembinaan Kesiagaan, Pencegahan Dini dan Pengurangan Resiko Akibat Bencana	Terwujudnya Kesiagaan dan Cegah Dini dari Ancaman Bencana	100,0	%	100,0	383,4	-	-	-	-	100,0	421,8	100,0	421,8		BPBD
	Program Pembinaan Kesiagaan dan Pencegahan Dini	Terwujudnya Kesiagaan dan Cegah Dini dari Ancaman Bencana	100,0	%	-	-	100,0	273,0			75,0	1.164,0	75,0	1.164,0		BPBD

	Program Kesiagaan dan Pencegahan Dini Bencana	Terwujudnya Kesiagaan dan Cegah Dini dari Ancaman Bencana	100,0	%	-	-			100,0	651,7	100,0	716,8	100,0	716,8	BPBD
1.19.1.19.03.01.25	Program Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana	100,0	%	100,0	56,8	100,0	22,0	100,0	22,2	75,0	224,6	75,0	224,6	BPBD
1.19.1.19.03.01.26	Program Pengurangan Resiko Akibat Bencana	Terwujudnya Pengurangan Resiko Akibat Bencana	100,0	%	100,0	127,1	100,0	69,0			100,0	75,9	100,0	75,9	BPBD
	Program Kedaruratan Bencana	Terwujudnya Pengurangan Resiko Akibat Bencana	100,0	%					100,0	1.179,9	100,0	1.319,8	100,0	1.319,8	BPBD
1.19.1.19.03.01.27	Program Penyediaan Logistik Penanganan Bencana	Terwujudnya Penyediaan Logistik Bagi Korban Bencana	100,0	%	100,0	227,3	100,0	35,4	100,0	126,0	100,0	138,6	100,0	138,6	BPBD
1.19.1.19.03.01.30	Program Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Kedaruratan	Terwujudnya Pelayanan Penanggulangan Darurat Bencana	100,0	%	100,0	1.659,4	100,0	307,5	100,0	17,7	75,0	5.489,3	75,0	5.489,3	BPBD
													-	-	
	Misi 7 : Meningkatkan kualitas iman dan taqwa, berbudaya yang diliputi harmoni sosial dan kesalehan sosial												-	-	
	Tujuan : Mengembangkan aktualisasi nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal, untuk membangun harmoni sosial dan kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks pembangunan manusia	75,1	Indeks	75,3		75,5		75,7		75,9		75,9	-	

	Sasaran 1 : Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Jumlah konflik sosial berlatar belakang agama	-	Kasus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.05.1.05.01.35	Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	Meningkatnya kerukunan umat beragama	90,0	%	90,0	96,8							-	-	Bakesbangpol	
		Persentase peserta pembinaan yang paham tentang kerukunan antar umat beragama	90,0	%	90,0		90,0	89,0						-	-	
		Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	3,3	per 1000 penduduk	3,3									-	-	
		Persentase tokoh agama anggota forum keagamaan yang dibina	-	%			90,0							-	-	
													-	-		
	Sasaran 2 : Terbangunnya suasana lingkungan yang aman dan tertib	Jumlah kasus pelanggaran perda	569,0	Perda	546,2	524,4		503,0		483,0		483,0		-		
		Angka Kriminalitas	32,1	Per 10.000 pendudu k	29,4	26,9		24,6		22,5		22,5		-		
1.05.1.05.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	90,0	%	90,0	372,5	90,0	312,5	90,0	163,2	90,0	169,9	90,0	169,9	Satpol PP	
1.05.1.05.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak	90,0	%	90,0	497,6	90,0	160,0	90,0	416,5	90,0	433,5	90,0	433,5	Satpol PP	
1.05.1.05.02.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase terpenuhinya kebutuhan seragam khusus dan perlengkapannya	100,0	%	100,0	201,0	100,0	201,0	100,0	197,9	100,0	206,0	100,0	206,0	Satpol PP	

1.05.1.05.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Proposisi personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	90,0	%	90,0	250,5	90,0	218,9	90,0	32,8	90,0	79,8	90,0	79,8	Satpol PP
1.05.1.05.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu	100,0	%	100,0	75,0	100,0	75,0	100,0	32,4	100,0	53,7	100,0	53,7	Satpol PP
1.05.1.05.02.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	100,0	%	100,0	1.268,8	100,0	277,5	-	-	-	-	-	-	Satpol PP
1.05.1.05.02.19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan keamanan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	100,0	%	100,0	171,0	100,0	50,0	-	-	-	-	-	-	Satpol PP
1.05.1.05.02.20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Meningkatnya pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	100,0	%	100,0	453,6	100,0	157,0	-	-	-	-	-	-	Satpol PP
1.05.1.05.02.22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Meningkatnya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	100,0	%	100,0	44,0	100,0	108,5	-	-	-	-	-	-	
1.05.1.05.02.32	Program Pengendalian dan Penegakan Peraturan Daerah	Meningkatnya pengendalian dan penegakan Peraturan Daerah	100,0	%	100,0	352,5	100,0	442,3	-	-	-	902,3	-	902,3	Satpol PP
1.05.1.05.02.37	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Jumlah RT yang memiliki siskamling aktif		RT	-	-	-	144,7	217,0	1.073,2	227,0	1.117,1	227,0	1.117,1	Satpol PP
		Meningkatnya Perlindungan Masyarakat	100,0	%	-	-	-	-	61,5	-	77,4	-	77,4	-	
		Persentase tenaga satlinmas dalam siaga bencana	100,0	%	-	-	-	-	40,0	-	40,0	-	40,0	-	

1.05.1.05.02.40	Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	100,0	%	-	-	-	80,0	733,1	80,0	763,1	80,0	763,1	Satpol PP	
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100,0	%	-	-	-	70,0	-	70,0	-	70,0	-	-	
		Persentase SDM aparatur yang terlatih	90,0	%	-	-	-	45,0	-	50,0	-	50,0	-	-	
												-	-		
	Sasaran 3 : Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, yang didukung dengan tanggapan penanggulangan bencana	Time response pemadaman kebakaran	15,0	Menit	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	-		
		Time response penanggulangan bencana	15,0	Menit	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	-	
	Program...											-	-	BPBD	
	Program...											-	-		
												-	-		
	Sasaran 4 : Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan HAM dalam kerangka wawasan kebangsaan	Jumlah kasus pelanggaran HAM	-	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.20.1.20.03..5 5	Program Pembinaan dan Penyuluhan Hukum	meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan/hukum		%	90,0	280,0	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Hukum	
1.20.1.20.03.57	Bantuan Hukum dan Perlindungan HAM	terwujudnya kebijakan daerah yang memenuhi standard dan norma HAM		%	90,0	95,0	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Hukum	

1.05.1.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	90,0	%	90,0	307,0	90,0	354,7	90,0	334,1	90,0	313,5	90,0	313,5	Bakesbangpol
1.05.1.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi layak	90,0	%	90,0	383,0	90,0	301,5	90,0	462,9	90,0	394,0	90,0	394,0	Bakesbangpol
1.05.1.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Proporsi personil yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	90,0	%	90,0	17,1	90,0	26,8	90,0	14,8	90,0	15,3	90,0	15,3	Bakesbangpol
1.05.1.05.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang dan kinerja yang disusun tepat waktu	100,0	%	100,0	75,0	100,0	76,0	100,0	24,5	100,0	48,7	100,0	48,7	Bakesbangpol
1.05.1.05.01.17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan	90,0	%	90,0	191,2	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol
		Persentase peserta pembinaan yang paham tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	90,0	%	90,0	90,0	101,0	-	-	-	-	-	-	-	
		Persentase peningkatan penanganan potensi konflik	-	%	-	-	-	-	5,0	1.278,2	5,0	1.231,3	5,0	1.231,3	
1.05.1.05.01.21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya pendidikan politik masyarakat	90,0	%	90,0	82,9	90,0	76,1	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol
		Persentase suara sah dalam pemilu	90,0	%	90,0	90,0	90,0	-	-	-	-	-	-	-	
1.05.1.05.01.24	Program Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional	Terwujudnya pengembangan stabilitas dan kewaspadaan	90,0	%	90,0	821,8	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol

		nasional													
		Persentase penurunan kejadian terkait dengan kriminalitas	15,0	%	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah demonstrasi	4,0	Kasus	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah laporan deteksi dan cegah dini potensi konflik	-	Laporan		36,0	837,6	-	-	-	-	-	-	-	
1.05.1.05.01.33	Program Pengembangan Hubungan Kelembagaan Sosial Politik	Meningkatnya hubungan kelembagaan sosial politik	90,0	%	90,0	91,7	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol
		Persentase peserta pembinaan yang paham tentang prosedur dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik	90,0	%	90,0	-	90,0	85,0	-	-	-	-	-	-	
		Persentase penurunan jumlah temuan oleh BPK atas pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik	14,0	%	14,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.05.1.05.01.33	Program Pengembangan Hubungan Kelembagaan Sosial Politik dan Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi pemilih pemula dalam PEMILU	-	%	-	-	-	-	5,0	450,6	-	-	-	-	
1.05.1.05.01.33	Program Pembinaan Stabilitas Politik Daerah	Persentase peningkatan partisipasi pemilih pemula dalam PEMILU	-	%	-	-	-	-	-	-	5,0	611,5	5,0	611,5	Bakesbangpol

1.05.1.05.01.34	Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Meningkatnya pemberdayaan organisasi masyarakat dan lembaga masyarakat	90,0	%	90,0	128,2	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	
		Jumlah ormas/LSM sampai dengan sekarang	208,0	lembaga	208,0								-	-	
		Persentase Ormas/LSM yang ber SKT	-	%			17,5	165,0	-	-	-	-	-	-	
1.05.1.05.01.39	Program Peningkatan dan Penguatan Ketahanan Bangsa	Persentase peserta pembinaan yang paham tentang ketahanan bangsa	90,0	%	90,0	420,8	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	
		Persentase penurunan pengguna dan penyalahgunaan narkoba	-	%	-	-	90,0	174,8	-	-	-	-	-	-	
		Persentase tokoh agama anggota forum keagamaan yang aktif	-	%	-	-	-	-	-	-	85,0	760,2	85,0	760,2	
		Persentase organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat yang ber SKT	-	%	-	-	-	-	-	-	5,0	-	5,0	-	
1.05.1.05.01.39	Program Penguatan Ketahanan Bangsa	Persentase tokoh agama anggota forum keagamaan yang aktif	-	%	-	-	-	-	85,0	983,6	-	-	-		
		Persentase organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat yang ber SKT	-	%	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-	-	
	Sasaran 5 : Meningkatkan upaya pelestarian artefak dan nilai-nilai budaya serta	Jumlah benda, bangunan, situs dan kawasan cagar budaya yang	17,0	Unit	17,0		18,0		18,0		19,0		19,0		

	tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial	dilestarikan														
		Jumlah kelompok seni dan budaya lokal yang aktif	145,0	Kelompok	147,0		149,0		151,0	-	154,0		154,0	-		
2.16.1.01.01.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya pembinaan terhadap komunitas budaya sebagai media pelestarian nilai kearifan lokal	100,0	%	-	-	100,0	35,0		-			-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.16.1.01.01.15	Program Pengembangan dan Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah cagar budaya yang dipelihara	18,0	cahar budaya	-	-				-	-	17,0	2.330,2	17,0	2.330,2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.16.1.01.01.15	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah cagar budaya yang dipelihara										17,0	2.330,2	17,0	2.330,2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.16.1.01.01.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya pembinaan terhadap komunitas budaya sebagai media pelestarian nilai kearifan lokal	100,0	%	-	-	100,0	170,0		-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.16.1.01.01.19	Program Kemitraan Pengembangan Budaya	Meningkatnya pembinaan terhadap komunitas budaya sebagai media pelestarian nilai kearifan lokal	100,0	%	100,0	96,0	100,0	575,0		-	-	-	-	-	-	Dinas Pemuda Olah Raga dan Kebudayaan / Dinas Pendidikan dan kebudayaan
		Persentase kelompok/pelaku seni/budaya yang dibina	-	%	-	-	-	-	-	47,0	967,8	48,0	2.231,9	48,0	2.231,9	
		Persentase kelompok/pelaku seni/budaya yang dibina	-	%						47,0	967,8					

2.16.1.01.01.19	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase kelompok/pelaku seni/budaya yang dibina	-	%							48,0	2.231,9	-	2.231,9	Dinas Pemuda Olah Raga dan Kebudayaan / Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
2.16.1.01.01.19	Program Kemitraan Pengembangan Budaya	Meningkatnya pembinaan terhadap komunitas budaya sebagai media pelestarian nilai kearifan lokal	100,0	%	100,0	96,0	100,0	575,0	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemuda Olah Raga dan Kebudayaan / Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
		Persentase kelompok/pelaku seni/budaya yang dibina	-	%	-	-	-	-	-	47,0	967,8	48,0	2.231,9	48,0	2.231,9	
TOTAL BELANJA						607.018		617.018			627.144		673.391		673.391	

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Prioritas pembangunan Kota Pasuruan tahun 2021 disusun dengan mempertimbangkan progress pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah, serta poin-poin utama dalam pokok-pokok pikiran DPRD. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sampai dengan tahun 2020 dan tahun berjalan 2021, telah memberikan sumbangsih bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Dalam proses pencapaian progress sasaran ini, terdapat isu-isu pembangunan yang relevan untuk diperhatikan dalam penetapan prioritas pembangunan tahun 2021, sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Pemetaan Isu Pembangunan Menurut Sasaran Pembangunan Strategis

No	Sasaran	Isu Pembangunan
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Keberlangsungan pendidikan gratis untuk SMA/SMK pasca pengalihan kewenangan ke Provinsi - Pemenuhan kesejahteraan PTT dan GTT - Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan - Peningkatan kualitas pendidikan dasar dan prasarana sarana - Peningkatan pendidikan vokasional berbasis komunitas
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pelayanan puskesmas - Penurunan angka kematian ibu, perbaikan gizi balita dan penanggulangan stunting - Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular - Penyediaan sanitasi dan air bersih
3.	Meningkatnya kesempatan kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan angkatan kerja mencari kerja dari generasi milenial - Penyediaan pelatihan kerja yang mendukung era industri 4.0
4.	Meningkatnya daya saing sektor perindustrian, perdagangan dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan jejaring kerja dengan pengrajin mebel generasi milenial untuk membawa semangat perubahan paradigma pengrajin mebel. - Revitalisasi UPT logam sebagai katalisator kebangkitan industri logam pasuruan. - Peningkatan UMKM go digital dan perluasan akses pasar - Peningkatan pasar tradisional ber-SNI - Peningkatan peran ekonomi kreatif - Alih fungsi lahan pertanian

No	Sasaran	Isu Pembangunan
		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan penggunaan jaring ikan dan gejala over fishing - Pengembangan perikanan tawar - Penataan PKL - Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi, stabilisasi harga pangan dan penganeekaragaman pangan
5.	Menurunnya kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantapan data tunggal kemiskinan - Peningkatan efektivitas sasaran penerima program penanggulangan kemiskinan
6.	Meningkatnya ketersediaan dan kelayakan infrastruktur serta prasarana dan sarana wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kelayakan jalan - Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah, air bersih dan permukiman - Peningkatan jalan, saluran air dan penerangan kawasan permukiman - Penuntasan jalan lingkaran utara dan pengembangan kawasan pelabuhan
7.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan ruang terbuka hijau - Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan - Pengembangan TPS 3R - Peningkatan pengelolaan sumberdaya air dan penanggulangan banjir
8.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung dengan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Revitalisasi SDM kelurahan, khususnya terkait pengelolaan dana kelurahan - Pelembagaan APIP sebagai upaya pencegahan dini - Aktuasi akuntabilitas kinerja sebagai implementasi SAKIP-TPP - Integrasi aplikasi perencanaan dengan penganggaran - Peningkatan pelayanan publik, khususnya terkait kepastian waktu dan biaya.
9.	Menurunnya ketergantungan keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah
10.	Meningkatnya kerukunan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Menguatnya sekat-sekat masyarakat yang terbangun dari SARA - Melemahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, khususnya terkait keamanan dan ketertiban - Penyalahgunaan narkoba - Maraknya ujaran kebencian yang berpotensi melemahkan simpul-simpul kebangsaan
11.	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya mempererat simpul-simpul jejaring kerja dengan pelaku seni dan budaya - Masih kurangnya event-event apresiasi seni dan budaya, khususnya di ruang-ruang publik.

No	Sasaran	Isu Pembangunan
		- Perintisan kampung budaya

Sementara itu, dari perspektif perencanaan politis, penentuan prioritas pembangunan tahun 2021 juga harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang terekam dari hasil reses anggota DPRD. Selanjutnya, reses anggota DPRD ini dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD, sebagai berikut:

1. Percepatan penanggulangan banjir.
2. Percepatan penyediaan infrastruktur wilayah dan PSU permukiman yang layak.
3. Peningkatan kualitas layanan pendidikan melalui kemudahan aksesibilitas, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dan peningkatan prasarana sarana.
4. Peningkatan kualitas layanan kesehatan, khususnya di rumah sakit.
5. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan masalah sosial, melalui kemudahan warga miskin dalam mengakses program penanggulangan kemiskinan.
6. Peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan serta penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
7. Penguatan identitas masyarakat sebagai kota santri.
8. Pengembangan ekonomi melalui peningkatan peran sektor ekonomi potensial, penataan pasar dan toko modern.

Penyajian pokok-pokok pikiran DPRD dari hasil reses DPRD, dijabarkan dalam lampiran dokumen RKPD.

Memperhatikan isu pembangunan menurut sasaran pembangunan strategis, serta pokok-pokok pikiran DPRD, maka melalui serangkaian analisis elaboratif, diperoleh prioritas pembangunan Kota Pasuruan tahun 2021, sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan dasar dan penanggulangan kemiskinan.
2. Peningkatan konektivitas dan pengembangan pusat pertumbuhan.
3. Pengembangan ekonomi kreatif untuk peningkatan nilai tambah.
4. Pelestarian sumberdaya lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan.
5. Aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal untuk mendukung kerukunan sosial.

Kelima prioritas pembangunan di atas telah sesuai yang termaktub dalam RPJMD Kota Pasuruan 2016-2021, yang dapat digambarkan kesesuaiannya sebagaimana tabel berikut :

**Keselarasan Prioritas Pembangunan antara RKPD Tahun 2021 dengan
RJMD Perubahan Kota Pasuruan Tahun 2016-2021**

RKPD	RPJMD
Peningkatan pelayanan dasar dan penanggulangan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan - Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan - Menurunnya kemiskinan
Peningkatan konektivitas dan pengembangan pusat pertumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya ketersediaan dan kelayakan infrastruktur serta prasarana dan sarana wilayah
Pengembangan ekonomi kreatif untuk peningkatan nilai tambah.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kesempatan kerja - Meningkatnya daya saing sektor perindustrian, perdagangan dan jasa
Pelestarian sumberdaya lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal untuk mendukung kerukunan sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kerukunan masyarakat - Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya

Penentuan prioritas pembangunan tahun 2021 ini, juga memperhatikan keselarasannya dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana terpetakan pada tabel berikut:

**Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur
dan Kota Pasuruan Tahun 2021**

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KOTA PASURUAN
Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan	Pembangunan Manusia Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan pelayanan dasar dan penanggulangan kemiskinan
Infrastruktur dan pemerataan wilayah	Pemerataan Pembangunan dan Penguatan Konektivitas serta manajemen kebencanaan	Peningkatan konektivitas dan pengembangan pusat pertumbuhan.
Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata, Kualitas Ketenagakerjaan serta perluasan kesempatan	Pengembangan ekonomi kreatif untuk peningkatan nilai tambah.

	kerja	
Ketahanan pangan, energi dan lingkungan hidup	Peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, energi dan pelestarian lingkungan hidup	Pelestarian sumberdaya lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan
Stabilitas pertahanan dan keamanan	Peningkatan ketentraman dan ketertiban	Aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal untuk mendukung kerukunan sosial

Sumber: Tim Penyusun RKPD Kota Pasuruan tahun 2021

Prioritas-prioritas pembangunan Kota Pasuruan di atas, terangkai membentuk tema pembangunan tahun 2021, sebagai berikut:

“Peningkatan sumberdaya manusia untuk memacu daya saing dan kualitas pembangunan”.

Esensi dari tema pembangunan Kota Pasuruan tahun 2021 adalah peningkatan sumber daya manusia untuk mempercepat tercapainya daya saing daerah dan kualitas pembangunan, yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga pemerataan kesejahteraan dapat tercapai, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Modal dasar pembangunan adalah sumber daya manusia, dengan sumberdaya manusia yang handal dalam suatu daerah akan lebih mudah mencapai kesejahteraan yang optimal. Memperhatikan perkembangan struktur usia penduduk, pelaksanaan pembangunan di Kota pasuruan mulai diisi oleh mereka yang lahir di atas tahun 1990. Mereka adalah generasi yang lahir dan tumbuh dewasa di tengah kelindan teknologi informasi.

Oleh karena itu, fokus peningkatan sumberdaya manusia adalah menyasar generasi milenial yang disesuaikan dengan bidang aktivitas mereka. Pelatihan ketrampilan kerja yang diberikan pada pencaker milenial harus menyasar peluang kerja pada era industri 4.0. Sementara pelatihan usaha harus mengarah pada kesiapan pengusaha milenial dalam menyongsong era ekonomi digital. Sumberdaya manusia dalam hal ini diutamakan para generasi milenial.

2. Daya Saing

Daya saing adalah kemampuan sebuah perekonomian untuk menarik dan menjaga prospek usaha dengan pasar yang stabil dan

meningkat, yang dalam waktu bersamaan mampu menjaga standar kehidupan masyarakat.

Pembangunan daya saing yang berpusat pada sumberdaya manusia, dilaksanakan melalui model kolaborasi yang melibatkan elemen pemerintah, perusahaan, lembaga pendidikan dan riset serta masyarakat. Model kolaborasi ini dikembangkan dengan proses bottom-up agar masing-masing elemen tersebut mengambil tanggung jawab untuk mendapatkan nilai tambah kolektif untuk spesialisasi yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing elemen.

3. Kualitas Pembangunan

Pembangunan yang berkualitas, diukur dari aspek ekonomi-sosial, aspek berkelanjutan dan aspek budaya. Dari aspek ekonomi, pembangunan harus inklusif, yang dicirikan dengan adanya pemerataan pembangunan baik dalam perspektif antar wilayah maupun antar kelompok pendapatan. Aspek berkelanjutan bermakna bahwa pembangunan harus ramah lingkungan, dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk keberlanjutan pembangunan di masa depan.

Pembangunan yang berkualitas dari aspek budaya memiliki makna bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan tetap mampu merawat nilai-nilai tradisi budaya dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Pelaksanaan pembangunan harus semakin memupuk modal sosial, sebagai prasyarat utama terbangunnya kerukunan serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selanjutnya, penjabaran tema pembangunan dan prioritas pembangunan ke dalam program prioritas, disajikan pada tabel Perlu dimaklumi bersama, bahwa program prioritas bukanlah nomenklatur program yang tercantum pada APBD. Program prioritas adalah penekanan (stretching) yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan urusan pembangunan yang relevan.

Pemetaan Tema, Prioritas dan Program Priotas Pembangunan
Kota Pasuruan Tahun 2021

No.	Tema Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
1.	Peningkatan sumberdaya manusia untuk memacu daya saing dan kualitas pembangunan	Peningkatan pelayanan dasar dan penanggulangan kemiskinan.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas. - Peningkatan perlindungan sosial, khususnya bagi anak terlantar. - Peningkatan tata kelola pelayanan kependudukan, khususnya pelayanan jemput bola. - Peningkatan efektivitas program penanggulangan kemiskinan, khususnya bagi kelompok produktif.
		Peningkatan konektivitas dan pengembangan pusat pertumbuhan.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan infrastruktur perkotaan dan permukiman. - Penataan penanganan sarpras perkampungan pasca alokasi dana kelurahan. - Peningkatan infrastruktur kawasan rawan bencana. - Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan.
		Pengembangan ekonomi kreatif untuk peningkatan nilai tambah.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan sumberdaya kreatif, khususnya terkait desain produk dan daya jangkau pasar, pada industri mebel dan logam. - Inkubasi usaha bagi pelaku industri kreatif pada sektor-sektor ekonomi kreatif potensial, termasuk usaha start up. - Peningkatan kemampuan desain kemasan hingga labelisasi bagi IKM mamin. - Peningkatan ketrampilan kerja bagi pencaker milenial dan penciptaan lapangan kerja pada industri 4.0.
		Pelestarian sumberdaya lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan hidup. - Peningkatan kualitas dan aksesibilitas air.

No.	Tema Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
		Aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal untuk mendukung kerukunan sosial.	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan ketahanan bencana. - Peningkatan penyelenggaraan dan pembinaan kebudayaan. - Penguatan kembali nilai-nilai gotong royong dan kerukunan untuk menciptakan kerekatan sosial. - Penanggulangan narkoba dan peningkatan kamtibmas

Sumber: Tim Penyusun RKPD Kota Pasuruan tahun 2021

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	75,26	75,62	0,47 %
2	Angka Kemiskinan	6,66	6,88	3,19 %
3	Angka Pengangguran	6,33	6,23	-1,6 %
4	Pertumbuhan Ekonomi	-4,33	3,64	18,95%
5	Pendapatan Per kapita	39.92 juta	40.53 juta	1,50 %
6	Ketimpangan Pendapatan	0,31%	0,35%	11,4%

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pasuruan Tahun 2021 mencapai 75,62 dan menempatkan pencapaian status pembangunan Kota Pasuruan pada kelompok "Tinggi".

IPM Kota Pasuruantahun 2021 sebesar 75,62 atau tumbuh 0,47 persen dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar 75,26, mengalami perlambatan pertumbuhan IPM dibanding tahun-tahun sebelumnya karena pengaruh pandemi Covid-19 di Kota Pasuruan.

2. Angka Kemiskinan

Persentase Penduduk Miskin Maret 2021 naik menjadi 6,88 persen.

Persentase penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 6,66 persen naik 0,20 pointer hadap Maret 2020.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 13.400 orang, naik 480 orang terhadap Maret 2020.

3. Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan dari Agustus 2020 sebesar 6,33 persen menjadi 6,23 persen Agustus 2021, dengan asumsi bahwa terdapat 6 orang pengangguran dari 100 orang Angkatan kerja di Kota Pasuruan.

Jumlah Angkatan Kerja mencapai 108.511 orang, sejalan dengan naiknya angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami kenaikan, TPAK Agustus 2021 sebesar 70,05 persen, meningkat 2,24 persen poin dibandingkan tahun 2020.

Peningkatan TPAK memberikan indeks potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja yang meningkat.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar -4,33 persen menjadi sebesar 3,64 persen pada tahun 2021.

TABEL 7. PDRB, PDRB PERKAPITA (JUTA RUPIAH) DAN PERTUMBUHAN PDRB PERKAPITA (PERSEN)

Kota : Pasuruan

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Juta rupiah)	7.105.188,52	7.707.010,78	8.287.819,46	8.047.228,39	8.491.125,83
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (Juta rupiah)	5.354.088,55	5.650.488,22	5.964.658,29	5.706.596,68	8.914.585,23
3	Jumlah Penduduk (orang)	197.696	199.078	200.422	201.585	209.528
4	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	35,94	38,71	41,35	39,92	40,53
5	PDRB Per kapita Atas Dasar Harga Konstan	27,08	28,38	29,76	28,31	28,23
	PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 (PERSEN)	5,47	5,54	5,56	-4,33	3,64

5. Pendapatan Per kapita

Garis Kemiskinan dihitung berdasarkan hasil Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang dilaksanakan oleh BPS. Pada periode Desember 2021, Garis Kemiskinan meningkat sebesar 4,35 persen atau naik Rp. 7.096,- per kapita per bulan, yaitu Rp. 441.531,- per kapita per bulan pada Desember 2020, menjadi Rp. 461.624,- per kapita per bulan pada Desember 2021.

6. Ketimpangan Pendapatan

Persoalan kemiskinan bukan sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, ada dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2021 sebesar 1,150 naik 0,380 dibandingkan Maret 2020 sebesar 0,77, mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan.

Indeks keparahan kemiskinan pada Maret 2021 sebesar 0,270 naik 0,140 dibandingkan Maret 2020 sebesar 0,130, mengindikasikan bahwa rata-rata kesenjangan penduduk semakin berkurang.

Statistik Kunci, 2019–2021

Key Statistics, 2019–2021

Rincian/Description	Satuan/Unit	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SOSIAL/SOCIAL				
Penduduk1/Population1	ribu/thousand	200.422	208.066	209.528
LajuPertumbuhan Penduduk1/Population Growth1	%	0,68	1,07	0,70
AngkaHarapan Hidup1-e0/Life Expectancy Rate1	tahun/years	71,40	71,52	71,60
AngkaMelekHurufUsia 15+/Literacy Rate Aged 15+	%	96,79	96,04	96,60
Tingkat PartisipasiAngkatanKerja - TPAK2 Labour Force Participation Rate-LFPR2	%	67,91	70,08	71,66
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT2 Unemployment Rate-UR2	%	5,06	6,33	6,23
Penduduk Miskin5/Poor People4	ribu/thousand	12,92	13,40	13,97
PersentasePenduduk Miskin4 Percentage of Poor People4	%	6,46	6,66	6,88
Indeks Pembangunan Manusia-IPM5 Human Development Index5	-	75,25	75,26	75,62
EKONOMI/ECONOMIC				
ProdukDomestik Regional (PDRB) Harga Berlaku6 Gross Domestic Regional Bruto (GDRB) at Current Price6	miliar rupiah billion rupiahs	8.288.680,9	8.047.228,4	8.491.125,8
LajuPertumbuhan Ekonomi8/Economic Growth 7	%	5,56	-4,33	3,64
ProdukDomestik Regional Bruto (PDRB) HargaKonstan 6,8 Gross Domestic Regional Bruto (GDRB) at constant price 6,8	miliar rupiah billion rupiahs	5.965.297,0	5.706.596,7	5.914.585,2

Sumber : Kota Pasuruan Dalam Angka 2021, BPS Kota Pasuruan

Catatan/Notes:

1. Hasil proyeksi penduduk Indonesia 2010–2035 (pertengahan tahun/Juni) dan Hasil Sensus Penduduk 2020/*The result of Indonesia population prjection 2010–2035 (mid year/June) and The resultf of Population Census 2020*
2. Kondisi Agustus/Condition at August
3. Menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk tahun 2010–2035/Weighted by the 2010–2035 population projection
4. Kondisi Maret/Condition at March
5. Sejak tahun 2010, IPM dihitung dengan metode baru. Komponen IPM metode baru adalah angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita/Since 2010, HDI was calculated using new method. New HDI component are life expectancy at birth, expected years of schooling, means years of schooling, and expenditure per capita
6. Mulai tahun 2010 mengadopsi System of National Account 2008 (SNA 2008)/Since 2010 is in line with System of National Account 2008 (SNA 2008)
7. Menggunakan tahun dasar 2010 (2010=100)/*Using 2010 base year (2010=100)*
8. Mulai 2010 proyeksi penduduk berdasarkan hasil SP2010/Since 2010 population projection based on SP2010

TABEL 1. PDRB SERI 2010 ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)

Kota : Pasuruan

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	168.071,4	175.202,8	177.519,9	198.392,4	193.466
B	Pertambangan dan Penggalian	2.042,1	2.133,7	2.017,8	1.968,9	2.011
C	Industri Pengolahan	1.450.877,2	1.555.879,1	1.660.698,5	1.566.836,6	1.670.735
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.758,0	5.225,7	5.636,6	5.675,9	5.927
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16.853,3	17.586,4	17.973,7	18.962,7	19.588
F	Konstruksi	459.901,8	494.190,1	512.140,8	493.055,3	504.435
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.025.022,9	2.240.658,0	2.440.837,4	2.297.261,2	2.478.653
H	Transportasi dan Pergudangan	424.556,0	461.908,2	507.293,5	481.412,3	525.260
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	391.144,6	424.529,2	464.177,6	425.935,2	451.199
J	Informasi dan Komunikasi	547.380,5	582.293,8	630.362,5	682.066,9	724.877
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	542.961,3	579.556,4	599.962,4	602.085,9	617.582
L	Real Estate	176.363,7	194.929,9	209.242,4	214.296,4	217.877
M,N	Jasa Perusahaan	42.957,5	48.130,0	52.572,2	51.196,9	53.836
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	302.116,2	333.966,2	369.204,6	373.064,5	370.462
P	Jasa Pendidikan	289.747,1	310.116,2	336.509,0	357.377,4	360.773
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	60.151,6	64.303,5	69.844,1	76.929,7	80.313
R,S,T,U	Jasainya	200.283,2	216.401,5	231.826,4	200.710,2	214.132
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	7.105.188,5	7.707.010,8	8.287.819,5	8.047.228,4	8.491.126
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	7.105.188,5	7.707.010,8	8.287.819,5	8.047.228,4	8.491.126

Sumber : Kota Pasuruan Dalam Angka 2021, BPS Kota Pasuruan

**TABEL 2. PDRB SERI 2010 ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA
(JUTA RUPIAH)**

Kota : Pasuruan

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	116.959,0	116.935,1	115.789,9	128.580,2	124.491
B	Pertambangan dan Penggalian	1.564,6	1.532,9	1.417,0	1.326,6	1.279
C	Industri Pengolahan	1.064.266,8	1.111.469,5	1.163.774,1	1.074.380,9	1.104.131
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.286,7	4.503,6	4.782,3	4.782,7	4.893
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.969,9	14.435,0	14.934,1	15.647,8	16.079
F	Konstruksi	340.182,7	362.395,1	383.382,5	356.020,4	357.607
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.506.412,3	1.603.089,9	1.702.058,8	1.577.692,5	1.674.968
H	Transportasi dan Pergudangan	307.444,2	328.063,0	351.729,2	329.330,6	356.167
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	269.833,7	289.675,6	310.756,5	278.677,1	286.662
J	Informasi dan Komunikasi	502.336,6	533.530,1	570.651,6	614.875,8	651.312
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	399.894,4	416.284,4	428.323,8	427.437,8	430.441
L	Real Estate	134.794,7	142.631,7	149.959,6	152.529,2	154.012
M,N	Jasa Perusahaan	33.444,4	35.907,2	38.336,2	36.010,9	36.770
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	233.137,6	242.775,0	251.596,5	244.444,3	243.683
P	Jasa Pendidikan	222.899,4	234.480,8	251.168,5	259.340,4	260.281
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	48.610,9	51.926,5	55.402,3	60.214,6	61.785
R,S,T,U	Jasa lainnya	154.050,7	160.852,7	170.595,4	145.304,9	150.023
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5.354.088,5	5.650.488,2	5.964.658,3	5.706.596,7	5.914.585
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		5.354.088,5	5.650.488,2	5.964.658,3	5.706.596,7	5.914.585

Sumber : Kota Pasuruan Dalam Angka 2021, BPS Kota Pasuruan

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	1 Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi(Negeri dan Swasta)	85	Data Pokok Pendidikan	Diknas
		2 Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	7.710	Data Pokok Pendidikan	Diknas
		3 Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	227	Data Pokok Pendidikan	Diknas
		4 Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	-	-	Diknas
		5 Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	651	Data Pokok Pendidikan	Diknas
		6 Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	24	-	Diknas
		7 Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan	51	-	Diknas

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah			
		8 Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	57	Data Pokok Pendidikan	Diknas
		9 Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	18.911	Data Pokok Pendidikan	Diknas
		10 Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	9.232	Data Pokok Pendidikan	Diknas
		11 Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	18.911	Data Pokok Pendidikan	Diknas
		12 Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	9.232	Data Pokok Pendidikan	Diknas
		13 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	176	Data Pokok Pendidikan	Diknas
		14 Jumlah kebutuhan minimal pendidik	172	Data Pokok Pendidikan	Diknas

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)			
		15 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1.028	Data Pokok Pendidikan	Diknas
		16 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	597	Data Pokok Pendidikan	Diknas
		17 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)			Diknas
		18 Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)			Diknas
		19 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	283		Diknas
		20 Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	163		Diknas
		21 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	S1 Sertifikat pendidik	1.040 431	Data Pokok Pendidikan Diknas
		22 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-	S1 Sertifikat pendidik	697 344	Data Pokok Pendidikan Diknas

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik			
		23 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	53	Data Pokok Pendidikan	Diknas
		24 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	19	Data Pokok Pendidikan	Diknas
		25 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	118		Diknas
		26 Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	82		Diknas
		27 Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	6		Diknas
		28 Jumlah peserta didik pendidikan	96		Diknas

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			
		29 Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	96	-	Diknas
		30 Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		-	Diknas
		31 Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	42	Data Pokok Pendidikan	Diknas
		32 Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	37	Data Pokok Pendidikan	Diknas
		33 Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	2		Diknas
		34 Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	2	Data Pokok Pendidikan	Diknas
2	Kesehatan	1 Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota	1	RSUD dr. R Soedarsono	RSUD

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar			
		2 Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	2	SPM	Dinkes
		3 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1.467.006.410	SPM	Dinkes
		4 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	370	SPM	Dinkes
		5 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	130.126.540	SPM	Dinkes
		6 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	370	SPM	Dinkes
		7 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	35.476.400	SPM	Dinkes
		8 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	880	SPM	Dinkes
		9 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	434.721.650	SPM	Dinkes
		10 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	880	SPM	Dinkes
		11 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	294.260.360	SPM	Dinkes
		12 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	631	SPM	Dinkes

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		13 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	92.342.570	SPM	Dinkes
		14 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	813	SPM	Dinkes
		15 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	82.991.820	SPM	Dinkes
		16 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	813	SPM	Dinkes
		17 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	58.840.180	SPM	Dinkes
		18 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	813	SPM	Dinkes
		19 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	187.564.220	SPM	Dinkes
		20 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	813	SPM	Dinkes
		21 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	58.947.680	SPM	Dinkes
		22 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	813	SPM	Dinkes
		23 Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1.167.399.450	SPM	Dinkes
		24 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	813	SPM	Dinkes
		25 Jumlah dukungan logistik kesehatan	579.266.900	SPM	Dinkes

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		yang tersedia 26 Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	813	SPM	Dinkes
3	Pekerjaan Umum	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	-	-	DPUPR
		2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	-	-	DPUPR
		3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	-	-	DPUPR
		4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	-	-	DPUPR
		5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	18.191 meter	Data DPUPR	DPUPR
		6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	53.894 meter	Data DPUPR	DPUPR
		7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	33 pintu air	Data DPUPR	DPUPR

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		8. Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	-	-	PUPR/Perkim
		9. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	-	-	PUPR/Perkim
		10. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	77,74%	Data DPUPR	PUPR/Perkim
		11. Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	1 dokumen		Perkim
		12. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Tidak ada		Perkim
		13. Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	1 BUMD		Perkim
		14. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Tidak ada		Perkim
		15. Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	Tidak ada		Perkim
		16. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	39.773 unit		Perkim
		17. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	16.853 unit		Perkim

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		18. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	52.017 unit		Perkim
		19. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Tidak ada		Perkim
		20. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	Tidak ada		Perkim
		21. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	Tidak ada		Perkim
		22. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	100%		Perkim
		23. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	76.46%		Perkim
		24. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	32.40%		Perkim
		25. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	Tidak ada		Perkim
		26. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Tidak ada		Perkim
		27. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	Tidak ada		Perkim

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		28.Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	0,56%		Perkim
		29.Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Tidak ada		Perkim
		30.Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Tidak ada		DPM&PTSP
		31.Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	Tidak ada		DPM&PTSP
		32.Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada Perda No. 9 th 2015		DPM&PTSP
		33.Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada SK walikota No 188/155/423.011/2021		DPM&PTSP
		34.Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan			DPM&PTSP
		35.Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi			DPM&PTSP
		36.Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	740		DPM&PTSP
		37.Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	740		DPM&PTSP

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		38. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	78,93 KM	SK Jalan	PUPR
		39. Panjang jalan yang dibangun	Data tidak ada	-	PUPR
		40. Panjang jembatan yg dibangun	Data tidak ada	-	PUPR
		41. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	2778 m'	Bina marga	PUPR
		42. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	3 m'	Bina marga	PUPR
		43. Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	2600 m'	Bina marga	PUPR
		44. Panjang jembatan yang direhabilitasi	Data tidak ada	-	PUPR
		45. Panjang jalan yang dipelihara	871,66 m	Bina marga	
		46. Panjang jembatan yang dipelihara	846 m	Bina marga	PUPR
		47. Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	Per tahun 1 kali		PUPR PUPR PUPR
		48. Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	43 orang		PUPR
		49. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	34 orang		PUPR
		50. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan	Aplikasi SIPJAKI		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir			
		51.Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Belum ada		PUPR
		52.Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Belum ada		PUPR
		53.Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada aplikasi SIPJAKI		PUPR
		54.Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada aplikasi SIPJAKI		PUPR
		55.Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Ada aplikasi SIPJAKI		PUPR
		56.Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota	Ada aplikasi SIPJAKI		PUPR

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.			
		57. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Ada aplikasi SIPJAKI		PUPR
		58. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota			PUPR
		59. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Ada aplikasi SIPJAKI		PUPR
		60. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak ada		PUPR
		61. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk	Tidak ada		PUPR

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			
		62. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada		PUPR
		63. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada		PUPR
		64. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	Tidak ada		PUPR
		65. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	Tidak ada		PUPR
		66. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	Tidak ada		PUPR
		67. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	Tidak ada		PUPR
		68. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak ada		PUPR

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		69. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya 70. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya 71. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			PUPR PUPR PUPR
4	Perumahan Rakyat	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya 2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam 3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam 4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi 5. Jumlah unit rumah korban bencana yang	4356 KK 4356 Rumah 118 RT, 4356 KK, 16.359 Jiwa 15 Rumah -	Laporan Potensi Wilayah Bencana Laporan Potensi Wilayah Bencana Laporan Potensi Wilayah Bencana Laporan data rumah yang terkena bencana Kab/Kota	BPBD/Perkim BPBD/Perkim BPBD/Perkim BPBD/Perkim BPBD/Perkim

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi			
		6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	-		BPBD/Perkim
		7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	-		BPBD/Perkim
		8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	-		BPBD/Perkim
		9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	-		BPBD/Perkim
		10. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada		Perkim
		11. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada		Perkim
		12. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada		Perkim
		13. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan	76,63%		Perkim

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM			
		14. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	26,38%		Perkim
		15. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Tidak ada		Perkim
		16. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	39.44 Ha		Perkim
		17. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	172 Rumah		Perkim
		18. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	53.18 Ha		Perkim
		19. Jumlah rumah di kab/kota	52,017 rumah		Perkim
		20. Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	172 Rumah		Perkim
		21. Jumlah rumah tidak layak huni	1552 Rumah		Perkim
		22. Jumlah rumah yang tidak dihuni	Tidak ada		Perkim
		23. Rasio rumah dan KK	81,37%		Perkim
		24. Jumlah rumah pembangunan baru	Tidak ada		Perkim
		25. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	29 Perumahan		Perkim
		26. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	22.010		Perkim
		27. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	52.017 Rumah		Perkim

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		28. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site) 29. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH 30. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU 31. Jumlah pengembang yang tersertifikasi 32. Jumlah pengembang yang teregistrasi 33. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	88,74% 29 Perumahan		Perkim Perkim Perkim Perkim Perkim
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani 2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan 3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan 4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS 5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum 6. Tersedianya sarana prasarana minimal 7. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Pengaduan (6) 231 anggota 5 anggota 1 SOP -	E Lapor dan di luar e Lapor Bidang Linmas Kepegawaian	Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP BPBD

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		8. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	3%	(Jumlah penduduk pada daerah rawan bencana yang menerima informasi/jumlah penduduk pada rawan bencana) x 100%	BPBD
		9. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	-	-	BPBD
		10. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100%	-	BPBD
		11. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100%	(Jumlah dokumen rekon/ jumlah kegiatan rekon yang dilaksanakan) x 100%	BPBD
		12. Persentase warga negara yang ikut pelatihan	-	-	
		13. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	(Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops / jumlah warga Negara yang melapor ke pusdalops) x 100%	BPBD
		14. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100%	(jumlah warga negara yang mendapatkan perlindungan pada daerah terdampak bencana / jumlah warga negara yang daerahnya terdampak bencana) x 100%	BPBD
		15. Persentase kecepatan respon kurang dari	-	-	BPBD

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		24 jam untuk setiap status KLB			
		16. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	-	-	BPBD
		17. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	-	-	BPBD
		18. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	(jumlah korban bencana tertangani / jumlah korban bencana) x 100%	BPBD
		19. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	352 kali	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evaluasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	BPBD
		20. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	-	-	BPBD
		21. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	-	-	BPBD
		22. Pos Damkar yang dilengkapi dengan	-	-	BPBD

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa</p> <p>23. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi</p> <p>24. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran</p> <p>25. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran</p> <p>26. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran</p>	<p>27 jenis dan 128 unit</p> <p>18 orang</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>jumlah sarana dan prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi yang dimiliki</p> <p>jumlah petugas pemadam kebakaran yang mengikuti diklat</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>BPBD</p> <p>BPBD</p> <p>BPBD</p> <p>BPBD</p>
6	Sosial	<p>1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki</p> <p>2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia</p>	<p>1 PKSAI</p> <p>Anak terlantar = 22 Lansia terlantar = 490</p>	<p>Bidang Rehsos</p> <p>Bidang Rehsos</p>	<p>Dinsos</p> <p>Dinsos</p>

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	Gepeng terlantar = 82		
		3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	-	Bidang Rehsos	Dinsos
		4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	5 orang lansia	Bidang Rehsos	Dinsos
		5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1 unit	Sekretariat	Dinsos
		6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	-	Bidang Rehsos	Dinsos
		7. Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	-	Bidang Rehsos	Dinsos
		8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	-	Bidang Rehsos	Dinsos
		9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	-	Bidang Rehsos	Dinsos
		10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	-	Bidang Rehsos	Dinsos
		11. Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang	-	Bidang Rehsos	Dinsos

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		tersedia			
		12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	-	Bidang Rehsos	Dinsos
		13. Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	-	Bidang Rehsos	Dinsos
		14. Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	1 peksos & 4 TKSK	Bidang Rehsos	Dinsos
		15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	-	Bidang Rehsos	Dinsos
		16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	-	Bidang Rehsos	Dinsos
		17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	-	Bidang Rehsos	Dinsos
		18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar,	-	Bidang Rehsos	Dinsos

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar			
		19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	4 orang	Bidang Rehsos	Dinsos
		20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	10 orang	Bidang Rehsos	Dinsos
		21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	12 orang	Bidang Rehsos	Dinsos
		22. Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	-	Bidang linjamsos	Dinsos
		23. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	-	Bidang linjamsos	Dinsos
		24. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	-	Bidang linjamsos	Dinsos
		25. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	-	Bidang linjamsos	Dinsos
		26. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	-	Bidang linjamsos	Dinsos
		27. Jumlah pekerja sosial professional/tenaga	61 orang tagana	Bidang Rehsos, Fakmis,	Dinsos

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia		Linjamsos	
7	Tenaga Kerja	1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	1 dokumen	Bidang Tenaga Kerja	Disnaker
		2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	-		Disnaker
		3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota			Disnaker
		4. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	100%	Bidang Tenaga Kerja	Disnaker
		5. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	9,33%	Bidang Tenaga Kerja	Disnaker
		6. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	12,97%	Bidang Tenaga Kerja	Disnaker
		7. Persentase LPK yang terakreditasi	100%	Bidang Tenaga Kerja	Disnaker
		8. Persentase LPK yang memiliki perizinan	100%	Bidang Tenaga Kerja	Disnaker
		9. Jumlah penganggur yang dilatih	185 orang	Bidang Tenaga Kerja	Disnaker
		10. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100%	Bidang Tenaga Kerja	Disnaker
		11. Persentase penyerapan lulusan	100%	Bidang Tenaga Kerja	Disnaker
		12. Lulusan bersertifikat kompetensi	0	Bidang Tenaga Kerja	Disnaker
		13. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	0	Bidang Tenaga Kerja	Disnaker
		14. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja	0	Bidang Tenaga Kerja	Disnaker

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indonesia (CTKI)			
		15. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0	Bidang Tenaga Kerja	Disnaker
		16. Data tingkat produktivitas total	0	Bidang Tenaga Kerja	Disnaker
		17. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	20,09%	Bidang Tenaga Kerja	Disnaker
		18. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	7,41%	Bidang Tenaga Kerja	Disnaker
		19. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	27 perusahaan	Bidang Tenaga Kerja	Disnaker
		20. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	7,31%	Bidang Tenaga Kerja	Disnaker
		21. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	64,4%	Bidang Tenaga Kerja	Disnaker
		22. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	3,05%	Bidang Tenaga Kerja	Disnaker
		23. Jumlah mogok kerja	0	Bidang Tenaga Kerja	Disnaker
		24. Jumlah penutupan perusahaan	1	Bidang Tenaga Kerja	Disnaker
		25. Jumlah perselisihan kepentingan	0	Bidang Tenaga Kerja	Disnaker

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		26. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	Bidang Tenaga Kerja	Disnaker Disnaker
		27. Jumlah perselisihan PHK	11 perselisihan	Bidang Tenaga Kerja	Disnaker
		28. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK			Disnaker
		29. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	11 perselisihan	Bidang Tenaga Kerja	Disnaker
		30. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1	Bidang Tenaga Kerja	Disnaker
		31. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	11	Bidang Tenaga Kerja	Disnaker
		32. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	541 lowongan	Bidang Tenaga Kerja	Disnaker
		33. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	1162 pencari kerja	Bidang Tenaga Kerja	Disnaker
		34. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	11	Bidang Tenaga Kerja	Disnaker
		35. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0	Bidang Tenaga Kerja	Disnaker
		36. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	0	Bidang Tenaga Kerja	Disnaker
		37. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal	0	Bidang Tenaga Kerja	Disnaker

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dalam satu wilayah kab/kota			
		38. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	20	Bidang Tenaga Kerja	Disnaker
		39. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	630	Bidang Tenaga Kerja	Disnaker
		40. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	8 orang		Disnaker
		41. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	8 orang		Disnaker
		42. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	541		Disnaker
		43. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	1271		Disnaker
		44. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	12		Disnaker
		45. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	-		Disnaker

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG 2. Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota 3. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak 4. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal 5. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani 6. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan 7. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota) 8. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	75 opd 131 program 154 kegiatan 230 sub kegiatan 7 1 (P2TP2A) 100% 1 (P2TP2A) 0 3 organisasi		DPPPA&KB DPPPA&KB DPPPA&KB DPPPA&KB DPPPA&KB DPPPA&KB DPPPA&KB

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		9. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	140 orang		DPPPA&KB
		10. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	1 lembaga (P2TP2A)		DPPPA&KB
		11. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	1 lembaga (P2TP2A)		DPPPA&KB
		12. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1 program		DPPPA&KB
		13. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	1 lembaga (P2TP2A)		DPPPA&KB
		14. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%		DPPPA&KB
9	Pangan	1. Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1 tempat penyimpanan (BULOG)	Bidang Ketahanan Pangan	Pertanian&KP
		2. Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	2 pasar	Bidang Ketahanan Pangan	Pertanian&KP
		3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	1 dokumen	Bidang Ketahanan Pangan	Pertanian&KP
		4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan	1 dokumen	Bidang Ketahanan Pangan	Pertanian&KP

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang</p> <p>5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan</p> <p>6. Tertanganinya kerawanan pangan</p> <p>7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan</p> <p>8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar</p>	<p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p>	<p>Bidang Ketahanan Pangan</p> <p>Bidang Ketahanan Pangan</p> <p>Bidang Ketahanan Pangan</p> <p>Bidang Ketahanan Pangan</p>	<p>Pertanian&KP</p> <p>Pertanian&KP</p> <p>Pertanian&KP</p>
10	Pertanahan	<p>1. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota</p> <p>2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek</p> <p>3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee</p> <p>4. Dokumen Izin membuka tanah</p> <p>5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota</p>	<p>Tidak ada</p> <p>Tidak ada</p> <p>Tidak ada</p> <p>Tidak ada</p> <p>Tidak ada</p>		<p>DPMPTSP</p> <p>DPMPTSP</p> <p>DPMPTSP</p> <p>DPMPTSP</p> <p>DPMPTSP</p>
11	Lingkungan Hidup	<p>1. Hasil perhitungan provinsi terhadap :</p> <p>a. Indeks Kualitas Air (IKA)</p>	80	Bidang analisis &	DLH&KP

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		b. Indeks Kualitas Udara (IKU)	76,45	pengendalian dampak lingkungan	
		c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	24,78	Bidang konservasi SDA	
		2. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	98,7%	Bidang kebersihan lingkungan	DLH&KP
		3. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Persetujuan lingkungan = 14 Rekom IPLC/pertek BMAL = 4 Rekom TPS LB3 = 2	Bidang analisis & pengendalian dampak lingkungan	DLH&KP
		4. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Tidak ada	-	DLH&KP
		5. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota	Tidak ada	-	DLH&KP
		6. Terasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Tidak ada	-	DLH&KP
		7. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Tidak ada	-	DLH&KP
		8. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan	100%	Bidang analisis & pengendalian dampak lingkungan	DLH&KP

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani			
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan akta perkawinan 2. Penerbitan akta perceraian 3. Penerbitan akta kematian 4. Penyajian data kependudukan 	<p>97,54%</p> <p>87,39%</p> <p>96,43%</p> <p>100%</p>	<p>Dispenduk Capil</p> <p>Dispenduk Capil</p> <p>Dispenduk Capil</p> <p>Dispenduk Capil</p>	<p>Dipenduk Capil</p> <p>Dipenduk Capil</p> <p>Dipenduk Capil</p> <p>Dipenduk Capil</p>
13	Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa 2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya 3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan 4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan 			
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Belum tersedia		DPPPA&KB

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	670		DPPPA&KB
		3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	8196		DPPPA&KB
		4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	76,42%		DPPPA&KB
		5. Jumlah stakeholders / pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	15		DPPPA&KB
		6. Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100% (47 faskes)		DPPPA&KB
		7. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	27,16%		DPPPA&KB
		8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	1 (DP3AKB)		DPPPA&KB
		9. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	4,62%		DPPPA&KB
		10. Persentase kesertaan KB di Kabupaten	0,52% (MOP)		DPPPA&KB

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dan Kota dengan kesertaan rendah 11. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	91,94%		DPPPA&KB
15	Perhubungan	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C 2. Terlaksananya pelayanan uji berkala 3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi 4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas 5. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untu jaringan jalan Kabupaten/Kota	49% 97,24% 1 SK 51,83% 51,83%	Bidang Angkutan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Bidang Angkutan Bidang Lalu lintas Bidang Lalu lintas	Dishub Dishub Dishub Dishub Dishub
16	Komunikasi dan Informatika	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo 2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100% 100%	Bid. Layanan E-Gov Bid. Layanan E-Gov	Kominfo Kominfo

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	100%	Bid. Layanan E-Gov	Kominfo
		4. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	73%	Bid. Layanan E-Gov	Kominfo
		5. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100%	Bid. Layanan E-Gov	Kominfo
		6. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	63,4% %	Bid. Layanan E-Gov	Kominfo
		7. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam	73%	Bid. Layanan E-Gov	Kominfo

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik			
		8. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	40%	Bid. Layanan E-Gov	Kominfo
		9. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	Bid. Layanan E-Gov	Kominfo
		10. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	78,26%	Bid. Layanan E-Gov	Kominfo
		11. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100%	Bidang Statistik	Kominfo
		12. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100%	Bidang Statistik	Kominfo
		13. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	84,8%	Bidang Statistik	Kominfo
		14. Persentase data yang dapat berbagi pakai	100%	Bidang Statistik	Kominfo
		15. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100%	Bid. Layanan E-Gov	Kominfo

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		16. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	64%	Bid. Layanan E-Gov	Kominfo
		17. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	tersedia	Bid. Layanan E-Gov	Kominfo
		18. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	90,9%	Bid. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Kominfo
		19. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	88,3%	Bid. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Kominfo
		20. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100%	Bid. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Kominfo
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	0%	Bidang Koperasi	Koperasi&UM

		kabupaten/kota				
		2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%		Bidang Koperasi	Koperasi&UM
		3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	59%		Bidang Koperasi	Koperasi&UM
		4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	60%		Bidang Koperasi	Koperasi&UM
		5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	69%		Bidang Koperasi	Koperasi&UM
		6. Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1%		Bidang Koperasi	Koperasi&UM
		7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam	0%		Bidang Koperasi	Koperasi&UM

	daerah kabupaten/kota				
	8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0%		Bidang Koperasi	Koperasi&UM
	9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	23%		Bidang Koperasi	Koperasi&UM
	10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%		Bidang Koperasi	Koperasi&UM
	11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%		Bidang Koperasi	Koperasi&UM
	12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%		Bidang Koperasi	Koperasi&UM
	13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%		Bidang Koperasi	Koperasi&UM
	14. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	8%		Bidang Koperasi	Koperasi&UM
	15. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data	0%		Bidang Usaha Mikro	Koperasi&UM

		system (ODS)			
		16. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0%	Bidang Usaha Mikro	Koperasi&UM
		17. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0%	Bidang Usaha Mikro	Koperasi&UM
		18. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0%	Bidang Usaha Mikro	Koperasi&UM
		19. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0%	Bidang Usaha Mikro	Koperasi&UM
		20. Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	0%	Bidang Usaha Mikro	Koperasi&UM
18	Penanaman Modal	1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Tidak ada		DPM&PTSP
		2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tidak ada		DPM&PTSP
		3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal			DPM&PTSP
		4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting			DPM&PTSP
		5. Kegiatan pameran penanaman modal			DPM&PTSP
		6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal			DPM&PTSP
		7. Konsultasi perizinan dan non perizinan			DPM&PTSP

		penanaman modal 8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal 9. Laporan realisasi penanaman modal 10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota 11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN 12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota			DPM&PTSP DPM&PTSP DPM&PTSP DPM&PTSP
19	Kepemudaan dan Olahraga	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan 2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan 3. Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda 4. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan 5. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan 6. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	- - 90 orang - 76 orang 8	Bidang Pemuda dan olah raga Bidang Pemuda dan olah raga Bidang Pemuda dan olah raga Bidang Pemuda dan olah raga Bidang Pemuda dan olah raga Bidang Pemuda dan olah raga	Dispora Dispora Dispora Dispora Dispora Dispora
20	Statistik	1. Tersedianya buku profil daerah 2. Jumlah survey statistik sektoral yang	tersedia 1	Bidang Statistik Bidang Statistik	Kominfo Kominfo

		dilakukan			
		3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1	Bidang Statistik	Kominfo
		4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	1	Bidang Statistik	Kominfo
		5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	1	Bidang Statistik	Kominfo
		6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	100%	Bidang Statistik	Kominfo
		7. Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	100%	Bidang Statistik	Kominfo
21	Persandian	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0	Bid. Layanan E-Gov	Kominfo
		2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	100%	Bid. Layanan E-Gov	Kominfo
		3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0	Bid. Layanan E-Gov	Kominfo
		4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang	76%	Bid. Layanan E-Gov	Kominfo

		ditetapkan			
22	Kebudayaan	1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	-	Bidang Kebudayaan	Diknas
		2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	-	Bidang Kebudayaan	Diknas
		3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	3	Bidang kebudayaan	Diknas
		4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	130	Bidang kebudayaan	Diknas
		5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	16		Diknas
		6. Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	16		Diknas
		7. Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	-		Diknas
		8. Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	2		Diknas

	9. Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	2		Diknas
	10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	-		Diknas
	11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum dan Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	-		Diknas
	12. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	-		Diknas
	13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	-		Diknas
	14. Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	-		Diknas
	15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	-		Diknas
	16. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	-		Diknas
	17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	-		Diknas
	18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	-		Diknas
	19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang	-		Diknas

		melibatkan masyarakat			
23	Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk 2. Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat 3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk 4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan 5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat 6. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya 7. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa 8. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item) 	<p>15 %</p> <p>2,14%</p> <p>0,009%</p> <p>35%</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>Data Perpustakaan</p>	<p>Arsip&Perpus</p> <p>Arsip&Perpus</p> <p>Arsip&Perpus</p> <p>Arsip&Perpus</p> <p>Arsip&Perpus</p> <p>Arsip&Perpus</p> <p>Arsip&Perpus</p> <p>Arsip&Perpus</p>
24	Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik 4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN 	<p>90%</p> <p>100%</p> <p>20%</p> <p>-</p>	<p>Data Arsip Aktif</p> <p>Data Arsip In Aktif</p> <p>Data Arsip Statis</p> <p>Data statis arsip unit kerja</p>	<p>Arsip&Perpus</p> <p>Arsip&Perpus</p> <p>Arsip&Perpus</p> <p>Arsip&Perpus</p>

		5. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	100%	Kesesuaian data dengan NSPK	Arsip&Perpus
		6. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	80%	Kesesuaian data dengan NSPK	Arsip&Perpus
		7. Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	17%	Kesesuaian data dengan NSPK	Arsip&Perpus
		8. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	30%	Data statistic kearsipan	Arsip&Perpus
		9. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK			Arsip&Perpus
		10. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK			
25	Perikanan	1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	249	Bidang Perikanan tangkap	Perikanan
		2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	-	Dinas Perikanan	Perikanan
		3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang	109 kelompok	Bidang budidaya perikanan	Perikanan

		<p>usahnya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan</p> <p>4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)</p> <p>5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi</p>	<p>109 kelompok</p> <p>4.945 benih</p>	<p>Bidang budidaya perikanan</p> <p>Bidang budidaya perikanan</p>	<p>Perikanan</p> <p>Perikanan</p>
26	Pariwisata	<p>1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi</p> <p>2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata</p> <p>3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota</p> <p>4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan</p> <p>5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri</p> <p>6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota</p> <p>7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri</p> <p>8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi</p> <p>9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan</p>	<p>9 pokdarwis</p> <p>-</p> <p>14 TDUP</p> <p>217 orang</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>100%</p>	<p>Bidang Pariwisata</p>	<p>Dispora</p> <p>Dispora</p> <p>Dispora</p> <p>Dispora</p> <p>Dispora</p> <p>Dispora</p> <p>Dispora</p> <p>Dispora</p>

		10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	6 lokasi	Bidang Pariwisata	Dispora
27	Pertanian	1. Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan 2. Prasaran pertanian yang digunakan 3. Penerbitan izin usaha pertanian 4. Persentase prasarana yang digunakan 5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota 6. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	121,32 M2 6.350 M2 Tidak ada 1 dokumen Tidak ada 123,48 %	Bidang TPH&P Bidang TPH&P Bidang TPH&P Bidang TPH&P Bidang TPH&P	Pertanian&KP Pertanian&KP Pertanian&KP Pertanian&KP Pertanian&KP Pertanian&KP
28	Kehutanan	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura 2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga 3. Pemulihan ekosistem pada Tahura 4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	- - - -		
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota			
30	Perdagangan	1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan 2. Persentase penerbitan TDG 3. Persentase Gudang yang tidak	48 48 100% Tidak ada	- - Data gudang perusahaan	Disperindag Disperindag Disperindag

	mempunyai TDG			
	4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a. enerima waralaba dari waralaba dalam negeri b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	Tidak ada Tidak ada Tidak ada		Disperindag
	5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	Tidak ada		Disperindag
	6. Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	Tidak ada		Disperindag
	7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	-		Disperindag
	8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu	-		Disperindag
	9. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	302.000 ton	Data penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2020	Disperindag
	10. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	100,26%	Data UTTP tahun 2018-2020 UPT kemeterologian disperindag 2020	Disperindag
	11. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	-	-	Disperindag

31	Perindustrian	1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Tidak ada	DPM & PTSP	DPM&PPT / Disperindag
		2. Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	50%		Disperindag
		3. Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	100%		Disperindag
		4. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Tidak ada		Disperindag
		5. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	0,46%		SIINas dan disperindag
32	Transmigrasi	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya 2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya 3. Jumlah satuan pemukiman yang dibina			

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100%	Data Pokok Pendidikan	Diknas
		2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Data Pokok Pendidikan	Diknas
		3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100%	Data Pokok Pendidikan	Diknas
		4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	0,64	Data Pokok Pendidikan	Diknas

2	Kesehatan	1. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1,15 %		RSUD
		2. Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	50 %		Dinkes
		3. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	86,55 %		Dinkes
		4. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	93,36 %		Dinkes
		5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	94,95 %		Dinkes
		6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	71,34 %		Dinkes
		7. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	58,28 %		Dinkes
		8. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	97,60 %		Dinkes
		9. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	72,80 %		Dinkes
		10. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	87,98 %		Dinkes
		11. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %		Dinkes
		12. Persentase ODGJ berat yang	100 %		Dinkes

		mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar			
		13. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 %		Dinkes
		14. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	74,23%		Dinkes
3	Pekerjaan Umum	1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	-	-	Perkim
		2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	-	-	Perkim
		3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	100 %		PUPR/Perkim
		4. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	100%		Perkim
		5. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air	88,74%		Perkim

		limbah domestik			
		6. Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100%		DPM&PTSP
		7. Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	79,12%		PUPR
		8. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	-	-	PUPR
		9. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%		PUPR
4	Perumahan Rakyat	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	-		BPBD/Perkim
		2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	-		Perkim
		3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	44,61%	Jumlah laporan rehabilitasi yang sah	Perkim
		4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	2,98%		Perkim
		5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	27,12%		Perkim
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	96,62%		Satpol PP
		2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%		Satpol PP
		3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	7,76%	Laporan kejadian bencana yang sah	BPBD

		4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Nihil	Tidak adanya pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap masyarakat tahun 2021 Jumlah korban bencana yang dapat di evakuasi dan diselamatkan saat terjadi bencana Jumlah laporan kebakaran yang sah pada tahun 2021 Dihitung dari rata-rata respon time kejadian kebakaran pada Kota Pasuruan	BPBD
		5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	82,50%		BPBD
		6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%		BPBD
		7. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	6,66 menit		BPBD
6	Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	5,33%		Dinsos
		2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%		Dinsos
7	Tenaga Kerja	1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	7,69%		Disnaker
		2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,82%		Disnaker

		3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) 5. Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	37,86% 72,22% 44,02%		Disnaker Disnaker Disnaker
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD 2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota 3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	29,09% 0,01% 10,45%	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Perlindungan Anak / P2TP2A	DPPPA & KB DPPPA & KB DPPPA & KB
9	Pangan	1. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	0,40 %		Pertanian&KP
10	Pertanahan	1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan 2. Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum 3. Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal 4. Tersedianya Tanah Obyek Landreform	Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada		DPMPTSP DPMPTSP DPMPTSP DPMPTSP

		(TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee 5. Tersedianya tanah untuk masyarakat 6. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Tidak ada Tidak ada		DPMPTSP DPMPTSP
11	Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota 2. Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota 3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	55,90% 98,70% 50%	Bidang analisis & pengendalian dampak lingkungan Bidang kebersihan lingkungan Bidang analisis & pengendalian dampak lingkungan	DLH & KP DLH & KP DLH & KP
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Perekaman KTP Elektronik 2. Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA 3. Kepemilikan akta kelahiran 4. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	97,82% 94,22% 99,85% 100%	Dispenduk Capil	Dispenduk Capil
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal 2. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	-	Kota Pasuruan Tidak Memiliki Desa	-
14	Pengendalian Penduduk dan	1. TFR (Angka Kelahiran Total)	1,95	Buku saku parameter kependudukan jatim	DPPS & KB

	Keluarga Berencana	<p>2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)</p> <p>3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)</p>	<p>73,62%</p> <p>14,37%</p>	<p>2020</p> <p>Hasil olahan laporan SIDUGA/ REK-KAB.F1/ DAL/ 13</p> <p>Hasil olahan laporan SIDUGA/ REK-KAB.F1/ DAL/ 13</p>	<p>DPPS & KB</p> <p>DPPS & KB</p>
15	Perhubungan	<p>1. Rasio konektivitas Kabupaten/Kota</p> <p>2. V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota</p>	<p>0,32</p> <p>0,55</p>	<p>Bidang Angkutan</p> <p>Bidang Lalu lintas</p>	<p>Dishub</p>
16	Komunikasi dan Informatika	<p>1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo</p> <p>2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</p> <p>3. Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>100%</p> <p>73,08%</p> <p>70,07%</p>	<p>Bidang layanan E-Gov</p>	<p>Kominfo</p>
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<p>1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas</p> <p>2. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha</p>	<p>58,62%</p> <p>12,14%</p>	<p>Bidang Koperasi</p> <p>Bidang Usaha Mikro</p>	<p>Koperasi & UM</p> <p>Koperasi & UM</p>
18	Penanaman Modal	<p>1. Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota</p>	<p>2,86%</p>	<p>Data realisasi 2021</p>	<p>DPM & PTSP</p>
19	Kepemudaan dan Olahraga	<p>1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri</p>	<p>8%</p>	<p>Bidang Pemuda dan Olahraga</p>	<p>Dispora</p>

		2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	38%	Bidang Pemuda dan Olahraga	Dispora
		3. Peningkatan Prestasi Olahraga	196 medali	Bidang Pemuda dan Olahraga	Dispora
20	Statistik	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	Bidang Statistik	Kominfo
		2. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	Bidang Statistik	Kominfo
21	Persandian	1. Tingkat keamanan informasi pemerintah	100%	Bidang layanan E-Gov	Kominfo
22	Kebudayaan	1. Terlestarikannya Cagar Budaya	85,71%		Diknas
23	Perpustakaan	1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	-		Arsip&Perpus
		2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-		Arsip&Perpus
24	Kearsipan	1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	34,50%		Arsip&Perpus
		2. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1,83		Arsip&Perpus

25	Perikanan	1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	103,74%		Perikanan
26	Pariwisata	1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-	Bidang Pariwisata	Dispora
		2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	156,80%	Bidang Pariwisata	Dispora
		3. Tingkat Hunian Akomodasi	9,5%	Bidang Pariwisata	Dispora
		4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	-	Bidang Pariwisata	Dispora
		5. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	2,77%	Bidang Pariwisata	Dispora
27	Pertanian	1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun	5,83 ton	Bidang TPH&P	Pertanian & KP
		2. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	6,8%	Bidang peternakan	Pertanian & KP
28	Kehutanan		-	-	-
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	-	-	-
30	Perdagangan	1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	87,50%	-	Disperindag

		2. Persentase kinerja realisasi pupuk	100%	laporan posisi peredaran pupuk bersubsidi di Kota Pasuruan	Disperindag
		3. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	93,22%	data UTTP tahun 2018-2020 UPT kemetrolagian disperindag 2020	Disperindag
31	Perindustrian	1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	9,55%	Disperindag	DPM&PTSP /
		2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Tidak ada	PDRB Kota Pasuruan	Disperindag
		3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0,16%	DPM&PTSP dan SIINas	Disperindag
		4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Tidak ada	-	Disperindag
		5. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang	Tidak ada	-	Disperindag

		lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota 6. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	3 Informasi	SIINas	Disperindag
32	Transmigrasi		-	-	NIHIL

c. Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Dana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan Keuangan	1. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan 2. Rasio PAD 3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) 6. Opini Laporan Keuangan	22,41% 93,71% 3,10 Level 2 13,61% 3 WTP	BPKA BAPENDA Laporan pelaksanaan Quality Assurance (QA) atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Pasuruan Laporan Hasil penjaminan kualitas (QA atas penilaian mandiri kapabilitas APIP level 2 pada Inspektorat Kota Pasuruan Tahun 2018 BPKA Laporan hasil	BPKA BPKA/BAPENDA Inspektorat Inspektorat BPKA Inspektorat

				pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2019	
2	Pengadaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama 2. Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif 3. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan 4. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah 	<p>-</p> <p>2,17%</p> <p>49,17%</p> <p>47,19%</p>	BLP	BLP
3	Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 2. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 	<p>60,44%</p> <p>76,53%</p> <p>14,69%</p>	SIMASKOT	BKD
				SIMASKOT	BKD
				SIMASKOT	BKD

4	Manajemen Keuangan	1. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD 2. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD 3. Assets Management : a. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) b. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) c. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) d. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak) 4. Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	0,79% 0,99% YA YA YA YA -0,75%	BPKA BPKA BPKA BPKA BPKA	BPKA BPKA BPKA BPKA BPKA
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	1. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan 2. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	50% 54,55%		BPKA/Kominfo BPKA/Kominfo

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan janji kinerja Kepala Daerah atas penggunaan anggaran yang telah di sahkan oleh DPRD serta pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Adapun perjanjian kinerja perubahan Kota Pasuruan Tahun 2021 sebagaimana ditampilkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel Perjanjian Kinerja Kota Pasuruan Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET AWAL	TARGET PERUBAHAN	KET
1	2	3		4
Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan	Indeks Pendidikan	0,68	0,69	IKU
	Angka Partisipasi Kasar PAUD	90,0		
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI + Paket A	100	96,91	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs + Paket B	100	78,17	
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	9,0	9,33	
	Harapan Lama Sekolah	13,50	13,63	
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	0,64	0,79	IKU
	Angka Harapan Hidup (AHH)	71,30	71,60	
Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,06	6,23	IKU
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,50	71,66	
Meningkatnya daya saing sektor perindustrian, perdagangan dan jasa	Pertumbuhan Ekonomi	5,56	3,64	IKU
	Persentase peningkatan nilai produksi sektor industri	21,17	18,67	
	Persentase peningkatan nilai produksi sektor perdagangan	28,25	28,23	
	Persentase peningkatan nilai produksi sektor jasa	13,17%	2,54	
	Persentase peningkatan nilai produksi sektor pertanian dan perikanan	9,12%	2,10	
Menurunnya kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	6,46	6,88	IKU
	Indeks Gini	0,34	0,35	IKU
	Indeks kedalaman kemiskinan	1,07	1,15	
	Indeks keparahan kemiskinan	0,19	0,27	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET AWAL	TARGET PERUBAHAN	KET
1	2	3		4
Meningkatnya ketersediaan dan kelayakan prasarana dan sarana perekonomian dan sosial	Persentase jalan dan sarana pendukungnya dalam kondisi mantap	80,46	67,29	
	Cakupan layanan air bersih	85,51	88,58	
	Persentase Kawasan Kumuh	3,01%	1,06	
	Cakupan layanan sanitasi	86,23	90,38	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,34	67,00	IKU
	Persentase Ruang Terbuka Hijau	23,47%	24,63	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	60	73,84	IKU
	Predikat SAKIP Kota	BB	B	
	Maturitas SPIP	2,3	2,3	
	Opini BPK atas LKD	WTP	WTP	
Menurunnya ketergantungan keuangan daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah	84,22	16,7	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80,85	
Meningkatnya kerukunan masyarakat	Indeks Modal Sosial	51,26	51,26	IKU
	Persentase potensi konflik ipoleksosbud yang ditangani	0%	5,00	
Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat	Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif	70%	65,19	
	Persentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan	37%	13,04	

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Bagan berikut adalah uraian pencapaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pasuruan tahun 2021 :

Tabel Capaian Perjanjian Kinerja Kota Pasuruan Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	%
1	2			4
Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan	Indeks Pendidikan	0,68	0,69	
	Angka Partisipasi Kasar PAUD	83,97		
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI + Paket A	100	96,91	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs + Paket B	92,5	78,17	
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	9,11	9,33	
	Harapan Lama Sekolah	13,65	13,63	
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	0,79	0,79	
	Angka Harapan Hidup (AHH)	71,60	71,60	
Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,04	6,23	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	65,07	71,66	
Meningkatnya daya saing sektor perindustrian, perdagangan dan jasa	Pertumbuhan Ekonomi	3,30	3,64	
	Persentase peningkatan nilai produksi sektor industri	9,7	18,67	
	Persentase peningkatan nilai produksi sektor perdagangan	6,16	28,23	
	Persentase peningkatan nilai produksi sektor jasa	15,63	2,54	
	Persentase peningkatan nilai produksi sektor pertanian dan perikanan	-0,045	2,10	
Menurunnya kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	7,39	6,88	
	Indeks Gini	0,45	0,35	
	Indeks kedalaman kemiskinan	0,92	1,15	
	Indeks keparahan kemiskinan	0,23	0,27	
Meningkatnya ketersediaan dan kelayakan prasarana dan sarana	Persentase jalan dan sarana pendukungnya dalam kondisi mantap	67,29	69,8	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	%
1	2			4
perekonomian dan sosial	Cakupan layanan air bersih	88,58	87,43	
	Persentase Kawasan Kumuh	1,06	2,55	
	Cakupan layanan sanitasi	90,38	88,04	
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,00	64,918
	Persentase Ruang Terbuka Hijau	24,63	24,63	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	73,84		
	Predikat SAKIP Kota	B	B	
	Maturitas SPIP	2,3		
	Opini BPK atas LKD	WTP	WTP	
Menurunnya ketergantungan keuangan daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah	16,7	79,71	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,85	79,17	
Meningkatnya kerukunan masyarakat	Indeks Modal Sosial	51,26	72,36	
	Persentase potensi konflik ipoleksosbud yang ditangani	5,00	5,05	
Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat	Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif	65,19	79	
	Persentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan	13,04	8	

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Bagan berikut adalah uraian pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pasuruan tahun 2020 dan tahun 2021 :

Tabel Capaian IKU Kota Pasuruan

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		REALISASI		%
	RPJMD	2021	2020	2021	
Indeks Pendidikan	0,72	0,69	0,68	0,69	
Indeks Kesehatan	81,79	0,79	0,79	0,79	
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,71	6,23	6,33	6,23	
Pertumbuhan Ekonomi	6,07	3,64	-4,33	3,64	
Tingkat Kemiskinan	7,37	13,97	13,40	13,97	
Indeks Gini	0,47	0,335	0,30	0,335	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,12	64,91	64,91	55,19	
Indeks Reformasi Birokrasi	77				
Indeks Modal Sosial	67,12	72,36	72,36	72,36	
RATA-RATA CAPAIAN IKU					

d. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

Bagan berikut adalah uraian pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pasuruan tahun 2021 :

Tabel Capaian IKU Kota Pasuruan

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		REALISASI				%
	RPJMD	2021	2018	2019	2020	2021	
Indeks Pendidikan	0,72	0,69	0,68	0,68	0,68	0,69	
Indeks Kesehatan	81,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,71	6,23	4,55	5,06	3,69	6,23	
Pertumbuhan Ekonomi	6,07	3,64	5,47	5,56	-4,33	3,64	
Tingkat Kemiskinan	7,37	13,97	7,49	6,46	6,66	13,97	
Indeks Gini	0,47	0,35	0,39	0,34	0,318	0,35	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,12		67,28	66,34	64,91	55,19	
Indeks Reformasi Birokrasi	77		64	61,62			
Indeks Modal Sosial	67,12		-	62,45	72,36		
RATA-RATA CAPAIAN IKU							

Penjelasan ringkas :

a. Indeks Pendidikan 0,69

Indeks pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang pendidikan. Indikator pembentuk indeks Pendidikan adalah Angka Melek Huruf dan Rata-rata lama Sekolah. Indeks pendidikan kota Pasuruan tahun 2021 sebesar 0,69. Mengalami kenaikan sebesar 0,01 jika dibandingkan tahun 2020.

b. Indeks Kesehatan 0,79

Peningkatan indeks kesehatan sangat penting dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Salah satunya dapat ditingkatkan dengan melihat derajat Kesehatan. Indeks kesehatan kota Pasuruan tahun 2021 sebesar 0,79. Jika dibandingkan tahun 2020, maka pada tahun 2021 sama besar dengan tahun 2020.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka 6,23

Dalam setahun terakhir, pengangguran berkurang 10,26 ribu orang, sedangkan TPT naik menjadi 6,23 persen pada Februari 2021. Tingkat pengangguran terbuka meningkat jika dibandingkan dengan besaran pada tahun 2020.

d. Pertumbuhan Ekonomi 3,64

Pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 7,97 dibanding tahun 2020, maka pertumbuhann ekonomi di tahun 2021 sebesar 3,64.

e. Tingkat Kemiskinan 13,97

Tingkat Kemiskinan Kota Pasuruan tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar 7,31 yang berarti bertambahnya ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

f. Indeks Gini 0,35

Indeks Gini Kota Pasuruan tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun 2020 yakni sebesar 0,05. Yang berarti tingkat pemerataan pendapatan masih pada tingkat ketimpangan rendah.

g. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 55,19

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran kondisi lingkungan hidup yang menjadi salah satu indicator kinerja pemerintah daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup kota Pasuruan tahun 2021 menunjukkan

kategori cukup baik dengan angka 55,19. Akan tetapi angka tersebut lebih kecil dibanding tahun 2020.

- h. Indeks Reformasi Birokrasi
- i. Indeks Modal Sosial
- j. Rasio kemandirian keuangan daerah 79,71

Menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal (pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dengan membayar pajak. Presentase kemandirian keuangan pada tahun 2021 meningkat jika dibanding tahun 2020.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai

1. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan dibidang pendidikan yang mempunyai kedudukan strategis, mengingat kualitas sumber daya manusia yang tercermin didalamnya sangat menentukan tingkat produktivitas suatu bangsa. Indeks pendidikan diukur dari kemampuan baca tulis orang dewasa secara tertimbang (dua pertiga) dan rata-rata tahun bersekolah. Kemampuan baca-tulis orang dewasa tercermin dari data angka melek huruf (*literacy rate*) yaitu proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis (baik huruf latin maupun huruf lainnya). Rata-rata lama sekolah (*means-years of schooling*) menunjukkan jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun keatas. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah.

Dibanding dua komponen pembentuk IPM yang lain yaitu indeks Kesehatan dan indeks Daya Beli, pencapaian indeks Pendidikan di Kota Pasuruan selama ini relatif paling besar. Kondisi ini diharapkan bisa menjadi motor penggerak pembangunan dibidang lainnya.

2. Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan merupakan alat ukur tingkat kesehatan masyarakat pada sebuah daerah. Untuk menilai kondisi kesehatan masyarakat dibutuhkan suatu ukuran yang dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kondisi kesehatan masyarakat. Dalam pengukuran indeks kesehatan, dibutuhkan epidemiologi penghitungan, antara lain:

- a. Indeks Fertilitas
- b. Indeks Morbiditas
- c. Indeks Mortabilitas.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat penganggur terbuka terdiri dari empat komponen, yaitu :

- a. Mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d. Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi adalah sebuah kondisi dimana meningkatnya pendapatan karena terjadi peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan pendapatan tersebut tidak dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan jumlah penduduk, dan dapat kita lihat dari output yang meningkat, perkembangan teknologi, dan berbagai inovasi di bidang sosial.

Pertumbuhan Ekonomi juga dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan perekonomian negara dalam jangka waktu tertentu untuk menuju kondisi ekonomi yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi identik dengan kenaikan kapasitas produksi yang diwujudkan melalui kenaikan pendapatan nasional.

5. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan

oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dll.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

- a. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
- b. Gambaran tentang kebutuhan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah diatasi daripada dua gambaran yang lainnya.
- c. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai.

6. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.

7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah :

- a. Indeks Kualitas / Pencemaran Air.
- b. Indeks Kualitas / Pencemaran Udara.
- c. Indeks Tutupan Hutan / Lahan.

8. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Demokrasi Indonesia merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu : kebebasan sipil, hak-hak politik dan Lembaga demokrasi. Klasifikasi indeks demokrasi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Baik (indeks > 80)
2. Sedang (60-80)
3. Buruk (indeks < 60)

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu cara untuk mengukur tingkat keefektifan dan keefisienan yaitu dengan menggunakan Indeks Reformasi Birokrasi.

9. Indeks Modal Sosial

Modal sosial melekat dalam hubungan sosial sehingga salah satu strategi pembangunan yang dapat dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat. Indeks Modal Sosial dapat diartikan sebagai pengukuran serangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama. Modal sosial terbentuk dari hubungan sosial antar manusia sehingga besaran modal sosial tergantung pada kapabilitas sosial individu. Diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan manusia.

f. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

1. Indeks Pendidikan

Kota Pasuruan dapat meningkatkan capaian indeks pendidikan yang pada tahun 2020 mencapai 0,68 dan pada tahun 2021 sebesar 0,69 atau naik sebesar 0,01. Pencapaian Indeks Pendidikan ditunjang oleh keberhasilan dengan adanya integrasi antara Program yang telah direncanakan, antara lain:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Program Pendidikan Masyarakat.
3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
4. Program Pendidikan Menengah.
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan tujuan ini :

- Tingginya minat serta daya tarik masyarakat untuk bersekolah di Kota Pasuruan.
- Meningkatnya tingkat partisipasi dan angka kelulusan tingkat pendidikan dasar.
- Mudah nya para peserta didik untuk mengakses sarana Pendidikan.
- Meningkatnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya.
- Untuk memenuhi persyaratan memasuki dunia kerja dimasa mendatang

Hambatan/Masalah :

- Peningkatan kesejahteraan pendidik belum diikuti dengan kualitas pendidik.
- Kesenjangan pendidikan diniyah dan pesantren salafiyah dengan pendidikan umum.
- Penyebaran sarana pendidikan dan tenaga pendidik yang belum merata

Strategi/Upaya Pemecahan Masalah :

- Perlu adanya pelatihan dan pengembangan keterampilan teknik mengajar pendidik untuk meningkatkan kualitas pendidik yang terampil.
- Perlu adanya koordinasi dan kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan dan Kemenag terkait fasilitasi dan pembinaan pendidikan diniyah salafiya.
- Pemantauan kualitas pendidikan di daerah terpencil.

- Pemerintah membangun sekolah-sekolah beserta tenaga pendidiknya di beberapa daerah terpencil yang mudah di akses

2. Indeks Kesehatan

Kota Pasuruan dapat meningkatkan capaian indeks kesehatan yang pada tahun 2020 mencapai 0,79 tetap pada tahun 2021 sebesar 0,79 atau tetap tidak ada kenaikan atau penurunan. Pencapaian ini dikarenakan adanya integrasi antara Program yang telah direncanakan, antara lain:

1. Program Kesehatan masyarakat.
2. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
3. Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan tujuan ini:

- Meningkatnya masyarakat yang *care* terhadap kesehatannya.
- Meningkatnya kualitas pada beberapa sarana kesehatan milik pemerintah.
- Banyaknya program layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin.
- Terciptanya lingkungan hidup sehat.
- Perlindungan terhadap Orang Gengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan mendukung Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur "Nol Kasus Pemasungan".

Hambatan/Masalah :

- Tingginya stigma negatif terhadap pemeriksaan penyakit rawan (HIV), sehingga masih banyak sasaran yang tidak mau mengikuti pemeriksaan KT HIV.
- Masih sedikitnya kelurahan yang ODF (*open defecation free*) di Kota Pasuruan.
- Masih kurang sadarnya masyarakat mengenai rumah tangga dengan jamban sehat.
- Belum terpenuhinya SDM Kesehatan yaitu sanitarian di Puskesmas.

Strategi/Upaya Pemecahan Masalah :

- Melakukan pencegahan terhadap penyakit (preventive)
- Membuat program jemput bola untuk pemeriksaan penderita penyakit beresiko.
- Memperbanyak kelurahan yang ODF.

- Memperbanyak sosialisasi mengenai rumah tangga dengan jamban sehat.
- Menambah tenaga kesehatan sesuai kebutuhan guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan pada masyarakat.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Kota Pasuruan dapat meningkatkan capaian tingkat pengangguran terbuka yang pada tahun 2020 mencapai 3,69 meningkat pada tahun 2021 sebesar 6,23 atau meningkat sebesar 2,54. Pencapaian ini dikarenakan adanya integrasi antara Program yang telah direncanakan, antara lain :

- a. Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
- b. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
- c. Program Peningkatan kualitas kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi.
- d. Program Pemberdayaan Usaha Mikro.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan tujuan ini:

- Semakin banyaknya angkatan kerja yang mengikuti event job fair yang telah diadakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan
- Semakin banyak perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti acara job fair di Kota Pasuruan.
- Banyaknya UM baru yang tumbuh diperiode tahun 2020.

Hambatan/Masalah :

- Banyaknya angkatan kerja baru yang belum mendapatkan pekerjaan.
- Masih banyak angkatan kerja yang pilih-pilih lowongan pekerjaan.
- Jumlah lowongan pekerjaan yang lebih sedikit/terbatas daripada jumlah angkatan kerja baru.
- Tingginya persyaratan pekerja yang dipersyaratkan oleh perusahaan penyedia lapangan pekerjaan.

Strategi/Upaya Pemecahan Masalah :

- Memperbanyak event-event job fair guna menyerap tenaga kerja yang masih mencari lowongan pekerjaan.
- Melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah banyak.

- Mengadakan pelatihan-pelatihan kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan.
- Memberi kesempatan pada IKM untuk mempromosikan produk-produknya.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan pada tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun 2020. Yakni sebesar -4,33 pada 2020 dan 3,64 pada 2020. Beberapa integrasi antara Program yang telah direncanakan, antara lain:

- a. Program Pemberdayaan UMKM.
- b. Program Peningkatan kualitas perdagangan.
- c. Program Penataan PKL.
- d. Program Peningkatan kualitas pelayanan pasar.
- e. Program Peningkatan IKM.

Faktor-faktor yang mempengaruhi:

- Adanya perbaikan sarana-sarana pendukung UMKM.
- Meningkatnya pengawasan terhadap barang-barang yang beredar.
- Tertibnya PKL karena pembinaan yang terus menerus dilakukan.
- Meningkatnya nilai produksi IKM karena metode promosi yang dilakukan tepat sasaran.
- Meningkatnya kerjasama kemitraan IKM.
- Semakin baiknya sarana prasarana pada setiap Pasar yang ada.

Hambatan/Masalah :

- Masih terbatasnya kemampuan daerah dalam peningkatan PAD;
- Diperlukan revitalisasi sektor perdagangan, industri pengolahan dan jasa;
- Rendahnya nilai investasi untuk mendorong aktivitas ekonomi produktif;
- Belum optimalnya pemanfaatan sektor perikanan dan kelautan di beberapa wilayah potensial yang menjadi sektor unggulan;
- Kurangnya kreatifitas, inovasi dan etos kerja bidang perekonomian
- Tingkat inflasi yang masih tinggi

Strategi/Upaya Pemecahan Masalah :

- Menambah sumber-sumber pendapatan baru untuk menambah PAD.
- Menambah jumlah dan kualitas sarana perdagangan, industri dan jasa.
- Menciptakan inovasi-inovasi baru guna menarik investor untuk menanamkan modalnya.
- Mengoptimalkan pemanfaatan sektor perikanan dan kelautan.
- Menambah pelatihan dan peningkatan SDM bidang perekonomian.

5. Tingkat Kemiskinan

Kota Pasuruan dapat meningkatkan capaian tingkat kemiskinan yang pada tahun 2020 mencapai 6,66 meningkat pada tahun 2021 sebesar 13,97 atau meningkat sebesar 7,31. Beberapa integrasi antara Program yang telah direncanakan, antara lain :

- a. Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
- b. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- c. Program Pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Faktor-faktor yang mempengaruhi:

- Adanya program jaminan kesehatan gratis bagi warga miskin.
- Adanya program sekolah gratis bagi anak keluarga miskin.
- Banyak kegiatan yang bersifat pemberdayaan bagi masyarakat kurang mampu untuk bisa hidup mandiri.
- Banyak kegiatan pemberian santunan maupun bantuan guna memperkecil pengeluaran bagi masyarakat miskin.
- Kesempatan kerja masyarakat pekerja.
- Tingkat investasi.

Hambatan/Masalah :

- Kurangnya koodinasi antar dinas terkait usaha penurunan kemiskinan sehingga bantuan kurang tepat sasaran.
- Kesempatan kerja yang semakin sempit

Strategi/Upaya Pemecahan Masalah :

- Memanfaatkan data kemiskinan yang telah terintegrasi dengan data kependudukan, sehingga bantuan sosial yang akan disalurkan lebih tepat sasaran.
- Memperbanyak kegiatan yang bersifat pemberdayaan sehingga warga miskin bisa mandiri mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri

6. Indeks Gini

Kota Pasuruan dapat meningkatkan capaian Indeks Gini yang pada tahun 2020 mencapai 0,30 meningkat pada tahun 2021 sebesar 0,35 atau meningkat sebesar 0,05. Keberhasilan ini dikarenakan adanya integrasi antara Program yang telah direncanakan, antara lain:

- a. Program Pemberdayaan Usaha Mikro.
- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan tujuan ini:

- Berkembangnya sektor-sektor niaga yang bisa menyerap tenaga kerja dan bisa menambah pendapatan masyarakat
- Relatif kondusifnya kondisi ekonomi sehingga konflik sosial bisa ditekan
- Menurunnya luasan kawasan kumuh
- Perbaikan sarana prasarana umum yang membuat kualitas hidup masyarakat menjadi meningkat
- Perbaikan rumah-rumah tidak layak huni sehingga layak untuk ditempati

Hambatan/Masalah :

- Pembangunan yang belum merata, khususnya daerah pesisir.
- Kultur masyarakat yang memandang pendidikan itu tidak penting, sehingga banyak anak usia sekolah yang membantu mencari nafkah orang tuanya.
- Kecenderungan masyarakat yang lebih suka mendapatkan bantuan dari Pemerintah daripada harus susah-susah bekerja untuk mendapatkan penghasilan

Strategi/Upaya Pemecahan Masalah :

- Pembangunan yang merata diseluruh wilayah Kota, pembangunan jalan lingkar utara (daerah pesisir)
- Mengaktifkan forum komunikasi masyarakat dengan pemerintah
- Meningkatkan kesetaraan gender
- Mengalihkan bantuan sosial dari awalnya berupa uang tunai menjadi barang/alat sebagai modal usaha
- Melindungi kelompok rawan ekonomi dengan menjamin kehidupan mereka

7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kota Pasuruan dapat meningkatkan capaian IKLH yang pada tahun 2020 mencapai 64,91 menurun pada tahun 2021 sebesar 55,19 atau menurun sebesar 9,72. Pencapaian ini dikarenakan adanya integrasi antara Program yang telah direncanakan, antara lain :

- a. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan
- b. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau
- c. Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan
- d. Program Pembinaan lingkungan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan tujuan ini:

- Bertambahnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dibangun, sebagian besar adalah taman-taman yang bisa juga sebagai tempat rekreasi gratis bagi masyarakat Kota.
- Penerapan sekolah adi wiyata pada semua sekolah di wilayah Kota
- Dibentuknya Satgas Kebersihan yang bertugas menjaga dan meningkatkan kebersihan pada titik-titik Kota yang kotor
- Adanya pengelolaan sampah secara terpadu dan semakin banyaknya bank sampah yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat.

Hambatan/Masalah :

- Belum optimalnya pengelolaan sampah secara terpadu
- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan sungai
- Terbatasnya tenaga SDM sehingga belum menyentuh seluruh cakupan daerah pelayanannya

Strategi/Upaya Pemecahan Masalah :

- Pengawasan dan pemantauan kandungan air sungai dan udara guna mengetahui kualitas air dan udara di kawasan Kota secara berkala
- Pelaksanaan Car Free Day secara rutin yang bisa mengurangi beban polusi Kota
- Pelaksanaan penanaman 1 juta pohon guna memperbanyak ruang terbuka hijau di wilayah Kota
- Penerapan *eco office* di wilayah Kota melalui kebijakan Walikota

8. Indeks Reformasi Birokrasi

Kota Pasuruan dapat meningkatkan capaian Indeks Reformasi Birokrasi yang pada tahun 2020 mencapai **62.19** pada tahun 2021 sebesar **63,14**. Pencapaian ini dikarenakan adanya integrasi antara Program yang telah direncanakan, antara lain :

- a. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Program Penataan Perundang-Undangan.
- c. Program Penataan ASN.
- d. Program Peningkatan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- e. Program Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan tujuan ini:

- Banyak Perangkat Daerah yang sudah memahami alur SAKIP, sehingga bisa meningkatkan kinerjanya.
- Telah ditandatanganinya Pakta Integritas Perangkat Daerah.
- Tingkat Maturitas SPIP berada di level 2.
- Opini BPK atas LKD 2021 Kota Pasuruan telah mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- Hasil Evaluasi SAKIP Kota Pasuruan 2021 mendapatkan nilai B.

Hambatan/Masalah :

- Masih ada beberapa UPP yang tidak menjalankan prosedur sesuai SOP nya.
- Masih ada beberapa Perangkat Daerah yang berbicara Output pada target kinerjanya, karena terbentur pada dasar perencanaan (RPJMD) yang belum disahkan perubahannya.
- Masih rendahnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada Perangkat Daerah.
- Masih rendahnya kualitas penerapan roadmap reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah.

Strategi/Upaya Pemecahan Masalah :

- Penerapan si-Akur guna menyinkronkan dan memperjelas kinerja Perangkat Daerah.
- Penerapan si-Jaja guna memperjelas target dan realisasi kinerja setiap ASN.
- Integrasi database kinerja, mulai dari sektor perencanaan sampai sektor keuangan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

- *Refocusing* program pada perencanaan tahun selanjutnya, sehingga arah pembangunan akan lebih terfokus di tiap tahunnya
- Menyegerakan pengesahan Perubahan RPJMD untuk menjadi dasar pembuatan RENSTRA Perangkat Daerah.
- Perlunya pendampingan kepada Perangkat Daerah khususnya dalam penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan.
- Perlunya peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pencapaian 8 goals reformasi birokrasi.

9. Indeks Modal Sosial

Masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi akan membuka kemungkinan menyelesaikan kompleksitas persoalan dengan lebih mudah. Melalui rasa saling percaya, toleransi, dan kerja sama mereka dapat membangun jaringan di dalam kelompok masyarakatnya maupun dengan kelompok masyarakat lain. Sebaliknya, modal sosial yang lemah akan meredupkan semangat gotong-royong, memperparah kemiskinan, meningkatkan pengangguran, kriminalitas, dan menghalangi setiap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Modal Sosial diantaranya adalah:

- Kepercayaan publik

Modal sosial yang sebenarnya hanyalah norma-norma dan nilai-nilai bersama yang dibangkitkan oleh kepercayaan, dimana kepercayaan merupakan dasar bagi sikap keteraturan, kejujuran, dan perilaku kooperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas masyarakat

- keterbukaan informasi

individu atau kelompok yang seperti itu dapat dikatakan mempunyai modal sosial yang tinggi dan individu atau kelompok yang mempunyai modal sosial yang tinggi akan mempunyai kesempatan yang lebih dalam mengambil keputusan ekonomi yang lebih tepat dan cepat sehingga menghasilkan keuntungan.

- Norma dan sanksi yang efektif

Hambatan/masalah :

- Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
- Pada era saat ini banyak masyarakat yang percaya terhadap hoax atau fake news yang akan Mengikis fondasi kepercayaan yang mendasari peradaban yang sehat
- Sikap apatis masyarakat terhadap pemerintah

Strategi/Upaya Pemecahan Masalah :

- pemupukan rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan, dan empati yang tinggi
- Kesadaran masyarakat
- sikap gotong-royong
- serta contoh-contoh yang baik dari para pengambil kebijakan dan pemimpin

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pada pasal 1 ayat (11) disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Berdasarkan ketentuan pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada kepala daerah, selaras dengan tindak lanjut implementasi tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan tugas pembantuan diatur dalam pasal yang sama pada ayat (4) yang pada intinya dinyatakan bahwa kegiatan tugas pembantuan di daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan gubernur, bupati atau walikota.

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan. Penyelenggaraan tugas pembantuan dilakukan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.

Maksud Pemberian Tugas Pembantuan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta

pelayanan umum, sekaligus membantu pengembangan pembangunan bagi daerah (provinsi dan kabupaten/kota serta desa). Karena pada hakikatnya urusan pemerintahan yang dapat ditugas bantukan kepada daerah dan kelurahan adalah urusan pemerintahan yang berasal dari kewenangan yang bersifat atributif, bukan kewenangan yang bersifat delegatif. Maka tugas pembantuan merupakan tugas membantu di dalam menjalankan urusan pemerintahan dalam tahap implementasi kebijakan operasional di daerah.

Pemerintah Kota Pasuruan pada tahun 2021 tidak menerima Tugas Pembantuan, sehingga tidak ada yang dilaporkan (**NIHIL**).

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Bidang Urusan Pendidikan

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah.

Adapun SPM dibidang Urusan Pendidikan, antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan
a.	Pendidikan Anak Usia Dini
b.	Pendidikan Dasar
c.	Pendidikan Kesetaraan

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Pelayanan pendidikan anak usia dini di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan ditangani oleh Bidang PAUD dan Dikmas. Namun dalam melaksanakan tugasnya bidang ini bekerjasama dengan bidang lain yang terkait seperti Bidang Ketenagaan, Bidang Perguruan Agama (Pergurag), Bagian kesekretariatan dan Satuan-satuan Pendidikan. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas melaksanakan, menyusun rencana, memberi petunjuk, mengkoordinasi dan menilai pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum, mengkoordinasi pelaksanaan pengadaan, mendistribusi sarana pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan pelayanan pendidikan

dasar di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan ditangani oleh seksi Pendidikan Madrasah dan satuan-satuan pendidikan.

b. Pendidikan Dasar

Pelayanan pendidikan dasar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan ditangani oleh Bidang Pendidikan Dasar. Namun dalam melaksanakan tugasnya bidang ini bekerjasama dengan bidang lain yang terkait seperti Bidang Ketenagaan, Bidang Perguruan Agama (Pergurag), Bagian kesekretariatan dan Satuan-satuan Pendidikan. Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan, menyusun rencana, memberi petunjuk, mengkoordinasi dan menilai pelaksanaan kegiatan Pendidikan Dasar serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum, mengkoordinasi pelaksanaan pengadaan, mendistribusi sarana pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan pelayanan pendidikan dasar di Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan ditangani oleh Seksi Pendidikan Madrasah dan satuan-satuan pendidikan.

c. Pendidikan Kesetaraan

Pelayanan pendidikan kesetaraan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan ditangani oleh Bidang PAUD dan Dikmas.

4.1.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase (%) Jumlah Warga Kota Usia 5 - 6 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	100 %	2021
2.	Pendidikan Dasar	Persentase (%) Warga Kota Usia 7-15 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Pendidikan Dasar (SD/SMP)	100 %	2021
3.	Pendidikan Kesetaraan	Persentase (%) Warga Kota Usia 7-18 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Pendidikan Kesetaraan	100 %	2021

4.1.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2025)	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2021		
					Pembilang	Penyebut	Nilai
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase (%) Jumlah Warga Kota Usia 5 - 6 Tahun yang sudah tamat	100 %	Dinas Pendidikan dan	3.378	3.378	100 %

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2025)	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2021		
					Pembilangan	Penyebut	Nilai
		atau sedang belajar di satuan PAUD		Kebudayaan			
2.	Pendidikan Dasar	Persentase (%) Warga Kota Usia 7-15 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Pendidikan Dasar (SD/SMP)	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18.195	18.195	100 %
3.	Pendidikan Kesetaraan	Persentase (%) Warga Kota Usia 7-18 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Pendidikan Kesetaraan	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	206	32.095	0,64 %

Sarana Dan Prasarana Bidang Pendidikan Serta Personil

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH GEDUNG	JUMLAH KELAS	JUMLAH MURID	TENAGA PENGAJAR	KETERANGAN
1	Sekolah Dasar Negeri	46	516	13.280	763	
2	Sekolah Dasar Swasta Dan Sederajat	20	215	5.107	324	
3	Sekolah Menengah Pertama Negeri	11	233	7.289	393	
4	Sekolah Menengah Pertama Swasta	18	80	2.111	221	
5	Sekolah PAUD Negeri	2	14	232	21	
6	Sekolah PAUD Swasta	106	773	4.804	439	

4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Pendidikan, antara lain :

No	Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	10.188.871.267
2.	Pendidikan Dasar	34.044.026.322
3.	Pendidikan Kesetaraan	13.928.969.362

4.1.5. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM.

Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Pendidikan, antara lain:

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan	Dukungan Personil
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	50 Orang PNS 27 Orang Non PNS
2.	Pendidikan Dasar	
3.	Pendidikan Kesetaraan	

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun permasalahan yang ada dalam pelaksanaan SPM di Bidang Urusan Pendidikan, adalah :

- Data peserta didik sesuai usia sekolah masih banyak yang kurang sesuai dikarenakan Pengisian form pendataan masih banyak yang kurang memahami, hal tersebut menyebabkan kesalahan dalam pengisian.

Adapun solusi yang diupayakan guna meningkatkan pelaksanaan SPM Bidang Urusan Pendidikan, adalah :

- Sosialisasi form pendataan dan pendampingan pengisian terhadap lembaga, khususnya lembaga PAUD, TK, RA, MI, dan Kesetaraan.

4.2. Bidang Urusan Kesehatan

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan.

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah.

Adapun SPM dibidang Urusan Kesehatan, antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4.	Pelayanan Kesehatan Balita
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
11.	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberculosis (TBC)
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)

4.2.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang menerima layanan kesehatan	100 %	2021
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang menerima layanan kesehatan	100 %	2021

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang menerima layanan kesehatan	100 %	2021
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang menerima layanan kesehatan	100 %	2021
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang menerima layanan kesehatan	100 %	2021
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang menerima layanan kesehatan	100 %	2021
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang menerima layanan kesehatan	100 %	2021
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang menerima layanan kesehatan	100 %	2021
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) yang menerima layanan kesehatan	100 %	2021
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menerima layanan kesehatan	100 %	2021
11.	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberculosis (TBC)	Jumlah Orang terduga Tuberculosis (TBC) yang menerima layanan kesehatan	100 %	2021

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Orang dengan Resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang menerima layanan kesehatan	100 %	2021

4.2.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional Tahunan	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2021		
					Pembilang	Penyebut	Nilai
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	Dinas Kesehatan	3.487	3.018	86,55 %
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	Dinas Kesehatan	3.329	3.108	93,36 %
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %	Dinas Kesehatan	3.170	3.010	94,95 %
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100 %	Dinas Kesehatan	12.991	9.268	71,34 %
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan	100 %	Dinas Kesehatan	33.474	19.507	58,28 %

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional Tahunan	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2021		
					Pembilang	Penyebut	Nilai
		kesehatan sesuai standar					
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	Dinas Kesehatan	134.901	131.669	97,60 %
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	Dinas Kesehatan	21.045	15.320	72,80 %
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	Dinas Kesehatan	51.774	45.551	87,98 %
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	Dinas Kesehatan	5.770	5.770	100 %

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional Tahunan	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2021		
					Pembilang	Penyebut	Nilai
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %	Dinas Kesehatan	386	386	100 %
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TBC)	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 %	Dinas Kesehatan	3.940	3.940	100 %
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 %	Dinas Kesehatan	4.967	3.687	74,23 %

Sarana Dan Prasarana Bidang Kesehatan Serta Personil

No	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah	Jumlah TT rawat inap	Jumlah Dokter umum	Jumlah Dokter Gigi	Jumlah Dokter Spesialist	Jumlah Perawat	Jumlah Bidan	Jumlah Tenaga Kefarmasian	Jumlah tenaga kes lainnya dan admin
1	Puskesmas	8	0	25	14	0	81	96	16	40
	Puskesmas Bugul Kidul	1	0	4	2	0	11	15	2	6
	Puskesmas Gadingrejo	1	0	3	2	0	12	15	2	4
	Puskesmas Kandang sapi	1	0	3	2	0	11	14	2	7
	Puskesmas Karangketug	1	0	4	2	0	11	13	2	3
	Puskesmas Kebonagaung	1	0	3	2	0	8	8	2	4
	Puskesmas Kebonsari	1	0	2	1	0	7	11	2	6
	Puskesmas Sekargadung	1	0	3	1	0	13	11	2	4
	Puskesmas Trajeng	1	0	3	2	0	8	9	2	6
2	Rumah Sakit	2	335	36	5	46	298	82	34	95
	RSUD dr. R. Soedarsono	1	236	26	2	28	253	61	30	78
	RS. Graha Sehat Medika	1	99	10	3	18	45	21	4	17
3	Klinik kesehatan swasta rawat inap	2	20	11	3	2	52	6	6	38
	Klinik AL AZIZ	1	10	6	1	0	24	3	4	3
	Klinik Medika Sudirman	1	10	5	0	2	19	3	3	3
4	Klinik kesehatan swasta tanpa rawat inap	15	0	38	15	2	40	15	6	3

No	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah	Jumlah TT rawat inap	Jumlah Dokter umum	Jumlah Dokter Gigi	Jumlah Dokter Spesialist	Jumlah Perawat	Jumlah Bidan	Jumlah Tenaga Kefarmasian	Jumlah tenaga kes lainnya dan admin
	KLINIK AL FATTAH	1	0	4	4	0	2	1	1	0
	KLINIK AL MA'UNAH	1	0	6	1	0	3	5	0	1
	KLINIK BHAYANGKARA POLRES	1	0	1	1	0	4	4	0	0
	Klinik Kecantikan Zahra House of Beauty	1	0	0	0	0	2	0	0	0
	KLINIK KECANTIKAN METAMORF	1	0	1	0	0	5	0	0	0
	Klinik Az-Zahra	1	0	2	1	0	2	1	2	0
	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Probolinggo	1	0	1	0	0	1	0	0	1
	KLINIK KODIM 0819	1	0	3	1	0	2	1	0	0
	KLINIK MITRA 82	1	0	4	2	0	2	0	1	0
	KLINIK SEJATI 55	1	0	2	1	2	1	1	0	0
	KLINIK YON ZIPUR 10	1	0	3	1	0	2	1	0	0
	Klinik Bunga Melati Cabang Pasuruan	1	0	4	2	0	3	1	1	0
	Klinik DSA	1	0	2	0	0	7	0	1	0
	Klinik Kimi Farma Panglima Sudirman	1	0	2	1	0	2	0	0	0
	Klinik Tambaan	1	0	3	0	0	2	0	0	1
5	Klinik Bersalin	3	0	2	0	3	0	17	0	0
	Klinik Estining	1	0	1	0	1	0	3	0	0
	Klinik Ibu Bertha	1	0	0	0	1	0	9	0	0

No	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah	Jumlah TT rawat inap	Jumlah Dokter umum	Jumlah Dokter Gigi	Jumlah Dokter Spesialist	Jumlah Perawat	Jumlah Bidan	Jumlah Tenaga Kefarmasian	Jumlah tenaga kes lainnya dan admin
	Klinik Mardi Waluyo	1	0	1	0	1	0	5	0	0

4.2.4. Alokasi Anggaran

5. Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.
6. Alokasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Pasuruan untuk mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan setelah perubahan Tahun 2021 sebesar **Rp. 4.588.944.180,00** (*Empat milyar lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah*) dengan realisasi anggaran SPM sebesar **Rp. 3.339.456.336,00** (*Tiga milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah*), dengan capaian **72,77 %** yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil Pajak Rokok serta Dana Alokasi Khusus (DAK Non Fisik).

6.1.1. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM.

Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Kesehatan, antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan	Dukungan Personil
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	609 Orang PNS (tersebar di Dinkes, Puskesmas dan RSUD dr.
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi BaruLahir	

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan	Dukungan Personil
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Soedarsono)
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.472 Orang Non PNS (tersebar di
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinkes,
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik,
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Laboratorium, Optik, Praktek
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Dokter Mandiri dan Praktek Bidan
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberculosis (TBC)	Mandiri)
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	

6.1.2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun permasalahan yang ada dalam pelaksanaan SPM di Bidang Urusan Kesehatan, antara lain :

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil :

- Masa pandemi COVID-19 membuat tidak optimalnya pemantauan wilayah setempat.
- Kurangnya informasi mengenai pelayanan ANC yang seharusnya.
- Masih adanya pemahaman sosial budaya yang salah kaprah.
- Kurangnya mutu pelayanan kesehatan yang harus diterima ibu hamil.
- Kurangnya kompetensi yang update tenaga kesehatan.
- Kurangnya sarana prasarana pelayanan kesehatan ibu hamil dengan status suspect/ confirm COVID-19.
- Ibu hamil mendapatkan pelayanan di fasyankes luar wilayah kerja kab/kota.
- Pelayanan yang tidak dilaporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke puskesmas.

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin :

- Masa pandemi COVID-19 membuat tidak optimalnya pemantauan wilayah setempat.
- Kurangnya informasi mengenai pelayanan ibu bersalin yang seharusnya.
- Masih adanya pemahaman sosial budaya yang salah kaprah.
- Kurangnya mutu pelayanan kesehatan yang harus diterima ibu bersalin.
- Kurangnya kompetensi yang update tenaga kesehatan.
- Kurangnya sarana prasarana pelayanan kesehatan ibu hamil dengan status suspect/ confirm COVID-19.
- Ibu bersalin mendapatkan pelayanan di fasyankes luar wilayah kerja kab/kota.

- Pelayanan yang tidak dilaporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke puskesmas.
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir :
- Masa pandemi COVID-19 membuat tidak optimalnya pemantauan wilayah setempat.
 - Kurangnya informasi mengenai pelayanan bayi baru lahir yang seharusnya.
 - Masih adanya pemahaman sosial budaya yang salah kaprah.
 - Kurangnya mutu pelayanan kesehatan yang harus diterima bayi baru lahir.
 - Kurangnya kompetensi yang update tenaga kesehatan.
 - Kurangnya sarana prasarana pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan status suspect/ confirm COVID-19.
 - Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan di fasyankes luar wilayah kerja Kab/Kota.
 - Pelayanan yang tidak dilaporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke Puskesmas.
- d. Pelayanan Kesehatan Balita :
- Masa pandemi COVID-19 membuat tidak optimalnya pemantauan wilayah setempat.
 - Kurangnya informasi mengenai pelayanan balita yang seharusnya.
 - Masih adanya pemahaman sosial budaya yang salah kaprah.
 - Kurangnya mutu pelayanan kesehatan yang harus diterima balita.
 - Kurangnya kompetensi yang update tenaga kesehatan.
 - Kurangnya sarana prasarana pelayanan kesehatan balita dengan status suspect/ confirm COVID-19.
 - Balita mendapatkan pelayanan di fasyankes luar wilayah kerja Kab/Kota.
 - Pelayanan yang tidak dilaporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke Puskesmas.
- e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar :

Capaian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (skrining SD SMP) sesuai dengan permenkes tentang SPM adalah dengan periode tahun ajaran yang telah selesai yakni 2020/2021. Sehingga capaiannya dihitung dari kinerja pelayanan kesehatan pada bulan Juli 2020 s.d bulan Juni 2021. Selama masa pandemi, sekolah dilaksanakan secara daring sehingga mengganggu pelaksanaan skrining pada usia pendidikan dasar.

f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif :

Adanya pandemi COVID-19 sehingga kegiatan yang mengumpulkan masyarakat seperti posbindu/deteksi dini faktor risiko PTM di luar gedung tidak dilaksanakan.

g. Pelayanan Kesehatan Penderita Usia Lanjut :

- Kurangnya informasi mengenai pelayanan kesehatan usia lanjut.
- Pelayanan yang tidak dilaporkan dari jaringan dan jejaring puskesmas ke puskesmas.
- Adanya usia lanjut yang mendapatkan pelayanan di luar wilayah Kota Pasuruan.
- Ketersediaan sumber daya terbatas.

h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi :

Adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan kurangnya deteksi dini penyakit tidak menular (Hipertensi dan Diabetes Mellitus) dan kunjungan ke Puskesmas dibatasi.

i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) :

Adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan kurangnya deteksi dini penyakit tidak menular (Hipertensi dan Diabetes Mellitus) dan kunjungan ke Puskesmas dibatasi.

j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat :

-

k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis :

- Masa pandemi COVID- 19 mengakibatkan menurunnya jumlah kunjungan pasien di layanan kesehatan, sehingga mempengaruhi menurunnya jumlah kunjungan terduga TB.
 - Belum optimalnya rujukan horizontal terkait penanganan penderita TB.
 - Kurangnya adherence terduga TB dalam hal pemeriksaan dahak di laboratorium.
 - Adanya kekhawatiran terduga TB yang tidak mau pemeriksaan dahak dikarenakan pandemi COVID-19.
- I. Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) :
- Kunjungan KT HIV menurun pada masa pandemi.

Adapun solusi yang diupayakan guna meningkatkan pelaksanaan SPM Bidang Urusan Kesehatan, antara lain :

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil :
- Peningkatan Manajemen KIA dan Pembinaan KIA di Fasyankes termasuk Peningkatan Pemantauan Wilayah setempat
 - Penambahan tenaga kesehatan dalam pemantauan Sistem pemantauan wilayah setempat (surveilans kohort ibu)
 - Penambahan tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan, agar mutu pelayanan dapat diberikan dengan tuntas (hal ini dikarenakan beberapa mutu pelayanan kesehatan yang seharusnya diberikan menjadi terlewat karena tumpukan pasien dengan jumlah nakes pemberi pelayanan tidak seimbang)
 - Peningkatan kompetensi secara berkala dalam bentuk pelatihan/ workshop/ orientasi/ refreshing dan sejenisnya termasuk sosialisasi juknis dan alur layanan kia dengan status suspect / konfirmasi COVID-19
 - Menambah sarana prasarana yang menunjang layanan kesehatan ibu hamil dengan status suspect COVID-19 dan konfirmasi COVID-19.
 - Meningkatkan Frekuensi dan kualitas Pemberian Informasi di Masyarakat.

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin :

- Peningkatan Manajemen KIA dan Pembinaan KIA di Fasyankes termasuk Peningkatan Pemantauan Wilayah setempat.
- Penambahan tenaga kesehatan dalam pemantauan Sistem pemantauan wilayah setempat (surveilans kohort ibu).
- Penambahan tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan, agar mutu pelayanan dapat diberikan dengan tuntas (hal ini dikarenakan beberapa mutu pelayanan kesehatan yang seharusnya diberikan menjadi terlewati karena tumpukan pasien dengan jumlah nakes pemberi pelayanan tidak seimbang).
- Peningkatan kompetensi secara berkala dalam bentuk pelatihan/ workshop/ orientasi/ refreshing dan sejenisnya termasuk sosialisasi juknis dan alur layanan KIA dengan status suspect / Konfirm COVID-19.
- Menambah sarana prasarana yang menunjang layanan kesehatan ibu hamil dengan status suspect COVID-19 dan confirm COVID-19.
- Meningkatkan Frekuensi dan kualitas Pemberian Informasi di Masyarakat.

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir :

- Peningkatan Manajemen KIA dan Pembinaan KIA di Fasyankes termasuk Peningkatan Pemantauan Wilayah setempat.
- Penambahan tenaga kesehatan dalam pemantauan Sistem pemantauan wilayah setempat (surveilans kohort bayi).
- Penambahan tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan, agar mutu pelayanan dapat diberikan dengan tuntas (hal ini dikarenakan beberapa mutu pelayanan kesehatan yang seharusnya diberikan menjadi terlewati karena tumpukan pasien dengan jumlah nakes pemberi pelayanan tidak seimbang).
- Peningkatan kompetensi secara berkala dalam bentuk pelatihan/ workshop/ orientasi/ refreshing dan sejenisnya termasuk sosialisasi juknis dan alur layanan KIA dengan status suspect / Konfirm COVID-19.

- Menambah sarana prasarana yang menunjang layanan kesehatan ibu hamil dengan status suspect COVID-19 dan confirm COVID-19.
 - Meningkatkan Frekuensi dan kualitas Pemberian Informasi di Masyarakat.
- d. Pelayanan Kesehatan Balita :
- Peningkatan Manajemen KIA dan Pembinaan KIA di Fasyankes termasuk Peningkatan Pemantauan Wilayah setempat.
 - Penambahan tenaga kesehatan dalam pemantauan Sistem pemantauan wilayah setempat (surveilans kohort balita).
 - Penambahan tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan, agar mutu pelayanan dapat diberikan dengan tuntas (hal ini dikarenakan beberapa mutu pelayanan kesehatan yang seharusnya diberikan menjadi terlewati karena tumpukan pasien dengan jumlah nakes pemberi pelayanan tidak seimbang).
 - Peningkatan kompetensi secara berkala dalam bentuk pelatihan/ workshop/ orientasi/ refreshing dan sejenisnya termasuk sosialisasi juknis dan alur layanan kia dengan status suspect / Konfirm COVID-19.
 - Menambah sarana prasarana yang menunjang layanan kesehatan ibu hamil dengan status suspect COVID-19 dan confirm COVID-19.
 - Meningkatkan Frekuensi dan kualitas Pemberian Informasi di Masyarakat.
- e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar :
- Menghadapi masa pandemi COVID-19 yang belum usai, maka saat ini dikembangkan pemberian pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan kondisi tidak ada kegiatan tatap muka, maka pengembangan skrining dengan memakai google form.
- f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif :
- Pe Melaksanakan kegiatan posbindu/deteksi dini faktor risiko PTM dengan menggunakan protokol kesehatan.
 - Meningkatkan peran kader posbindu dalam pemantauan deteksi dini Faktor Risiko PTM di wilayahnya.
- g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut :

- Peningkatan Manajemen Pemantauan Lansia.
 - Penambahan tenaga kesehatan dalam pemantauan Lansia.
 - Peningkatan kompetensi secara berkala dalam bentuk pelatihan/ workshop/ orientasi/ refreshing dan sejenisnya termasuk sosialisasi juknis.
 - Meningkatkan Frekuensi dan kualitas Pemberian Informasi di Masyarakat.
- h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi :
- Melaksanakan kegiatan posbindu/deteksi dini faktor risiko PTM dengan menggunakan protokol kesehatan dan merujuk pasien yang terindikasi Hipertensi ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
 - Meningkatkan peran kader posbindu dalam pemantauan deteksi dini Faktor Risiko PTM di wilayahnya.
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) :
- Melaksanakan kegiatan posbindu/deteksi dini faktor risiko PTM dengan menggunakan protokol kesehatan dan merujuk pasien yang terindikasi Diabetes Mellitus ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
 - Meningkatkan peran kader posbindu dalam pemantauan deteksi dini Faktor Risiko PTM di wilayahnya.
- j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat :
- Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan.
- k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis :
- Untuk mendukung dan memastikan bahwa layanan TB tetap berjalan terhadap pasien TB sensitive obat (TB-SO) baik yang masih berstatus terduga TB maupun pasien yang berstatus sedang dalam pengobatan TB terdapat Proktokol Tata Laksana Pasien TB dalam masa Pandemi Covid-19. Di Dalam protokol ini mulai dari pencegahan; manajemen perencanaan; perawatan & pengobatan; laboratoruim dan SDM.
 - Melakukan Advokasi kepada fasilitas kesehatan swasta terkait TB DOTS, kerjasama lintas program untuk optimalisasi rujukan horizontal TB.

- Melakukan pengembangan jejaring faskes swasta terutama dalam melayani tb dots.
 - Mengaktifkan kembali Public Private Mix TB melalui jejaring puskesmas.
 - Pengaturan jejaring pemeriksaan TCM guna meningkatkan cakupan terduga TB.
- I. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) :
- Mengoptimalkan layanan konseling dan tes HIV di Puskesmas dan RSUD dengan memperhatikan protokol kesehatan dan penguatan konseling pada ODHA (orang dengan HIV AIDS),
 - Mengupayakan semua ibu hamil baik yang datang ke Puskesmas atau jemput bola untuk diinisiasi tes HIV.
- Memakai data sasaran rill berdasarkan hasil survey keluarga sehat.

6.2. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

6.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah.

Adapun SPM dibidang Urusan Pekerjaan Umum, antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum
1.	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

6.2.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah warga kota yang memperoleh layanan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	2021
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah warga kota yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	2021

6.2.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2025)	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2021		
					Pembila ng	Penyeb ut	Nilai
1.	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah warga kota yang memperoleh layanan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	Dinas Perkim	63.929	63.929	100 %
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah warga kota yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	Dinas Perkim	56.732	63.929	88,74 %

6.2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Pekerjaan Umum, antara lain:

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum	Alokasi Dana (Rp)
1.	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	3.541.854.200
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	3.885.614.495

Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM.

Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum, antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum	Dukungan Personil
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	2 Orang PNS 2 Orang Non PNS
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	2 Orang PNS 12 Orang Non PNS

6.2.5. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun permasalahan yang ada dalam pelaksanaan SPM di Bidang Urusan Pekerjaan Umum, antara lain :

- Ada 1 (satu) paket pekerjaan septictank komunal di Kelurahan Bugul Lor tidak terlaksana dikarenakan KSM dan Lokasi tidak siap.

Adapun solusi yang diupayakan guna meningkatkan pelaksanaan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum, antara lain :

- Mempersiapkan dan memastikan kembali KSM siap melaksanakan kegiatan dan Lokasi juga siap/tersedia.

6.3. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

6.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah.

Adapun SPM dibidang Urusan Perumahan Rakyat, antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kota

6.3.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota	Persentase warga kota korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	2021
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kota	Persentase warga kota yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %	2021

6.3.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2025)	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2021		
					Pembila ng	Penyeb ut	Nilai
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kota	Persentase warga kota korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	BPBD	25	25	100 %
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kota	Persentase warga kota yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %	Dinas Perkim	NIHIL		

6.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Perumahan Rakyat, antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Alokasi Dana (Rp)
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota	210.009.908
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kota	N I H I L

6.3.5. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM.

Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Perumahan Rakyat, antara lain:

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Dukungan Personil
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota	2 Orang PNS 2 Orang Non PNS
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kota	NIHIL

6.3.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun permasalahan yang ada dalam pelaksanaan SPM di Bidang Urusan Perumahan Rakyat, antara lain :

- Terkait dengan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak bagi korban bencana kota, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan bekerjasama dengan BPBD Kota Pasuruan telah memberikan bantuan teknis

untuk survey lokasi dan melaksanakan perhitungan kebutuhan biaya penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana.

- Tidak terdapat kegiatan program pemerintah yang berakibat relokasi rumah penduduk pada TA 2021, sehingga tidak ada fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena program relokasi Pemerintah Kota. Program relokasi pernah dilaksanakan dengan sasaran penghuni rumah liar pada pembangunan Rusunawa Tambaan TA. 2011-2012.
- Backlog rumah di Kota Pasuruan masih cukup tinggi.

Adapun solusi yang diupayakan guna meningkatkan pelaksanaan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat, antara lain :

- Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait, serta memberikan bantuan teknis terkait rumah bagi korban bencana.
- Berupaya membuat usulan bantuan ke Pemerintah Pusat terkait program Rusunawa atau Rusuwa di Kota Pasuruan pada tahun mendatang, sebagai upaya mengurangi backlog rumah.
- Memberikan fasilitasi kemudahan kepada pengembang perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan, untuk dapat membangun rumah bersubsidi.

6.4. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

6.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah.

Adapun SPM dibidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

6.4.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase warga kota yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100 %	2021
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase warga kota yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	2021
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase warga kota yang memperoleh layanan pencegahan dan	100 %	2021

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
	Terhadap Bencana	kesiapsiagaan terhadap bencana		
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga kota yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	2021
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase warga kota yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	2021

6.4.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2015)	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2021		
					Pembilang	Penyebut	Nilai
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase warga kota yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100 %	Satpol PP	1224	1224	100 %
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase warga kota yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	BPBD	118 RT	118 RT	100 %
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga kota yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	BPBD	-	-	-
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga kota yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	BPBD	16.350 jiwa	16.350 jiwa	100 %
5.	a. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase warga kota yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	BPBD	72 kejadian	72 kejadian	100 %

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2015)	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2021		
					Pembilang	Penyebut	Nilai
	b. Layanan Penunjang Capaian SPM.	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi nonkebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.			-	-	-

6.4.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Alokasi Dana (Rp)
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.265.150.750
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1.393.346.380
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	35.815.271
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	444.468.960

6.4.5. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM.

Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Dukungan Personil
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	84 Orang PNS 16 Orang Non PNS
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	35 Orang PNS 51 Orang Non PNS
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Dukungan Personil
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	

6.4.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun permasalahan yang ada dalam pelaksanaan SPM di Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, antara lain :

- a. Belum tersedianya rumah singgah bagi anak jalanan, gelandang dan pengemis yang terjaring razia;
- b. Belum terpenuhinya penambahan personil Satuan Polisi Pamomg Praja untuk pasukan yang bertugas dilapangan
- c. Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia termasuk belum terpenuhinya seluruh amanah aturan dan regulasi yang dikehendaki Undang – Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- d. Masih tersebarnya dan belum terbangun Sistem Informasi dan Komunikasi Kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi.
- e. Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masih berjalan secara sectoral.
- f. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan.
- g. Belum terbangunnya Sistem Informasi dan Komunikasi Kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi
- h. Tidak tersedianya hidrand di permukiman padat penduduk dimana mobil damkar tidak bisa masuk.

- i. Belum memiliki SOP (Standart Operational Procedure) Penanggulangan Bencana.

Adapun solusi yang diupayakan guna meningkatkan pelaksanaan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, antara lain :

- a. Perlu adanya rumah singgah bagi anak jalanan, gelandang dan pengemis yang terjaring razia sehingga mereka dapat di bina untuk diberi ketrampilan dengan tujuan setelah keluar dari rumah singgah mereka tidak kembali ke jalanan;
- b. Penambahan kuota dalam penerimaan pegawai ASN baru untuk Satuan Polisi Pamong Praja atau penambahan personil/mutasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lain
- c. Dibutuhkannya Hidrant di setiap permukiman padat penduduk yang Mobil Damkar tidak bisa masuk ke gang kecil lokasi kebakaran.
- d. Mengoptimalkan koordinasi untuk pelaksanaan penanggulangan darurat bencana dengan instansi terkait dan masyarakat.
- e. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang tersedia dengan kursus – kursus kebencanaan, pelatihan – pelatihan kebencanaan, untuk kondisi pra bencana, bencana terjadi dan pasca bencana.
- f. Kerjasama yang baik dengan pihak – pihak yang terkait dalam segala bidang dan segala hal.
- g. Perlu dibangun Sistem Informasi dan Komunikasi Kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi.
- h. Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat untuk pelaksanaan penanganan bencana
- i. Di usulkan pembangunan hidrand di beberapa permukiman padat penduduk
- j. Diperlukan sarana dan prasarana sesuai standart dalam penanganan bencana
- k. SOP penanggulangan bencana di tahun 2021 sudah tersusun namun masih perlu di sosialisasikan terlebih dahulu

- l. Penyelenggaraan penanganan bencana harus di selaraskan baik dalam pemerintahan maupun masyarakat dan harus berjalan secara menyeluruh.
- m. Peningkatan kualitas pelayanan penanganan bencana terutama terkait dengan pemenuhan kebutuhan makanan siap santap.

6.5. Bidang Urusan Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

6.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah.

Adapun SPM dibidang Urusan Sosial, antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota

6.5.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Kota penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	2021
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti	100 %	2021
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Kota lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	2021
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Kota yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 %	2021
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana skala Kota yang menerima perlindungan dan jaminansosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 %	2021

6.5.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2025)	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2021		
					Pembila ng	Penyeb ut	Nilai
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Kota penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	Dinas Sosial	31	582	5,33 %
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti					
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	Jumlah Warga Kota lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti					
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Kota yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar					

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2025)	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2021		
					Pembila ng	Penyeb ut	Nilai
		tuna sosial di luar panti					
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana skala Kota yang menerima perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 %	Dinas Sosial & BPBD	132	132	100%

6.5.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Sosial, antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial	Alokasi Dana (Rp)
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	79.708.900
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	78.116.200

6.5.5. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM.

Adapun dukungan personil pada Bidang Sosial, antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial	Dukungan Personil
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	10 Orang PNS 19 Orang Non PNS
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	

6.5.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun permasalahan yang ada dalam pelaksanaan SPM di Bidang Sosial, antara lain :

- 1 Dukungan anggaran dan peraturan daerah dalam pelaksanaan SPM.
- 2 Data penerima bansos masih belum akurat.
- 3 Kurangnya SDM yang profesional dan mempunyai keahlian di bidang sosial.
- 4 Minimnya sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan SPM.
- 5 Minimnya koordinasi lintas sektoral guna menunjang pelaksanaan SPM

Adapun solusi yang diupayakan guna meningkatkan pelaksanaan SPM Bidang Sosial, antara lain :

- a. Pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien.
- b. Melaksanakan pemutakhiran data terpadu lewat SIKS NG.
- c. Melaksanakan bimtek dan sertifikasi kepada pekerja sosial masyarakat agar memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan kegiatan sosial.
- d. Mengalokasikan anggaran APBD guna melengkapi sarana dan prasarana penunjang kegiatan sosial.
- e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan kemiskinan.

6.6. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang sudah dilakukan OPD pengampu SPM masing-masing terhadap 6 Bidang SPM di bawah ini:

1. Program dan Kegiatan Bidang Pendidikan Dasar

Program	Kegiatan
1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
	2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
	3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
	4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

2. Program dan Kegiatan Bidang Kesehatan

Program	Kegiatan
1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3. Program dan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Program	Kegiatan
1. PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	1. Fasilitasi Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi
2. PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN	1. Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan idl capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun (DAK Penugasan)
	2. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perkotaan dan/atau perdesaan (DAK Reguler)
	3. Pemeliharaan Prasarana Air Limbah

4. Program dan Kegiatan Bidang Perumahan Rakyat

Program	Kegiatan
1. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
4. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

5. Program dan Kegiatan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program	Kegiatan
1. PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana kabupaten/Kota
	2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
3. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

6. Program dan Kegiatan Bidang Sosial

Program	Kegiatan
1. REHABILITASI SOSIAL	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
	2. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
	3. Pemberian Layanan Rujukan
2. PENANGANAN BENCANA	1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
4. PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1. Pelayanan Dukungan Psikososial
	2. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
	3. Penyediaan Sandang
	4. Penyediaan Makanan
	5. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

BAB V PENUTUP

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab demi bab dimuka bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Pasuruan Tahun 2021, dengan Dasar Hukum penulisan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Penyelenggaraan tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dimana uraian tersebut adalah merupakan program / kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2021. Adapun ruang lingkupnya atas Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan.

Dimana tahun 2021 ini sendiri, banyak hal yang telah kita perbuat dan tidak sedikit pula keberhasilan yang telah kita raih sebagai usaha bersama dari semua pihak. Namun demikian, tentu juga masih ada tugas – tugas yang memang belum dapat kita selesaikan, karena berbagai keterbatasan. Semoga di masa mendatang kita akan mampu untuk berbuat lebih baik dalam memenuhi apa yang menjadi aspirasi dan harapan masyarakat Kota Pasuruan.

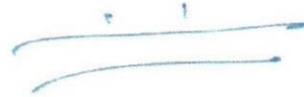
Oleh sebab itu dengan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Pasuruan Tahun 2021 kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Jawa Timur ini, diharapkan akan ada rekomendasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang dapat dipergunakan sebagai perbaikan kinerja bagi Pemerintah Kota Pasuruan di masa yang akan datang, sehingga dalam pelaksanaan program / kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan akan lebih maksimal serta dapat lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Pasuruan secara keseluruhan. Karena hanya dengan perbaikan kekurangan yang sekaligus adanya inovasi penetapan target kinerja, indikator kinerja yang terukur, serta transparan dan akuntabel, percepatan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pasuruan dalam pembangunan daerah akan dapat segera terwujud.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Pasuruan Tahun 2021 yang dapat kami sampaikan. Sebagai penutup kami sampaikan bahwa kendati kami sudah melakukan upaya yang semaksimal mungkin, namun demikian kekurangan, kekeliruan tetap saja bisa terjadi. Untuk itu dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf atas segala kekurangan dan senantiasa membuka terhadap segala kritikan dan masukan guna perbaikan untuk di masa yang akan datang. Dengan segala keterbatasan tidak lupa kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta pemikiran bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Pasuruan sejauh ini.

Sekian Terima Kasih.

Pasuruan, Maret 2022

WALIKOTA PASURUAN



H. SAIFULLAH YUSUF